

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Riset : Pengembangan Manajemen Berbasis Sekolah
Menggunakan “Model *Continuous Quality Improvement (CQI)* dengan *Plan, Do, Study, Act (PDSA)*” pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Palembang

Program : Hibah Potensi Pendidikan Kabupaten/Kota

Bidang : Pendidikan

Peneliti Utama : Dr. Aisyah, AR., M.Pd.
Dr. Sri Sumarni, M.Pd.

Jenis Kelamin : Wanita

Lama Riset : 1 (satu) tahun

Tahun mulai riset : 2009

Total Biaya : Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Tahap I : Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)

Tahap II : Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Inderalaya, Desember 2009

Ketua Lembaga Penelitian : Ketua Peneliti,
Universitas Sriwijaya,

Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Said, M. Sc
NIP 19610812 198703 1 003

Dr. Aisyah, AR., M. Pd
NIP 19500412 197503 2 001

Mengetahui
Pembantu Rektor I

Dr. H. Zulkifli Dahlan, M. .Sc, DEA

NIP 19480102 197803 1 001

NIP 195901011986032001

SUBSTANSI

1. Ringkasan

MBS adalah salah satu manajemen yang bertujuan untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusianya yaitu kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, masyarakat dan lainnya yang dapat memberikan masukan terhadap sekolah. MBS dijadikan sebagai alternatif dalam reformasi pendidikan dikarenakan sentralistik selama ini dilakukan di sekolah-sekolah memiliki banyak kelemahan (seperti pengambilan keputusan oleh pusat tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah dan birokrasinya pun masih berbelit-belit), sekolah berkesempatan untuk berpartisipasi memajukan peserta didik apabila guru, orang tua peserta didik dan masyarakat ikut bertanggung jawab mengelola sekolah.

Berkaitan dengan pengembangan MBS melalui “Model Manajemen Berbasis *CQI* dengan *PDSA*” belum banyak yang mengenalnya terutama kepala sekolah dan guru. Model pengembangan ini diyakini berkorelasi dengan peningkatan proses MBS dan mutu sekolah. Oleh karena itu MBS dengan pengembangan “Model Manajemen Berbasis *CQI* dengan *PDSA*” dengan tujuan peningkatan pelaksanaan MBS yang bermutu sangat penting dan dibutuhkan oleh sekolah mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah, walaupun pada saat ini penulis hanya membatasi pada SMP saja.

Secara umum penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi komponen-komponen MPMBS yang sudah dilaksanakan di Sekolah Menengah tingkat Pertama pada periode terakhir sebelum penelitian ini dimulai, (2) mengembangkan dan mengimplementasikan MBS dengan “Model Manajemen *CQI* dengan *PDSA*”, (3) mengevaluasi serta merevisi konsep MBS yang diimplementasikan untuk SMP, (4) menghasilkan pedoman penerapan MBS menggunakan model pengembangan *CQI* dengan *PDSA* di masing-masing SMP.

Kata Kunci : MBS, Model *CQI*, *PDSA*

2. Pendahuluan

Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*) pada dasarnya merupakan pemberian kebebasan kepada sekolah untuk mengurus semua yang berkaitan dengan penyelenggaraan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen Berbasis Sekolah yang disingkat MBS dianggap sebagai pengembalian fungsi pengelolaan pendidikan yang selama ini didominasi pusat dengan segala jajarannya atau disebut dengan manajemen berbasis pusat dan di sekolah kepala sekolah sebagai manajer sekolah.

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, maka terjadilah perubahan berbagai kewenangan Pemerintah Pusat atau Depdiknas dalam berbagai hal, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan. Di satu sisi upaya otonomi pendidikan akan berpengaruh terhadap berkembangnya sekolah sebagai lembaga pendidikan. Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional tahun 2004-2005 Bab IV bidang pendidikan khusus sasaran (3) yaitu terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis pada sekolah dan masyarakat (*school community based management*). Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan, khususnya standar pengelolaan sekolah yaitu MBS. Di sisi lain, keragaman potensi sumber daya daerah termasuk kualitas manajemen kepala sekolah akan menyebabkan kualitas hasil pendidikan di masing-masing daerah bervariasi. Oleh karena itu, dirasa perlu melakukan pendekatan baru untuk mengatasi berbagai pemahaman pengelolaan sekolah yang selama ini dihadapi yang antara lain melalui pemberian kewenangan yang seluas-luasnya bagi daerah dan kepala sekolah untuk mengelola dan mengembangkan berbagai sumber daya sekolah untuk mengembangkan program sekolah sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Pengalaman adanya kebijakan sentralistik terutama di daerah yang terasa masih banyaknya sistem yang dari atas/pusat ke daerah tetap saja dilakukan, yaitu, keterbatasan wewenang pimpinan sekolah dalam mengelola sumber daya manusia, sumber daya pendidikan sekolah, pola anggaran yang kurang memungkinkan, belum memberi imbalan guru profesional yang memadai, peran masyarakat dalam mengelola pendidikan sekolah masih terbatas, keterlibatan orang tua hanya terbatas pada pemberian dana pembangunan, kemampuan manajemen kepala sekolah dalam mengembangkan program pendidikan belum optimal terutama pada pelaksanaan konsep-konsep MPMBS, guru masih banyak belum memahami pelaksanaan MBS yang efektif dalam pembelajaran.

Dengan demikian reformasi pengelolaan pendidikan dengan konsep MBS sangat perlu diarahkan dengan betul-betul desentralisasi dan otonomi sekolah, baik pada tatanan birokrasi maupun pengelolaan sekolah. Khusus pada tingkat

sekolah menengah pertama dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan berdasarkan “Model Manajemen Berbasis *CQI* dengan *PDSA*”.

MBS adalah salah satu manajemen yang bertujuan untuk memberdayakan sekolah, terutama sumber daya manusianya yaitu kepala sekolah, guru, peserta didik, orang tua, masyarakat dan lainnya yang dapat memberikan masukan terhadap sekolah. MBS dijadikan sebagai alternatif dalam reformasi pendidikan dikarenakan sentralistik selama ini dilakukan di sekolah-sekolah memiliki banyak kelemahan (seperti pengambilan keputusan oleh pusat tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah dan birokrasinya pun masih berbelit-belit), sekolah berkesempatan untuk berpartisipasi memajukan peserta didik apabila guru, orang tua peserta didik dan masyarakat ikut bertanggung jawab mengelola sekolah.

Berkaitan dengan pengembangan MBS melalui “Model Manajemen Berbasis *CQI* dengan *PDSA*” belum banyak yang mengenalnya terutama kepala sekolah dan guru. Model pengembangan ini diyakini berkorelasi dengan peningkatan proses MBS dan mutu sekolah. Oleh karena itu MBS dengan pengembangan “Model Manajemen Berbasis *CQI* dengan *PDSA*” dengan tujuan peningkatan pelaksanaan MBS yang bermutu sangat penting dan dibutuhkan oleh sekolah mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah, walaupun pada saat ini penulis hanya membatasi pada SMP saja.

Atas dasar tujuan dan alasan di atas, berkaitan dengan pelaksanaan MBS dengan “Model Manajemen Berbasis *CQI* dengan *PDSA*” ini yang berlandaskan pada model pendekatan sistem dan dibangun dengan memperhatikan kebijakan dan panduan dari pemerintah serta partisipasi masyarakat melalui *school council (SC)* dan *parent and community association (P&C)* diharapkan para kepala sekolah, guru dan lainnya akan merupakan kajian dalam memperbaiki manajemen berbasis sekolah. Oleh karena itu dengan memulainya “Model Manajemen Berbasis *CQI* dengan *PDSA*” dalam pelaksanaan MBS dapat meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran di sekolah sekaligus efektifitas sekolah secara umum.

Dari pemahaman itu, kalau semua sekolah ingin meningkatkan kualitas MBS dapat dimulai dengan melaksanakan MBS dengan “Model Manajemen Berbasis *CQI* dengan *PDSA*”. Karena cara ini akan membuka wawasan kepala

sekolah dan guru untuk mengkreasi lebih intensif dalam sistem demokratis dalam pelaksanaan MBS. Pelaksanaan MBS dengan pengembangan “Model Manajemen Berbasis *CQI* dengan *PDSA*” akan berdampak pada kapasitas umum sekolah, kapasitas dalam bidang studi, pencapaian belajar peserta didik dan keutuhan, produktitas dan mutu sekolah.

Tujuan utama penelitian ini adalah peningkatan mutu pendidikan dan memperdayakan sumber daya manusia, kepedulian warga sekolah dan masyarakat penyelenggara pendidikan melalui pengambilan keputusan, tanggung jawab sekolah kepada orang tua masyarakat dan pemerintah, kompetensi antar sekolah tentang mutu pendidikan melalui pengembangan “Model Manajemen Berbasis *CQI* dengan *PDSA*” untuk siswa SMP di Kota Palembang.

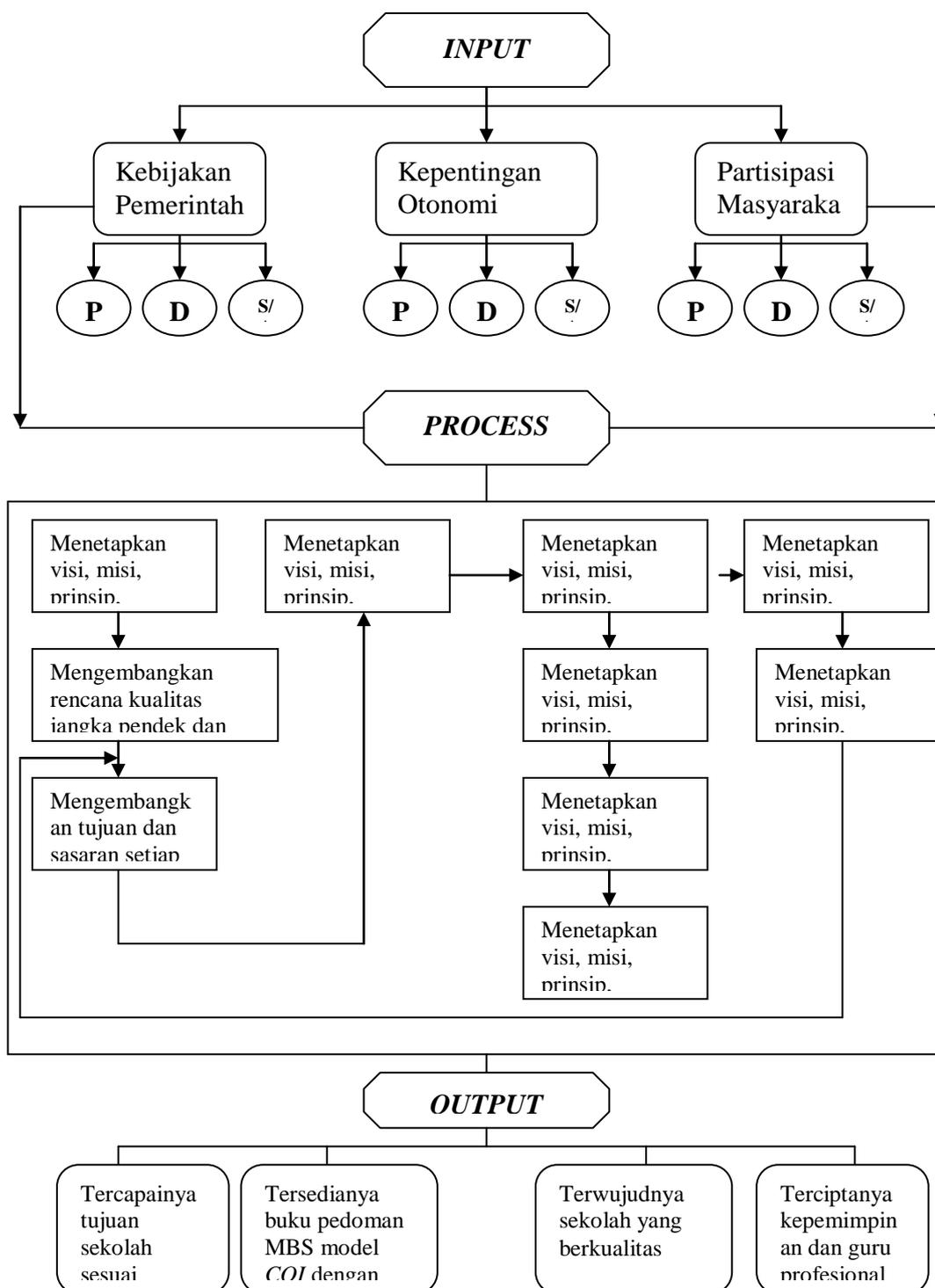
Secara khusus penelitian ini bertujuan, diantaranya mengidentifikasi *output* sejauhmana sasaran yang ditetapkan telah dicapai yaitu kualitas, kuantitas dan waktu, untuk mengetahui komponen-komponen utama yang telah dilakukan yaitu konsolidasi dan pengembangan kapasitas sekolah di kota Palembang, partisipasi, kesederhanaan, rasa memiliki, pengembangan kapasitas, kemandirian, kinerja program, koordinasi program, menyikapi sumber daya pendidikan dan evaluasi program, untuk mengembangkan MBS yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, kepala sekolah, guru dan peserta didik di Kota Palembang, untuk mengetahui materi atau komponen pokok yang digunakan oleh sekolah, kepala sekolah, guru dan peserta didik sesuai dengan keadaan di Kota Palembang melalui model *CQI* dengan *PDSA*” dan pendekatan sistem, dan sebagainya.

Penelitian ini penting bagi terlaksananya manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang lebih efektif dan efisien di sekolah-sekolah dengan menggunakan sistem yang disusun serta dikembangkan melalui “Model Manajemen Berbasis *CQI* dengan *PDSA*” dan pendekatan sistem. Model Manajemen peningkatan mutu berbasis *Continuous Quality Improvement* dikemukakan Deming, Juran dan Crosby yang mengidentifikasi bahwa proses perbaikan kualitas apapun memerlukan keseimbangan antara perbaikan proses dan peningkatan atau perbaikan sumber daya manusia yang dikendalikan oleh

kepemimpinan yang berkualitas. Dalam hal pendidikan khususnya di sekolah adalah kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah.

Manajemen melalui kebijakan kualitas *Continuous Quality Improvement* dengan *Plan, Do, Study dan Act (PDSA)* yang dikemukakan Collins dan Hage dan dimodifikasi berdasarkan input, proses dan output menjadi dasar model penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:

MODEL 1
CQI DENGAN PDSA MODIFIKASI



Prinsip-prinsip desain manajemen melalui kebijakan kualitas *Continuous Quality Improvement* dengan *Plan, Do, Study* dan *Act (PDSA)* ialah: (1) tujuan pencapaian mutu sekolah diperoleh dari analisis kebutuhan sekolah, siswa dan guru serta *stakeholders* yang digunakan sebagai dasar bagi pemilihan aspek-aspek penyusunan rancangan model (2) adanya integrasi komponen-komponen dalam penyusunan model rancangan berdasarkan analisis kebutuhan sekolah, siswa dan guruserta *stakeholders*. Demikian pentingnya analisis kebutuhan dalam penyusunan desain ini sehingga kajian pustaka berikut berkaitan dengan analisis kebutuhan itu sendiri sehingga terpilih desain model manajemen berbasis *Continuous Quality Improvement* dengan *Plan, Do, Study* dan *Act* sebagai acuan dalam penyusunan MBS yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

Pelopor dari penggunaan analisis kebutuhan ialah Richterich dan Chancerel. Analisis kebutuhan merupakan proses awal dalam penentuan tujuan-tujuan perilaku tertentu yang akan dicapai. Dari tujuan-tujuan perilaku ini kemudian dijabarkan ke dalam aspek-aspek penyusunan rancangan, seperti fungsi, tujuan, judul dan komponen-komponen struktural lainnya. Analisis kebutuhan siswa, guru dan *stakeholders* merupakan hal yang penting dalam pengembangan model ini. Analisis kebutuhan juga diperlukan dalam rangka merancang materi pelaksanaan model. Dalam rangka merancang materi tersebut perancang akan terlibat dengan tiga aspek penting yakni (1) menganalisis kebutuhan sekolah, guru dan siswa serta memonitor kemajuan yang diperolehnya, (2) menyeleksi apa yang perlu dipelajari oleh sekolah, guru, siswa berdasarkan kebutuhannya, (3) menyusun materi pokok pelaksanaan MBS agar MBS menjadi seefektif mungkin (Tomlinson, 1998:2).

Analisis kebutuhan yang dimaksudkan dalam penelitian ini pada hakikatnya berkaitan dengan tujuan MBS itu sendiri. Seperti diketahui bahwa tujuan MBS ialah agar sekolah berkualitas, guru berkualitas dan profesional, siswa mampu dan terampil dengan lulusan yang berkualitas. Dikatakan bermutu apabila siswa dapat menggunakan kemampuannya dengan tepat dan baik

berdasarkan pada situasi tertentu. Dikatakan secara baik apabila siswa menggunakan kemampuannya secara tepat guna. Dengan demikian tekanan MBS adalah guru yang berkualitas dan profesional, siswa yang bermutu dan dapat diterima di dunia kerja. Fenomena yang terdapat di SMP, SMA/SMK Negeri atau swasta di Palembang itu memang belum menggambarkan pelaksanaan MBS secara menyeluruh dan menemui hasil yang sangat memuaskan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pelaksanaan MBS sudah ada yang menerapkannya baik di SMP, SMA atau SMK Negeri Palembang.

Berdasarkan observasi awal oleh tim peneliti terhadap pelaksanaan MBS di beberapa sekolah diketahui bahwa MBS tersebut memfokuskan beberapa komponen saja dalam proses pelaksanaannya. Dengan kata lain pelaksanaan MBS oleh sekolah belum memuat kebutuhan siswa dan guru, yaitu masih adanya komponen yang tidak digabungkan. Dengan mengikuti berbagai tuntutan tersebut hendaknya MBS dan peningkatan MBS melalui model ini dapat dikembangkan secara baik dan bermutu. Sebagai contoh untuk melihat sejauhmana MBS dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, pengelolaan SDM, proses belajar mengajar, dan sumber daya sekolah/administrasi.

Diharapkan dengan adanya peningkatan mutu manajemen berbasis sekolah dengan memanfaatkan kompetensi sekolah, guru dan *stakeholder* ini terdapat peningkatan kemampuan setiap sekolah baik yang berupa *out-put*, proses dan *out-come*. Secara khusus penelitian terhadap pelaksanaan MBS dan perancangan MBS melalui “Model Manajemen Berbasis *CQI* dengan *PDSA*” dan pendekatan sistem dapat menjadi *prototipe* bagi pengembangan MBS yang dapat digunakan dengan efektif di semua lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai pada sekolah menengah. Di samping itu pola MBS yang berbasis pada desentralisasi, otonomi, partisipatif, profesional, efektif dan efisien dapat terwujud dengan baik di setiap lembaga pendidikan di kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya.

3. Metodologi

Penelitian yang dilakukan ialah penelitian pengembangan atau *Research and Development*. Metode *Research and Development* merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menuji keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2008:407). Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut.

Selanjutnya, menurut Sugiyono (2008:408-426) adapun langkah-langkah *Research and Development* ini antara lain:

- (1) mengidentifikasi potensi dan masalah;
- (2) mengumpulkan informasi;
- (3) desain produk;
- (4) validasi desain;
- (5) perbaikan desain;
- (6) uji coba produk;
- (7) revisi produk;
- (8) uji coba pemakaian;
- (9) revisi produk; serta
- (10) pembuatan produk massal.

Penelitian ini dimulai dengan merancang dan menciptakan prototipe dengan spesifikasi tertentu (Hadi,2002:5). Prototipe yang dikembangkan itu adalah model pengembangan MBS yang disusun dan dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan sekolah, siswa dan guru di Kota Palembang.

Berdasarkan hasil survei tahap awal terhadap analisis kebutuhan sekolah, siswa dan guru yang telah dilakukan oleh peneliti diketahui bahwa sekolah, siswa dan guru menghendaki adanya kejelasan pelaksanaan MBS dan desain tentang MBS serta komponen yang tepat dari aspek-aspek MBS. Dengan demikian, peneliti menyusun rancangan model peningkatan MBS dengan model manajemen berbasis *Continuous Quality Improvement* dengan *Plan, Do, Study* dan *Act*.

Untuk mengembangkan prototipe ini dilakukan kegiatan sebagai berikut.

1. Melakukan survei terhadap pelaksanaan MBS yang selama ini digunakan oleh guru-guru di sekolah-sekolah.
2. Menyusun angket kebutuhan sekolah, siswa dan guru untuk mengetahui Pelaksanaan dan komponen yang dikehendaki oleh mereka.
3. Menyusun dan mengembangkan Model peningkatan MBS melalui manajemen berbasis *Continuous Quality Improvement (CQI)* dengan *Plan, Do, Study* dan *Act* (PDSA).
4. Melakukan uji pakar baik uji pakar kurikulum maupun uji pakar isi (materi MBS) terhadap model yang dikembangkan.
5. Melakukan revisi terhadap model yang dikembangkan.
6. Melakukan survei terhadap MBS yang selama ini digunakan oleh sekolah, guru-guru dan siswa yang selama ini digunakan di sekolah-sekolah.
7. Mengumpulkan dan menyeleksi materi penerapan model
8. Menyusun prototipe materi penerapan model berdasarkan Model peningkatan MBS melalui manajemen berbasis *Continuous Quality Improvement* dengan *Plan, Do, Study* dan *Act* yang telah disusun
9. Melakukan *review* terhadap prototipe yang dilakukan oleh ahli manajemen pendidikan, ahli kurikulum bidang pendidikan, dan guru yang berpengalaman.
10. Mencobakan prototipe itu kepada sekolah yang berkualifikasi “unggul”, “umum”, dan “lemah.”
11. Mengevaluasi hasil uji-coba, baik kemampuan (kinerja) sekoah, guru dan siswa maupun karakteristik prototipe model yang dicobakan itu dengan observasi, angket, dan wawancara.
12. Merevisi prototipe itu sehingga memenuhi spesifikasi yang ditentukan.

Kegiatan-kegiatan tersebut apabila ditabelkan akan terlihat, berikut ini:

TABEL
KEGIATAN-KEGIATAN DALAM PENGEMBANGAN *PROTOTIPE* MBS

TAHAP	KEGIATAN
Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan survei terhadap MBS yang selama ini digunakan sekolah, guru-guru di sekolah tempat penelitian. 2. Menyusun angket kebutuhan ekolah,guru dan siswa untuk

	<p>mengetahui model MBS yang dikehendaki oleh mereka.</p> <p>3. Menyusun dan mengembangkan model sesuai dengan kebutuhan sekolah, guru dan siswa berdasarkan desain model yang dikembangkan.</p>
--	--

Lanjutan Tabel

Kegiatan-Kegiatan dalam Pengembangan *Prototipe* MBS

TAHAP	KEGIATAN
Pertama	<p>4. Mengumpulkan dan menyeleksi bahan yang dibutuhkan.</p> <p>5. Melakukan uji pakar, baik uji pakar kurikulum maupun uji pakar isi (manajemen pendidikan) terhadap model yang dikembangkan.</p> <p>6. Melakukan revisi terhadap model MBS yang dikembangkan.</p> <p>7. Melakukan survei terhadap MBS yang selama ini digunakan sekolah, guru-guru di sekolah tempat penelitian.</p> <p>8. Menyusun angket kebutuhan ekolah,guru dan siswa untuk mengetahui model MBS yang dikehendaki oleh mereka.</p> <p>9. Menyusun dan mengembangkan model sesuai dengan kebutuhan sekolah, guru dan siswa berdasarkan desain model yang dikembangkan.</p> <p>10. Mengumpulkan dan menyeleksi bahan yang dibutuhkan.</p> <p>11. Melakukan uji pakar, baik uji pakar kurikulum maupun uji pakar isi (manajemen pendidikan) terhadap model yang dikembangkan.</p> <p>12. Melakukan revisi terhadap model MBS yang dikembangkan.</p>
Kedua	<p>1. Menyusun prototipe komponen MBS berdasarkan model yang telah disusun yaitu model peningkatan MBS melalui manajemen berbasis <i>Continuous Quality Improvement</i> dengan <i>Plan, Do, Study</i> dan <i>Act</i>.</p> <p>2. Mencobakan model manajemen berbasis <i>Continuous Quality Improvement</i> dengan <i>Plan, Do, Study</i> dan <i>Act</i> itu kepada</p>

	<p>sekolah-sekolah yang menjadi objek penelitian.</p> <p>3. Mengevaluasi hasil uji-coba model yang dikembangkan, baik kemampuan (kinerja) sekolah maupun guru dan siswa. Evaluasi terhadap kemampuan sekolah, guru dan siswa dilakukan dengan observasi, angket, dan wawancara.</p>
--	---

Lanjutan Tabel

Kegiatan-Kegiatan dalam Pengembangan *Prototipe* MBS

TAHAP	KEGIATAN
Pertama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merevisi prototipe model yang dikembangkan sehingga memenuhi spesifikasi yang ditentukan. 2. Menyusun laporan akhir. 3. Melaporkan hasil akhir pengembangan model.

1. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini berupa: (a) hasil survei, (b) kemampuan sekolah, guru dan siswa, dan (c) hasil evaluasi terhadap model pengembangan. Sementara, alat pengumpulan data yang digunakan berupa: (a) lembar observasi, (b) daftar cek untuk survei dan evaluasi konsep, (c) kuesioner dan wawancara untuk evaluasi terhadap konsep model, dan (d) tes untuk memperoleh data tentang kemampuan sekolah, guru dan siswa berupa tes kinerja (tertulis, proyek, dan penampilan).

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan: (a) kualitatif, deskriptif, dan persentase untuk data yang dijangking dengan lembar observasi dan kuesioner, (b) *rating scale* untuk tes kinerja, proyek, dan penampilan, (c) statistik inferensial untuk kemampuan sekolah, guru dan siswa.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini rencananya akan dilaksanakan di Kota Palembang. Jangka waktu penelitian selama 12 bulan (tahap pertama, kedua dan ketiga).

4. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas: (1) sekolah, (2) guru-guru, (3) para siswa SMP Kota Palembang, (4) pakar manajemen pendidikan serta pakar kurikulum, (5) bahan-bahan tertulis seperti buku yang dipakai dalam materi manajemen pendidikan dan bahan-bahan tertulis yang relevan.

**TABEL
JADWAL PENELITIAN**

No.	Kegiatan Tahap II (2009)	Bulan ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pertemuan semua peneliti untuk penelitian selanjutnya									✓			
2	Persiapan penelitian lanjutan									✓			
3	Wawancara dengan Kepala Sekolah, Wakasek Kurikulum, Guru Mata Pelajaran di dua lokasi penelitian									✓			
4	Wawancara dengan Kepala Tata Usaha, Pengelola Perpustakaan, Laboratorium di dua lokasi penelitian									✓			
5	Wawancara dengan komite sekolah dan siswa di dua lokasi penelitian									✓			
6	Rapat koordinasi Semiloka ke-2										✓		

7	Semiloka memantapkan model pembelajaran MBS berbasis <i>CQI</i> dengan <i>PDSA</i>											✓		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

*Lanjutan tabel
Jadwal Penelitian*

No.	Kegiatan Tahap II (2009)	Bulan ke-												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	Pertemuan dengan Kepala Sekolah, komite sekolah, dan guru di dua lokasi penelitian												✓	
9	Perbaikan buku pedoman pelaksanaan MBS model <i>CQI</i> dengan <i>PDSA</i>												✓	
10	Penyusunan laporan hasil seminar ke-2												✓	
11	Penyusunan laporan hasil penelitian tahap ke-2													✓
12	Penyusunan laporan akhir penelitian													✓

4. Laporan Hasil Penelitian

Beberapa hasil yang diperoleh sebagai output dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Tercapainya tujuan sekolah sesuai dengan rencana sekolah.
- 2) Tersedianya buku pedoman MBS model *CQI* dengan *PDSA*.

- 3) Terwujudnya sekolah yang berkualitas.
- 4) Terciptanya kepemimpinan dan guru profesional.

Untuk lebih jelasnya mengenai hasil penelitian akan diuraikan di bawah ini.

- 1) Tercapainya tujuan sekolah sesuai dengan rencana sekolah.

Tercapainya tujuan sekolah yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana sekolah yang dibuat bersama. Adapun rencana strategis sekolah untuk SMP Negeri 9 Palembang dan SMP Muhammadiyah 1 Palembang, sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis SMP Negeri 9 Palembang

***RENCANA STRATEGIS SMP NEGERI 9 PALEMBANG
TAHUN PELAJARAN 2009/2010***



**RINTISAN SEKOLAH BERTARAF INTERSNASIONAL
(R S B I)
JALAN RUDUS SEKIP UJUNG
TELP. (0711)-354139 FAX-(0711)-354139 PALEMBANG**

**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PALEMBANG
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

RENCANA STRATEGIS SMP NEGERI 9 PALEMBANG

Oleh : Dr. Aisyah, AR. M.Pd. dkk

Pendahuluan

Dalam manajemen strategik pada dunia bisnis dimanfaatkan untuk memprediksi kecenderungan pasar dan peluang-peluang memperoleh keunggulan bersaing. Sementara itu, dalam dunia pendidikan menggunakan konsep strategik untuk lebih mengefektifkan pengalokasian sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuan pendidikan. Menentukan tujuan-tujuan strategik adalah memformulasikan hasil-hasil yang diharapkan dicapai secara menyeluruh selama satu periode. Para pimpinan sekolah dan guru menerjemahkan ke dalam istilah yang spesifik hasil-hasil penyelenggaraan program sekolah serta mencapai tujuan memenuhi misinya. Proses yang berperan penting menentukan tujuan-tujuan strategik dikembangkan oleh berbagai macam konfigurasi kekuatan dari dalam dan luar organisasi, seperti Kepala Sekolah, guru, asosiasi guru, *stakeholders*, peserta didik dan orang tua siswa, suplier kebutuhan sekolah, pemerintah pusat dan provinsi dan sebagainya yang menaruh perhatian terhadap program sekolah.

Pada saat menentukan strategi, baik untuk organisasi yang memiliki arah dan sasaran yang tertulis maupun tidak perlu memperhatikan berbagai hal, termasuk kemampuan SDM dan anggaran. Langkah-langkah formulasi strategik dalam manajemen sekolah tentu dimulai dari penetapan visi dan misi sekolah yang utuh dengan melibatkan masyarakat sekolah dan *stakeholder* sekolah, melakukan *assessment*. Lalu sekolah merespon perubahan dan menetapkan arah maupun sasaran sekolah agar tercapai tujuan dan target yang ditentukan sebelumnya. Menetapkan arah maupun sasaran kelihatannya sesuatu yang sederhana, tetapi jika dirumuskan dalam bentuk program kerja semester, tahunan, dan enam tahunan untuk SD dan tiga tahun untuk SMP dan SMA. Dimana dimulai semenjak anak belajar di sekolah sampai selesai harus ada konsistensi dan penyesuaian.

Sejak tahun beroperasi SMP Negeri 9 Palembang selalu berusaha menjadi sekolah yang berhasil dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Banyak hal yang telah dilakukan untuk mencapai hal tersebut, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Salah satunya dapat dilihat dari pencapaian nilai rata-rata Ujian

Nasional selama tiga tahun berturut-turut yang selalu meningkat serta prestasi yang diraih, baik dibidang akademik maupun non akademik.

SMP Negeri 9 Palembang memiliki sistem yang baik, solid, terpadu, dan manajemen sekolah yang baik. Secara letak SMP Negeri 9 Palembang sangat strategis yang terletak dipusat ibukota kabupaten dan berdiri tepat di depan jalan raya. Sekolah juga menerapkan disiplin yang tinggi terhadap guru dan siswa yang menciptakan keharmonisan antara warga sekolah sehingga memiliki rasa tanggung jawab dan kekeluargaan erat. Selain itu, sekolah juga didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan penerapan *Information Communication Technology* dalam manajemen sekolah.

Berpijak dari kondisi yang ada kiranya perlu pengembangan aspek-aspek pendidikan yang berkesinambungan dan peningkatan bagi sekolah mengingat SMP Negeri 9 Palembang merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Kemudian diharapkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka makalah ini akan membahas tentang analisis SWOT di SMP Negeri 9 Palembang Kotamadya Palembang.

Manajemen Strategik

Manajemen strategik menurut Blocher dan Lin dalam Sagala (2007:128) adalah *the development of a sustainable competitive position in wichh the firm's competitive provides continued success*. Lain halnya menurut Yuwono dan Ikhsan dalam Sagala (2007:128) biasanya dihubungkan dengan pendekatan manajemen yang integratif yang mengedepankan secara bersama-sama seluruh elemen, seperti *planning, implementing, dan controlling* dari strategi bisnis. Dengan kata lain, manajemen strategic meliputi formulasi strategik dan implementasi strategik. Kemeudian Ansof dalam Sagala (2007:129) yang dimaksud manajemen strategic ialah suatu pendekatan yang sistematis bagi suatu tanggung jawab manajemen, mengkondisikan organisasi ke posisi yang dipastikan mencapai tujuan dengan cara yang akan meyakinkan keberhasilan yang berkelanjutan dan membuat sekolah menjamin atau mengamankan format yang mengejutkan. Lebih lanjut dikatakan pendekatan manajemen strategik ini yaitu menganalisis bagian-bagian

yang dinamai dengan “formulasi strategi”. Proses formulasi dengan merumuskan strategi bersama-sama yang diberi nama perencanaan strategik.

Hakikat Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sekolah sebagai suatu institusi atau lembaga pendidikan merupakan sarana melaksanakan pelayanan belajar dan proses pendidikan. Sekolah bukan hanya dijadikan sebagai tempat berkumpul antara guru dan peserta didik, melainkan suatu sistem yang sangat kompleks dan dinamis. Secara lebih mendalam perlu dipahami apa itu sekolah. Menurut Postman dan Weingartner dalam Sagala (2007:70) mengemukakan bahwa sekolah adalah institusi yang spesifik dari seperangkat fungsi-fungsi yang mendasar dalam melayani masyarakat atau *school as institution is the specific set of essential function is serves in our society*. Lalu, Reimer dalam Sagala (2007:70) sekolah adalah lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin guru untuk mempelajari kurikulum yang bertingkat.

Sebagai organisasi, sekolah merupakan suatu sistem terbuka, tidak mengisolasi diri dari lingkungannya, mempunyai hubungan-hubungan dengan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal sekolah dan bekerjasama. Tugas utama sekolah adalah menjalankan proses belajar peserta didik dan meluluskan peserta didik yang berkualitas memenuhi standar yang dipersyaratkan. Sekolah harus dapat dikelola dan diberdayakan yaitu dengan memberikan layanan belajar yang pada akhirnya mengeluarkan mutu lulusan sekolah yang kompetitif.

Manajemen Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Dalam sistem ini Kepala Sekolah bersama dewan guru dan warga sekolah sekolah lainnya secara mandiri, transparan dan bertanggung jawab melaksanakan program sekolah untuk mencapai visi, misi, dan target mutu yang diharapkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

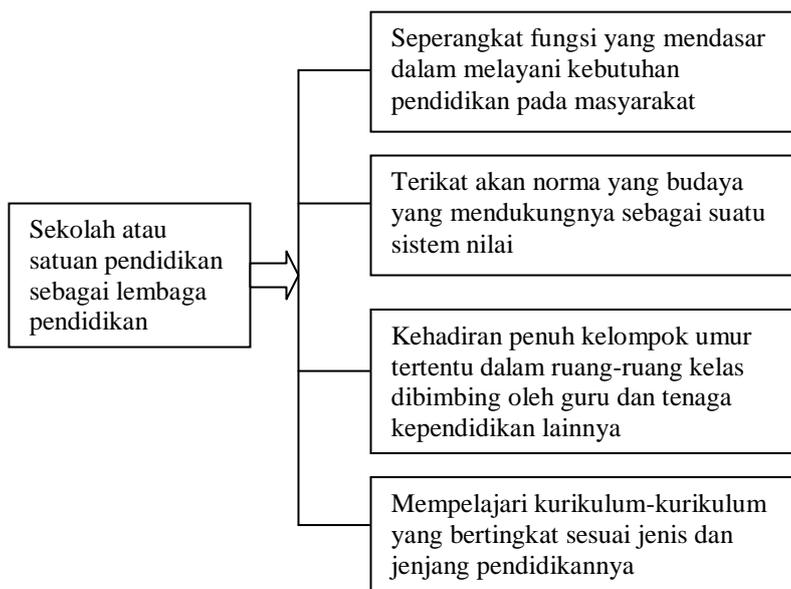
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut setiap sekolah harus :

- (1) merumuskan visi dan misi yang jelas serta terarah sesuai dengan visi dan misi standar mutu pendidikan nasional;

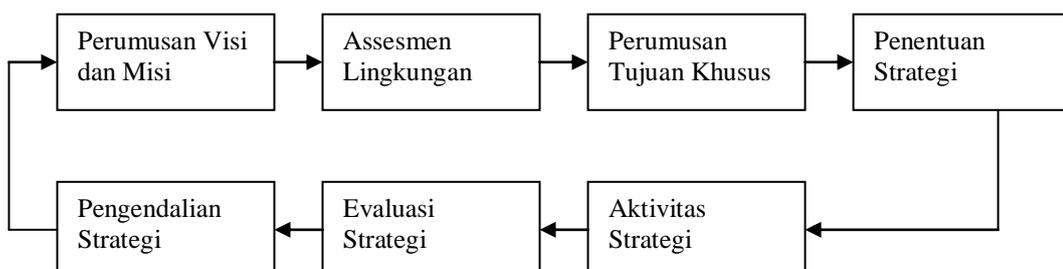
- (2) merencanakan dan melaksanakan program SMP yang telah ditetapkan;
- (3) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- (4) menyusun laporan dan mengevaluasi keberhasilan program;
- (5) merumuskan program baru sebagai kelanjutan program yang telah dilaksanakan sebelumnya;

Kemudian penilaian sekolah dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian kinerja sekolah sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Penilaian sekolah dapat bersifat nasional, lokal, dan sekolah itu sendiri sesuai dengan tujuan dan lingkungannya menurut manajemen berbasis sekolah.

Gambar 1
Sekolah Sebagai Institusi Mencapai Tujuan Instruksional



Gambar 2
Formulasi Strategi



Manajemen Strategi Sekolah, antara lain :

1. Formulasi visi dan misi sekolah
2. Tujuan dan target sekolah
3. Penentuan strategi organisasi sekolah
4. Implementasi strategi organisasi sekolah
5. Analisis SWOT secara cermat dan akurat

Menurut Boseman dkk dalam Sagala (2007:140) ada tujuh tahap proses manajemen strategik, antara lain :

- a. melakukan analisis SWOT secara cermat dan akurat
- b. melakukan formulasi tentang misi organisasi sekolah
- c. melakukan formulasi tentang filosofi dan kebijakan organisasi
- d. menetapkan sasaran strategi organisasi
- e. menetapkan strategi organisasi
- f. melaksanakan strategi organisasi
- g. melakukan kontrol strategi organisasi

Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan dari *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan). Analisis SWOT sudah menjadi alat yang umum digunakan dalam perencanaan strategis pendidikan, namun ia tetap merupakan alat yang efektif dalam menempatkan potensi intitusi. SWOT dapat dibagi ke dalam dua elemen, analisis internal yang berkonsentrasi pada prestasi institusi itu sendiri, dan analisis lingkungan.

Analisis SWOT adalah satu pekerjaan yang cukup berat karena hanya dengan alternatif-alternatif strategik dapat disusun. Kegagalan menganalisisnya berarti gagal dalam mencari relasi dan titik temu antara faktor-faktor strategik dalam lingkungan internal yang terdapat dalam lingkungan eksternal, sambil mencari hubungannya dengan misi, tujuan, dan sasaran organisasi, juga merupakan kegagalan dalam mempersiapkan suatu keputusan strategik yang baik. Hanya dengan analisis SWOT, keputusan-keputusan strategik yang baik dapat dihasilkan.

Menurut Sharplin dalam Sagala (2007:140) memasukkan analisis SWOT untuk melihat kekuatan melihat kekuatan dan kelemahan di dalam sekolah sekaligus memantau peluang dan tantangan yang dihadapi sekolah. Analisis SWOT adalah salah satu tahap dalam manajemen strategik yang merupakan pendekatan analisis lingkungan. Proses penilaian kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan secara umum menunjuk pada dunia bisnis sebagai analisis SWOT. Analisis SWOT menyediakan para pengambil keputusan organisasi akan informasi yang dapat menyiapkan dasar dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Jika keputusan itu diterapkan secara efektif akan memungkinkan sekolah mencapai tujuannya.

Analisis lingkungan adalah studi tentang “kekuatan” dan “kelemahan” sebagai elemen internal, “peluang” dan “tantangan” sebagai elemen eksternal suatu organisasi, masa kini, dan berpotensi diperkirakan akan muncul di masa depan, sebagai data/bahan untuk menetapkan dan menyusun perencanaan strategis organisasi masa depan (Theresia, 2003:118).

Analisis lingkungan terdiri dari dua unsur yaitu analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal (analisis organisasi) berupa potensi internal sekolah. Analisis lingkungan eksternal meliputi identifikasi dan evaluasi aspek-aspek sosial, budaya, politis, ekonomis, dan teknologi serta kecenderungan yang mungkin berpengaruh pada organisasi. Kecenderungan ini biasanya merupakan sejumlah faktor yang sukar diramalkan atau memiliki derajat ketidakpastian tinggi. Hasil dari analisis lingkungan eksternal adalah sejumlah peluang atau *opportunities* yang harus dimanfaatkan oleh organisasi dan ancaman atau *threats* yang harus dicegah atau dihindari. Analisis lingkungan internal terdiri dari penentu persepsi yang realistis atas segala kekuatan atau *strengths* dan kelemahan atau *weaknesses* yang dimiliki organisasi. Suatu organisasi harus mengambil manfaat dari kekuatannya secara optimal dan berusaha untuk mengatasi kelemahannya agar terhindar dari kerugian baik waktu maupun anggaran.

Analisis SWOT dalam penyelenggaraan sekolah dapat membantu pengalokasian sumber daya seperti anggaran, sarana dan prasarana, sumber daya

manusia, fasilitas sekolah, potensi lingkungan, dan sebagainya yang lebih efektif. Analisis SWOT dalam program sekolah dapat dilakukan dengan membuat matrik SWOT. Matrik ini terdiri dari sel-sel daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penyelenggaraan program sekolah. Untuk memperoleh mutu sekolah dapat dilakukan strategi SO (menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang). Strategi WO (memperbaiki kelemahan dan mengambil manfaat dari peluang). Strategi ST (menggunakan kekuatan dan menghindari ancaman). Strategi WT (mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman).

Selanjutnya, Boesman dkk dalam Sagala (2007:140) menyebutkan bahwa :

- 1) *Strengths are internal competencies possessed by the organization in comparison with its competitors.*
- 2) *Weaknesses are attributes of the organization which tend to decrease its competence in comparison with its competitors.*
- 3) *An opportunity, on the other hand, is a combination of circumstances, time, and place which, if accompanied by a certain course of action on the part of the organization, is likely to produce significant benefits.*
- 4) *A threat is a reasonably probable event which, if it were to occur, would produce significant damage to the organization.*

Penjelasan :

- 1) Kekuatan adalah kemampuan internal sebuah organisasi yang memajukan tujuan organisasi dalam sebuah industri yang bersaing;
- 2) Kelemahan adalah kebalikannya, yaitu mereka membatasi penyelesaian tujuan-tujuan organisasi;
- 3) Peluang adalah keadaan, kejadian atau situasi eksternal yang menawarkan perubahan organisasi untuk mencapai atau melampaui tujuannya; dan
- 4) Tantangan atau hambatan adalah lawan dari peluang. Hambatan adalah kekuatan, faktor-faktor atau situasi eksternal yang mungkin secara potensial menciptakan masalah, kerusakan organisasi, atau membahayakan kemampuan untuk mencapai tujuannya.

Dalam memperhatikan lingkungan eksternal sekolah ini diperlukan langkah atau upaya mengumpulkan informasi yang relevan dengan cara-cara yang

sistematis dan melakukan evaluasi dan analisis dan analisis hasil evaluasi. Sehingga dapat digunakan untuk pertimbangan menentukan kebijakan selanjutnya. Analisis SWOT memungkinkan sekolah mengeksplorasi peluang-peluang masa depan ketika melawan tantangan dan persoalan-persoalan, dan melakukan penemuan strategis pada kompetensi dan kekuatan khusus. Keseluruhan proses manajemen strategik secara konseptual menjadi analisis SWOT. Alasannya sebuah SWOT mungkin memberi kesan sebuah perubahan lainnya di dalam mision, tujuan, kebijakan dan strategi sekolah.

Titik Singgung Unsur/Faktor Analisis SWOT

Dengan memanfaatkan perencanaan strategik yang efektif, dapat membantu mencari titik kecocokan antara ketiga elemen penting tersebut. Sehubungan dengan itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab ialah “apakah visi/misi organisasi telah jelas?”. “Apakah visi/misi itu cocok dengan apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama konsumen yang dilayani”. Lalu, “apakah organisasi telah memiliki sumber daya dan kemampuan yang cukup dan memadai untuk melakukan apa yang dibutuhkan tersebut?. Andai kata tidak, bagaimana menyelesaikannya.

Peluang yang tersedia tidak selamanya dapat mendukung visi/misi yang ada. Apabila terdapat titik singgung, sesungguhnya organisasi sudah dapat menciptakan suatu strategi yang sangat menguntungkan dan memuaskan.

Miles dan Snow dalam Theresia (2003:113) mengartikan titik singgung sebagai suatu proses, dan suatu pernyataan yaitu suatu penyelidikan dinamis yang mencoba menyatukan atau memadukan organisasi dengan lingkungannya, dan mengatur sumber daya internal untuk mendukung perpaduan itu. Dalam istilah praktisnya, mekanisme perpaduan yang menjadi basisnya ialah strategi, sedangkan pengaturan internal adalah struktur organisasi dan proses manajemen”. Konsep ini masih bersifat makro karena masih perlu dianalisis lebih jauh, pada titik mana faktor-faktor yang saling menguntungkan dan meringankan itu bertemu satu dengan lain. Titik singgung di sini hendaknya tidak dipahami dalam artian yang sempit, tetapi dalam pengertian kesesuaian dan kecocokan antara faktor-

faktor strategik, yaitu antara faktor eksternal, internal, dan visi/misi organisasi. Konsep titik singgung ini tidak akan pernah sempurna karena terjadinya perubahan-perubahan yang berfluktuasi dalam lingkungan.

Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Palembang

a. Latar Belakang

Sejak tahun beroperasi SMP Negeri 9 Palembang selalu berusaha menjadi sekolah yang berhasil dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Banyak hal yang telah dilakukan untuk mencapai hal tersebut, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Salah satunya dapat dilihat dari pencapaian nilai rata-rata Ujian Nasional selama tiga tahun berturut-turut yang selalu meningkat serta prestasi yang diraih, baik dibidang akademik maupun non akademik.

SMP Negeri 9 Palembang memiliki sistem yang baik, solid, terpadu, dan manajemen sekolah yang baik. Secara letak SMP Negeri 9 Palembang sangat strategis yang terletak dipusat ibukota kabupaten dan berdiri tepat di depan jalan raya. Sekolah juga menerapkan disiplin yang tinggi terhadap guru dan siswa yang menciptakan keharmonisan antara warga sekolah sehingga memiliki rasa tanggung jawab dan kekeluargaan erat. Selain itu, sekolah juga didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan penerapan *Information Communication Technology* dalam manajemen sekolah.

Berpijak dari kondisi yang ada kiranya perlu pengembangan aspek-aspek pendidikan yang berkesinambungan dan peningkatan bagi sekolah mengingat SMP Negeri 9 Palembang merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Kemudian diharapkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

b. Visi, Misi, Tujuan Sekolah

Visi Sekolah

Mengutamakan Imtaq dan Iptek Unggul dalam Mutu.

Dengan indikator sebagai berikut:

1. Unggul dalam prestasi akademik dan non akademik,
2. Terwujudnya proses pembelajaran yang variatif dan inovatif,
3. Terwujudnya administrasi kurikulum yang lengkap, berstandar nasional dan internasional,
4. Terwujudnya komitmen dan kompetensi tenaga penddikan dan kependidikan yang profesional,
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan partisipatif, transparan, dan akuntabel,
6. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan relevan dalam mendukung proses belajar mengajar,
7. Terwujudnya sumber dana yang memadai, memenuhi kegiatan sekolah yang berstandar nasional dan internasional,
8. Terwujudnya sistem penilaian beragam (multiaspek) untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas,
9. Terwujudnya lingkungan sekolah yang kondusif, tertib, bersih, indah, ramah.

Misi Sekolah

1. Membentuk manusia bertaqwa, berdedikasi tiinggi, sehat, cerdas, kreatif, mandiri, cinta lingkungan dan almamater;
2. Mewujudkan peningkatan kualitas kelulusan;
3. Mewujudkan sekolah bertaraf internasional (SBI);
4. Mewujudkan lulusan yang unggul dalam prestasi akademik dan non akademik,
5. Mewujudkan profesionalitas guru dan tata usaha,
6. Mewujudkan peningkatan kompetensi guru dan tata usaha,
7. Mewujudkan proses pembelajaran yang variatif dan inovatif,
8. Mewujudkan Dokumen-1 KTSP,
9. Mewujudkan silabus semua mata pelajaran dan untuk semua jenjang atau kelas,
10. Mewujudkan RPP semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan,

11. Mewujudkan komitmen dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional,
12. Mewujudkan pengelolaan pendidikan partisipatif, transparan, dan akuntabel,
13. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan relevan dalam mendukung proses belajar mengajar,
14. Mewujudkan sumber dana yang memadai, memenuhi kegiatan sekolah yang berstandar nasional dan internasional,
15. Mewujudkan sistem penilaian beragam (multiaspek) untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas,
16. Mewujudkan lingkungan sekolah kondusif, tertib, bersih, indah, ramah,
17. Mewujudkan Akhlak yang terpuji,
18. Mengembangkan cinta terhadap seni budaya,
19. Mewujudkan kemampuan olahraga yang tangguh dan kompetitif,
20. Mewujudkan wiyata mandala yang menikmati belajar siswanya,
21. Mewujudkan kepramukaan yang menjadi suri teladan.

Tujuan Sekolah

Pada tahun pelajaran 2008/2009 sampai dengan tahun pelajaran 2011/2012 diharapkan :

1. Sekolah mampu memiliki lulusan yang unggul dalam prestasi akademik dan non akademik,
2. Sekolah mewujudkan profesionalitas guru dan tata usaha,
3. Sekolah mewujudkan peningkatan kompetensi guru dan tata usaha,
4. Sekolah mampu melaksanakan proses pembelajaran yang variatif dan inovatif,
5. Sekolah mewujudkan komitmen dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Dokumen -1 KTSP,
6. Sekolah mewujudkan silabus semua mata pelajaran dan untuk semua jenjang/tingkatan,

7. Sekolah mewujudkan RPP semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan,
8. Sekolah mewujudkan pengelolaan pendidikan partisipatif, transparan, dan akuntabel,
9. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan relevan dalam mendukung proses belajar mengajar,
10. Sekolah memiliki sumber dana yang memadai, memenuhi kegiatan sekolah yang berstandar nasional dan internasional,
11. Sekolah memiliki sistem penilaian beragam (multiaspek) untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas,
12. Sekolah memiliki lingkungan sekolah yang kondusif, tertib, bersih, indah, ramah,
13. Sekolah mewujudkan akhlak yang terpuji,
14. Sekolah mengembangkan cinta terhadap seni budaya,
15. Sekolah mewujudkan kemampuan olahraga yang tangguh dan kompetitif,
16. Sekolah mewujudkan wiyata mandala yang menikmati belajar siswa,
17. Sekolah mewujudkan kepramukaan yang menjadi suri teladan.

Analisis SWOT SMP Negeri 9 Palembang

1. Analisis Lingkungan Strategis Sekolah

Analisis adalah penelusuran kesempatan atau tantangan atas sumber, analisis juga melibatkan pemecahan suatu keseluruhan ke dalam bagian-bagian untuk mengetahui sifat, fungsi, dan saling hubungan antar bagian tersebut.

Analisis lingkungan adalah proses dengan mana penyusunan strategi memonitor lingkungannya. Faktor-faktor lingkungan yang dimonitor meliputi, lingkungan ekonomi, politik dan pemerintahan, pasar dan persaingan, pemasok dan teknologi, sosial dan geografi.

Penyusunan strategi menganalisis lingkungan sekolah melalui dua kegiatan sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi strategi yang digunakan sekolah saat sekarang dalam hubungannya dengan lingkungan sekolah dengan cara mempertanyakan

tentang dasar anggapan dan prediksi lingkungan yang menjadi dasar strategi saat sekarang.

- b. memprediksi lingkungan masa depan dengan cara mempertanyakan tentang dasar anggapan dan prediksi lingkungan yang akan menjadi dasar strategi masa depan.

Penjelasan mengenai kondisi objektif sekolah di bawah terdapat dalam lampiran. Adapun kondisi objektif SMP Negeri 9 Palembang, sebagai berikut:

- 1) Proses Belajar Mengajar
 - 2) Manajemen
 - 3) Kurikulum
 - 4) Siswa
 - 5) Fungsi Ketenagaan
 - 6) Sarana Perpustakaan
 - 7) Sarana Kantor
 - 8) Sarana Laboratorium
 - 9) Sarana Ekstrakurikuler
 - 10) Pembiayaan
 - 11) Lingkungan Sekolah
 - 12) Hubungan Kerjasama
 - 13) Budaya Sekolah
 - 14) Ketenagaan
 - 15) Keuangan
 - 16) Lingkungan
 - 17) Identifikasi fungsi-fungsi sasaran
 - 18) Tabulasi program-program strategis dan keberhasilan
- Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi masa kini dan semakin kondusifnya kondisi ekonomi dan keamanan perlu di sikapi bersama warga sekolah terutama SMP Negeri 9 Palembang. Hal ini tentu saja mengacu pada upaya membekali pengetahuan, keterampilan, keimanan dan ketakwaan, nilai-

nilai sosial dan moral, berbudaya dan berkepribadian Indonesia untuk memperkokoh rasa kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- SMP Negeri 9 Palembang merupakan sekolah yang terletak sangat strategis di tengah-tengah kota yakni di jalan Rudus Sekip Ujung Palembang yang dapat ditempuh dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, kondisi masyarakat Palembang merupakan masyarakat majemuk ditinjau dari segi ekonomi maupun asal usul daerahnya.
- Lokasi SMP Negeri 9 Palembang yang berdampingan dengan kantor SMP Negeri 10 Palembang. Demikian juga dalam mengikuti perkembangan iptek yang begitu cepat, maka seluruh pengelola sekolah harus secara aktif membina dan membimbing siswanya. Selain itu, masyarakat diharapkan mau berpartisipasi aktif untuk membimbing dan membina siswa-siswi agar berpacu mengikuti perkembangan iptek dan globalisasi begitu cepat.
- Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, perlu persiapan dan penataan yang strategis melalui pendidikan. Berkaitan dengan hal ini pemerintah telah melakukan upaya melalui ditetapkannya UUSPN No 20 Tahun 2003 yang di dalamnya termuat adanya dukungan anggaran sebesar 20% dari APBN untuk pendidikan.
- SMP Negeri 9 Palembang berupaya melaksanakan kebijakan pendidikan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan mutu serta relevansi dan efesiensi pengelolaan pendidikan dalam rangka menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan peningkatan dan setrategi yang terencana, terarah dan berkesinambungan.

2. Analisis Kondisi Pendidikan Sekolah Saat Ini

- SMP Negeri 9 Palembang berdiri tahun 1977 dan beroperasi mulai tahun 1979. Dengan usia yang cukup dewasa ini, maka SMP Negeri 9 Palembang terus berkembang, seiring dengan meningkatnya animo masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini.
- SMP Negeri 9 Palembang dengan langkah perlahan terus membenahi diri untuk maju, agar dapat sejajar dengan sekolah-sekolah yang berada di kota besar. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, SMP Negeri 9 Palembang terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas proses pembelajarannya. Kegiatan KBM ditingkatkan, dengan mengadakan pelajaran tambahan dan remedial, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.
- Hasil dari perbaikan proses pembelajaran tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2007/2008, SMP Negeri 9 Palembang mampu meluluskan siswanya 100%. Bahkan pada pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2007 / 2008 ini, SMP Negeri 9 Palembang mampu meluluskan siswanya 100% dan meraih Predikat Terbaik I tingkat Kabupaten Ogan Ilir dan juga masuk 10 Besar SMP se-Provinsi Sumatera Selatan, dengan Rata-Rata Ujian Nasional = 7,0 dan pada Akreditasi tahun 2006 memperoleh nilai 84,75.
- Kemudian pada tahun ajaran 2007 / 2008 ini, SMP Negeri 9 Palembang terpilih sebagai Peringkat Pertama Sekolah Sehat Kabupaten Ogan Ilir. Pada tahun ajaran ini juga SMP Negeri 9 Palembang sebagai salah satu rintisan Sekolah Standar Nasional tahun 2008 dari Provinsi Sumatera Selatan.
- Tentu prestasi tersebut, tidak lepas dari peran serta semua unsur; orang tua murid, Komite Sekolah, Guru, Pimpinan Sekolah dan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir terus membina sekolah ini.
- Kemudian untuk mempertahankan Prestasi yang telah dicapai tersebut dan juga untuk meningkatkannya, tentu banyak sekali hal-hal yang harus terus dikembangkan, misalnya peningkatan kegiatan KBM dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Melihat kondisi fisik sebagian ruang belajar, yang berdiri sejak tahun 1979 dan belum pernah dilakukan rehabilitasi, maka sudah

sewajarnya pada ruang kelas tersebut dilakukan rehabilitasi/perbaikan. Selain itu juga untuk menambah kenyamanan pada proses KBM, sudah sewajarnya, jika ruang belajar di SMP Negeri 9 Palembang, ditambah sebanyak 3 RKB.

- Untuk memenuhi kekurangan tersebut, pihak sekolah telah berupaya untuk memenuhi sarana dan prasarana tersebut, dengan menggunakan swadaya masyarakat sekolah, dan pada tahun pelajaran 2007 / 2008 ini, direncanakan pihak Komite Sekolah kembali akan memberikan bantuan rutin setiap bulan melalui Dana Komite Setiap Siswa dan juga bantuan awal tahun bagi siswa kelas VII, yang kesemuanya itu akan digunakan untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Negeri 9 Palembang, sesuai dengan Visi Sekolah.

3. Analisis Kondisi Pendidikan Sekolah Masa Datang

- Berpijak pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang dijadikan landasan pengembangan satuan pendidikan. Untuk itu, pendidikan masa yang akan datang harus berupaya mengacu pada SNP. Begitupun bagi Sekolah Standar Nasional perlu mengembangkan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan masa yang akan datang diantaranya mengarah pada pengembangan, berikut:
 - 1) Pengembangan Standar Isi Pendidikan
 - 2) Pengembangan Standar Proses Pendidikan
 - 3) Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan
 - 4) Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 5) Pengembangan Sarana dan Prasarana yang Berstandar
 - 6) Pengembangan Standar Pengelolaan Pendidikan
 - 7) Pengembangan Standar Pembiayaan Pendidikan
 - 8) Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan
- Adapun analisis kegiatan pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di SMP Negeri 9 Palembang untuk satu tahun mendatang antara lain sebagai berikut.

- 1) Peningkatan GSA sebesar 0,25 untuk nilai rata-rata empat pelajaran yang diujinasikan (bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Matematika, IPA) dari nilai rata-rata saat ini sebesar 7,00 dalam rangka pengembangan standar kelulusan,
 - 2) Pengembangan kejuaraan lomba-lomba bidang non akademis melalui bimbingan cakap berbahasa Inggris,
 - 3) Pengembangan Kurikulum satuan pendidikan sesuai dengan SNP,
 - 4) Pengembangan dan Penyusunan sumber belajar dan bahan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran kontekstual,
 - 5) Pengembangan dan inovasi bahan pembelajaran,
 - 6) Peningkatan atau pengembangan sarana pendidikan di sekolah,
 - 7) Peningkatan atau pengembangan kompetensi pendidik dari aspek profesionalitas,
 - 8) Peningkatan atau pengembangan kompetensi pendidik dari aspek kepribadian,
 - 9) Pengembangan dan pembuatan rencana pengembangan sekolah (RPS) tiap tahun,
 - 10) Pemberdayaan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan komite sekolah,
 - 11) Implementasi model penilaian/evaluasi pembelajaran, serta
 - 12) Penciptaan usaha-usaha di sekolah sebagai *income generating activities*.
- c. Identifikasi Tantangan Nyata (Kesenjangan Kondisi) Antara Kondisi Pendidikan Saat Ini Terhadap Kondisi Pendidikan Masa Datang
1. Identifikasi Kesenjangan Kondisi (dengan Analisis SWOT Tingkat Kesiapan Fungsi), dalam hal kajian ini mengulas faktor internal dan eksternal secara menyeluruh dari semua aspek yang menjadi indikatornya.

Faktor-faktor tersebut dapat dilihat secara lengkap pada matrik analisis tingkat fungsi berikut ini:

Matrik Analisis SWOT SMP Negeri 9 Palembang
(Analisis Tingkat Kesiapan Fungsi)

Fungsi dan Faktor	Kriteria Kesiapan	Kondisi Nyata	Tingkat Kesiapan Fungsi	
			SIAP	TIDAK
A. Fungsi proses belajar mengajar 2. Faktor Internal ✓ Penggunaan metode mengajar ✓ Motivasi guru ✓ Motivasi siswa ✓ Hub guru dengan siswa ✓ Penggunaan waktu belajar ✓ Perilaku siswa 3. Faktor Eksternal ✓ Kesiapan siswa menerima pelajaran ✓ Dukungan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar ✓ Lingkungan sosial sekolah ✓ Lingkungan fisik sekolah	✓ Bervariasi ✓ Tinggi ✓ Tinggi ✓ Akrab ✓ Efektif ✓ Disiplin dan tertib ✓ Siswa siap menerima pelajaran dengan efektif ✓ Tinggi ✓ Kondusif ✓ Nyaman.tenang	✓ Kurang bervariasi ✓ Tinggi ✓ Sedang ✓ Akrab ✓ Efektif ✓ Disiplin dan tertib ✓ Sebagian siswa kurang siap ✓ Sedang ✓ Kondusif ✓ Nyaman/tenang	V V V V	V V V V
B. Fungsi pendukung PBM ketenagaan 1. Faktor Internal ✓ Jumlah guru ✓ Kualifikasi guru ✓ Kesesuaian mata pelajaran yang diberikan dengan jurusan ✓ Jumlah beban mengajar 2. Faktor Eksternal ✓ Pengalaman mengajar guru ✓ Kesiapan mengajar ✓ Fasilitas pengembangan diri	✓ Cukup ✓ Sarjana S.1 ✓ 50% sesuai ✓ Rata-rata 18 jam ✓ Rata-rata 15 tahun keatas ✓ 100% siap ✓ Tersedia dan lengkap	✓ Cukup ✓ 50% S.1 ✓ 95% sesuai ✓ Rata-rata 12 jam ✓ 65% 15 tahun keatas ✓ 95% siap ✓ Kurang lengkap	V V V V V	V V V
C. Sarana perpustakaan 1. Faktor Internal ✓ Buku setiap mata pelajaran ✓ Buku penunjang ✓ Jumlah lemari dan rak buku ✓ Ruang perpustakaan	✓ Cukup dan lengkap ✓ Cukup dan lengkap ✓ Cukup ✓ Luas dan bersih	✓ Kurang lengkap ✓ Kurang lengkap ✓ Kurang ✓ Sedang dan bersih	V V	V V V

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelatih ekstrakurikuler 2. Faktor Eksternal ✓ Lingkungan kegiatan ekstra ✓ Dukungan orang tua dalam pengadaan lapangan olahraga ✓ Kesiapan siswa dalam latihan ekstra 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada dan mampu ✓ Nyaman dan tenang ✓ Tinggi ✓ Siswa siap latihan dan berprestasi 	<ul style="list-style-type: none"> kotor ✓ Ada dan mampu ✓ Nyaman dan tenang ✓ Rendah ✓ Rusak, ringan dan kurang 	<ul style="list-style-type: none"> V V V 	<ul style="list-style-type: none"> V
<ul style="list-style-type: none"> F. Sarana mobiler kantor ✓ Meja dan kursi guru ✓ Meja dan kursi TU ✓ Komputer kantor ✓ ATK kantor 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Baik dan cukup ✓ Baik dan cukup ✓ Baik dan cukup ✓ Lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rusak, ringan dan kurang ✓ Sedang dan sangat kurang ✓ kurang ✓ kurang 	<ul style="list-style-type: none"> V V 	<ul style="list-style-type: none"> V V
<ul style="list-style-type: none"> G. Sarana mobiler siswa ✓ Meja dan kursi ✓ Papan tulis 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Baik dan cukup ✓ Baik 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sedang dan kurang ✓ Sedang 	<ul style="list-style-type: none"> V 	<ul style="list-style-type: none"> V

2. Identifikasi Tantangan Nyata (Kesenjangan Kondisi)

- 1) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pendidikan, diupayakan pengelolaan sekolah yang strategis dan sistematis, baik dalam perencanaan, proses/pelaksanaan, pembiayaan, maupun hasil. Untuk itu diperlukan pengelolaan sekolah yang mengarah pada pencapaian standar nasional pendidikan.
- 2) Untuk mewujudkan mutu yang tinggi dan relevansi pendidikan, sekolah perlu penataan dan pengelolaan sumber daya yang ada melalui peningkatan standar isi/kurikulum, standar tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan standar proses, standar sarana-prasarana pendidikan, peningkatan standar kelulusan, peningkatan standar mutu kelembagaan dan manajemen, standar pembiayaan dan standar penilaian dengan inovasi dalam pengembangannya.
- 3) Dalam upaya mewujudkan sekolah yang berkualitas tinggi, selain perlu dukungan internal sekolah sebagaimana tersebut pada poin di atas, juga keterlibatan orang tua, komite sekolah, masyarakat dan pemerintah sebagai dukungan eksternal, secara bersama-sama, bahu membahu, mendorong dan mendukung, serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan sekolah yang kondusif, yaitu terjalinnya hubungan dan komunikasi yang harmonis serta dinamis dalam mensukseskan program sekolah, agar tercapai sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan oleh sekolah.

Tabel 3 Identifikasi Tantangan Nyata (Kesenjangan Kondisi)

No	Kondisi Pendidikan Saat Ini	Kondisi Pendidikan Masa Datang	Besar Tantangan Nyata
1	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Kompetensi Lulusan	
a.	Bidang Akademik:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rata-rata pencapaian KKM semua mapel 7,0 ▪ Rata-rata pencapaian NUN 8,29 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rata-rata pencapaian KKM semua mapel 7,50 ▪ Rata-rata pencapaian NUN 8,50 	<p>0,25</p> <p>0,50</p>
b	Bidang nonakademik:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juara ke-1 vocal group tk kabupaten ▪ Menjadi juara 1 tingkat kabupaten tim bulu tangkis dalam kegiatan Porseni ▪ Juara I tingkat kabupaten tim bola voli dalam kegiatan Porseni ▪ Juara 2 PBB tingkat kabupaten ▪ Juara I Karate tingkat Kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juara ke-4 Vocal Group Tk. Propinsi ▪ Juara ke-4 tk tingkat propinsi bidang bulu tangkis ▪ Juara ke-4 tingkat propinsi bidang bola voli ▪ Juara 1 Gerak Jalan tingkat kabupaten ▪ Juara 4 Karate tingkat Propinsi 	<p>4 tingkat</p> <p>4 tingkat</p> <p>4 tingkat</p> <p>1 tingkat</p> <p>4 tingkat</p>
c	Kelulusan:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase kelulusan UN tahun 2008 100% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase kelulusan UN tahun berikutnya 100% 	0%
d	Melanjutkan studi:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi 100% 	0%
2	Standar Isi	Standar Isi	
a.	Pengembangan kurikulum SMP 1 Indralaya <ul style="list-style-type: none"> ▪ KTSP Standar Nasional belum sempurna dan belum memiliki kurikulum Persiapan SSN ▪ Penerapan KTSP baru memenuhi 40% dari semua mata pelajaran dari kelas VII –kelas IX ▪ Perangkat pembelajaran KTSP baru 40% tersusun secara sistimatis dan terdokumentasikan dari kelas VII – kelas IX 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyempurnaan KTSP dan memiliki Kurikulum SSN ▪ Penerapan KTSP 60 % dilaksanakan di kelas VII - kelas IX pada semua mata pelajaran. ▪ Perangkat pembelajaran tersusun sistematis dan terdokumentasikan 60% dari semua mata pelajaran dari kelas VII – kelas IX. 	<p>Penyempurnaan kurikulum KTSP dan pengadaan kurikulum SSN</p> <p>20 %</p> <p>20%</p>
b.	Pengembangan pemetaan materi KTSP <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengelompokan materi pelajaran yang serumpun sesuai KTSP dilaksanakan berkesinambungan untuk semua mata pelajaran. ▪ Penguasaan guru tentang KTSP dan Kurikulum SSN belum menyeluruh (40%) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya Pemetaan pengelompokan materi pelajaran serumpun sesuai KTSP untuk kelompok mata pelajaran kelas VII – kelas IX ▪ 60% guru menguasai dan melaksanakan KTSP 	<p>Penyempurnaan pemetaan</p> <p>20%</p>
c.	Pengembangan Silabus <ul style="list-style-type: none"> ▪ Guru mata pelajaran 40% telah membuat silabus sesuai KTSP/KBK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 60 % membuat silabus yang memenuhi standar KTSP/KBK nasional 	20%
d.	Pengembangan RPP <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40% guru telah membuat RPP yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guru membuat RPP dan 	20%

No	Kondisi Pendidikan Saat Ini	Kondisi Pendidikan Masa Datang	Besarnya Tantangan Nyata
	berstandar CTL/PAKEM e. Pengembangan sistem penilaian <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguasaan guru tentang sistem penilaian belum menyeluruh 	memenuhi standar nasional 60% <ul style="list-style-type: none"> ▪ 60% guru memahami dan melaksanakan penilaian sesuai dengan standar kurikulum. 	Peningkatan penguasaan guru ttg penilaian
3	Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 % guru berijazah S-2 ▪ 80 % guru berijazah S-1 ▪ 80 % guru mengajar sesuai dengan kualifikasi bidang studinya ▪ Guru dan TU yang dapat mengoperasikan komputer, baru 30% ▪ 30% guru menggunakan media pembelajaran dalam PBM. ▪ Penguasaan bahasa Inggris guru masih rendah (10 %) ▪ Masih rendah guru melakukan penelitian tindakan kelas dalam mengatasi hambatan PBM (10 %) ▪ Kemampuan guru dalam melaksanakan PBM yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan masih perlu ditingkatkan. (40 %) ▪ Wawasan guru tentang pendidikan baik yang berstandar nasional belum merata. ▪ Penguasaan guru tentang penilaian masih belum merata (40 %) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 % guru berijazah S-2 ▪ 90 % guru berijazah S-1 ▪ 90 % guru mengajar sesuai dengan kualifikasi bidang studinya ▪ 50% guru dan TU dapat mengoperasikan komputer ▪ 50 % guru menggunakan media pembelajaran ▪ 30% Guru dan TU dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris ▪ 30% guru melakukan tindakan kelas dalam mengatasi hambatan PBM ▪ Guru melaksanakan PBM secara kreatif (60 %) ▪ Wawasan guru tentang pendidikan baik standar nasional internasional bertambah terus ▪ Penguasaan dan pelaksanaan penilaian terlaksananya (60 %) 	10 % 10 % 10 % 20% 20% 20% 20 % 20 % Peningkatan wawasan guru Peningkatan penguasaan guru ttg penilaian
4	Standar Proses	Standar Proses	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guru yang menyusun prota, promes, dan promig, 70% ▪ Guru yang mengembangkan inovasi pembelajaran masih rendah (40 %) ▪ Pelaksanaan remedial belum terlaksana secara optimal (40 %) ▪ Guru yang melaksanakan program pengayaan baru belum menyeluruh pada semua tingkatan kelas (40 %) ▪ Pembinaan minat dan bakat siswa masih terbatas dan ada beberapa yang belum optimal (40 %) ▪ Pendalaman materi unsur siswa kelas IX masih terlaksana secara konvensional ▪ Sikap mental siswa dalam menghadapi berbagai situasi masih belum merata. ▪ Pengembangan PBM melalui tutor sebaya belum optimal. ▪ Budaya membaca siswa masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guru yang menyusun prota, promes, dan promig 80 % ▪ Guru yang mengembangkan inovasi pembelajaran 60% ▪ Pelaksanaan remedial mencapai 60 % ▪ Guru yang melaksanakan program pengayaan 60 % ▪ Pembinaan minat dan bakat siswa terlaksana (60 %) ▪ Pendalaman materi terlaksana secara optimal dan inovatif ▪ Sikap mental siswa lebih baik dalam menghadapi berbagai situasi ▪ Pelaksanaan tutor sebaya dalam kelompok belajar terlaksana optimal ▪ Budaya membaca siswa terlaksana secara optimal 	10% 20 % 20 % 20 % Peningkatan minat baca Penambahan model pendalaman materi Pembinaan sikap mental yang reguler Optimalisasi tutor sebaya Pengembangan budaya membaca

No	Kondisi Pendidikan Saat Ini	Kondisi Pendidikan Masa Datang	Besarnya Tantangan Nyata
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan disiplin siswa dan budaya bersih masih belum optimal (40 %) ▪ Pembinaan wali kelas belum merata secara optimal. ▪ Pembinaan BK masih belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 60 % siswa memiliki disiplin yang baik dan budaya bersih ▪ Pembinaan wali kelas terlaksana secara optimal ▪ Pembinaan Bimbingan Karier dan Konseling terlaksana secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian disiplin dan kebersihan secara kontinyu (20 %) ▪ Optimalisasi peran wali kelas ▪ Optimalisasi peran guru BP/BK
5	Standar Sarana Prasarana	Standar Sarana Prasarana	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang kepala sekolah: 10 m2 ▪ Ruang wakil KS dan PKS 10 m2 ▪ Ruang kelas : 18 ruang, rombel 18 ▪ Ruang perpustakaan: 14 x 9 m ▪ Ruang Lab. IPA Fisika: 15 x 12 m ▪ Ruang Lab IPA Biologi : 15 x 12 m ▪ Ruang guru: 10 x 12 m ▪ Gudang: 4 x 8 m ▪ Ruang UKS : 4 x 6 m ▪ Ruang Tata Usaha : 4 x 8 m ▪ Ruang Praktik Komputer : 12 x 15 m ▪ Ruang Komite : 2 x 3 m ▪ Ruang ekskul : 6 buah a 2 x 3 m. ▪ Mesjid Sekolah : 12 x 8 m (2 lantai) ▪ WC Siswa : 27 buah a. 2 x 1,5 m ▪ Aula : 8 x 24 m ▪ Lapangan olah raga bola basket perlu diperbaiki ▪ Lapangan Upacara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebutuhan minimal ruangan telah dimiliki namun pemanfaatan dan pemeliharaan yang perlu terus dilaksanakan secara konsisten. ▪ Ruang kelasnya 27, 27 rombel ▪ Tersediannya perpustakaan yang memenuhi SSN, begitupun ruang LAB.IPA ▪ Ruang guru 20 x 12 ▪ Gudang 2 buah ukuran 6 x 8 ▪ Ruang UKS 8 x 9 yang lengkap dengan sarana dan prasana ▪ Ruang tata usaha 9 x 8 meter yang nyaman dan memehuni standar SSN ▪ Ada ruang komite yang memehuni standar ▪ Ada ruang ekskul yang memenuhi standar ▪ WC siswa terdiri dari 15 buah ukuran 2 x 1,5 m ▪ Lapangan olahraga dan upacara yang permanen dan sesuai SSN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya pengadaan, pemanfaatan, dan perawatan sarana/prasarana secara terus menerus
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang Lab. Bahasa: tidak ada ▪ Ruang multi media: tidak ada ▪ Ruang akademik dan pengembangan SIM: tidak ada ▪ Ruang kantin: 2,5 x 18 m ▪ Koperasi sekolah : 4 x 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang Lab. Bahasa: ada dan standar ▪ Ruang multi media: ada dan standar ▪ Ruang akademik dan pengembangan SIM: ada dan standar ▪ Ruang kantin: standar (>10m2) ▪ Koperasi sekolah 4 x 8m 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki R Lab Bahasa (100 %) ▪ Terbangun R multi media (100%) ▪ Terbangun R akademik dan SIM(100 %) ▪ Pemeliharaan kantin standar ▪ Perluasan/ pembangunan koperasi sekolah (100 %)

No	Kondisi Pendidikan Saat Ini	Kondisi Pendidikan Masa Datang	Besarnya Tantangan Nyata
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daya listrik (10000 W) ▪ Komputer Guru: 2 unit ▪ Komputer TU: 4 unit ▪ Komputer perpustakaan: 1 unit ▪ Komputer Lab IPA: blm ada ▪ Jaringan internet: speedy ▪ LAN Komputer ▪ Buku-buku perpustakaan masih terbatas. ▪ Buku paket masih terbatas. ▪ Buku-buku referensi guru masih kurang ▪ Alat-alat olah raga masih perlu ditambah. ▪ Alat peraga tiap mapel masih terbatas ▪ Alat-alat kesenian masih terbatas ▪ Bahan praktik untuk mapel Agama, IPA, Mulok, TIK masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan instalasi yang reguler ▪ Komputer Guru: 5 unit dan 5 buah laptop ▪ Komputer TU: 6 unit ▪ Komputer : 5 unit dgn jaringan internet untuk "Learning Centre" ▪ Komputer Lab IPA: 1 unit dan 1 laptop ▪ Jaringan internet dan LAN dengan pemeliharaan/ maintenance yang reguler ▪ Penambahan buku-buku yang terus menerus ▪ Penambahan buku paket tiap mapel ▪ Penambahan buku referensi guru yang terus menerus ▪ Penambahan alat olah raga yang terus menerus ▪ Penambahan alat peraga untuk tiap mapel ▪ Penambahan alat kesenian, pemeliharaan, dan pemanfaatan yang optimal ▪ Penambahan barang habis pakai bahan praktik yang terus menerus 	<p>Perawatan instalasi listrik yang kontinyu</p> <p>Penambahan laptop 2 unit komputer 4 unit</p> <p>1 komputer, 1 laptop</p> <p>Konsistensi pemeliharaan dan pemanfaatan</p> <p>Konsistensi penambahan buku</p> <p>Rasio Buku paket dan siswa 3 : 1</p> <p>Konsistensi penambahan buku</p> <p>Konsistensi penambahan sarana</p> <p>Penambahan alat</p> <p>Konsistensi penambahan, perawatan, dan pemanfaatan sarana</p>
6	Standar Pembiayaan	Standar Pembiayaan	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standar pembiayaan rata-rata masih rendah (dibawah Rp. 50.000/bulan / anak) ▪ Penggalangan dana dari berbagai sumber masih belum optimal ▪ Peningkatan pengembangan kewirausahaan belum optimal ▪ Kerjasama dengan alumni masih terbatas ▪ Sumber dana 5 jenis: BOS, Rutin, Komite Sekolah, APBD, Grant ▪ Pengelolaan keuangan yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembiayaan memenuhi Standar Nasional (diatas Rp. 150.000/ bulan /anak), rata-rata ▪ Terwujudnya penggalangan dana dari berbagai sumber. ▪ Terwujudnya kewirausahaan sekolah sebagai income generating activities ▪ Terwujudnya kerjasama dengan alumni dalam pengembangan sekolah ▪ Memiliki berbagai sumber dana ▪ Pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat 	<p>70 %</p> <p>Peningkatan penggalangan</p> <p>Mewujudkan kewirausahaan</p> <p>Menjalin kerja sama dengan alumni</p> <p>Penambahan sumber dana</p> <p>Optimalisasi pengelolaan keuangan</p>
7	Standar Pengelolaan	Standar Pengelolaan	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Rencana sekolah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang melalui penyusunan RPS masih belum komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki rencana pengembangan sekolah yang komprehensif 	<p>50%</p>

No	Kondisi Pendidikan Saat Ini	Kondisi Pendidikan Masa Datang	Besarnya Tantangan Nyata
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RAPBS belum optimal dengan berbasis kegiatan. ▪ Administrasi sekolah masih ada beberapa kekurangan ▪ Implementasi SIM berbasis IT masih banyak gangguan ▪ Monitoring dan evaluasi masih belum kontinyu ▪ Pelaksanaan rapat-rapat dinas terlaksana sesuai agenda ▪ Kerjasama dengan komite sekolah berjalan baik ▪ Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak masih belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan RAPBS ▪ Memiliki administrasi sekolah yang lengkap 	40%
8	Pengembangan Standar Penilaian	Pengembangan Standar Penilaian	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan perangkat model penilaian pembelajaran belum efektif baru dilaksanakan 30% ▪ Implementasi model evaluasi pembelajaran: Ulangan harian, tengah semester, akhir semester, kenaikan kelas, 60% ▪ Pengembangan instrumen atau perangkat penilaian untuk berbagai model soal, 25% ▪ Pengembangan pedoman penilaian hasil belajar pada kelompok bidang studi, baru 25%. ▪ Pengembangan penilaian dalam lomba-lomba non akademis dan uji coba dalam mata pelajaran unas untuk peningkatan standar nilai baru 30% terlaksana. ▪ Pengembangan penilaian dengan pihak-pihak yang lain baru 20% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan perangkat model-model penilaian pembelajaran dilaksanakan 50% ▪ Pengembangan penilaian, guru dan sekolah 70 % melaksanakan sistem penilaian sesuai kurikulum atau standar penilaian nasional ▪ Pengembangan instrumen atau perangkat penilaian untuk berbagai model soal, 50 % ▪ Pengembangan pedoman penilaian hasil belajar pada kelompok bidang studi dilaksanakan 50%. ▪ Pengembangan penilaian dalam lomba-lomba non akademis dan uji coba dalam mata pelajaran unas untuk peningkatan standar nilai terlaksana secara optimal 50% ▪ Pengembangan penilaian dengan pihak-pihak yang lain baru 40% 	<p style="text-align: center;">20 %</p> <p style="text-align: center;">10 %</p> <p style="text-align: center;">25%</p> <p style="text-align: center;">25%</p> <p style="text-align: center;">20%</p> <p style="text-align: center;">20 %</p>

3. Identifikasi Peluang

Peluang dalam uraian draf analisis SWOT SMP Negeri 9 Palembang tidak dituliskan secara spesifik. Hanya dapat dirangkum melalui penjelasan analisis tingkat kesiapan fungsi ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk itu dalam penjelasan selanjutnya akan dicoba untuk merumuskan peluang sebagai bagian analisis SWOT di SMP Negeri 9 Palembang. Salah satu adalah kebijakan pemerintah, yang mendukung setiap sekolah yang ingin meningkatkan kualitas proses pembelajaran kearah yang lebih positif. Sebagai contoh SMP Negeri 9 Palembang ingin mengembangkan metode pembelajaran dengan menguasai

pengembangan dokumen KTSP yang oleh pemerintah telah ditetapkan namun oleh setiap guru apat dijabarkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik lingkungan belajar.

Penulisan Analisis SWOT

Penulisan dilakukan dengan mengelompokkan terlebih dahulu mana kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, kemudian meletakkan dalam tabel penguraian, selanjutnya menghitung bobot, rating dan skor bobot, dan kemudian menginterpretasikan hasil tersebut dapatkan digunakan?, sesuai dataukah tidak. Lalu merumuskan visi/misi, namun bila visi/misi telah selesai dirumuskan maka ketika dari hasil analisis visi/misi yang terejawantah dalam tujuan tersebut, boleh dirubah, dengan tidak menngganggu proses analisis SWOT disekolah.

Berikut ini tabel analisis SWOT SMP Negeri 9 Palembang dari uraiannya yang telah ada di SMP Negeri 9 Palembang, sebagai berikut, dalam lampiran berikut dengan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Pemberian Bobot, Rating, dan Skor Bobot

- Kolom 3, bobot diberikan pada masing-masing faktor dengan kriteria
 - teramat penting dengan bobot 1.00, amat tidak penting dengan bobot 0.00
 - dengan syarat jumlah kekuatan dengan kelemahan harus maksimal 1.00 (ini menunjukkan tidak mungkin satu faktor akan bernilai teramat penting/maksimal)
- Pada kolom 4, tentukan rating bagi setiap faktor dengan kriteria
 - untuk faktor kekuatan yang paling menonjol dengan rating 5 dan yang paling tidak menonjol dengan rating 1
 - untuk faktor kelemahan yang paling tidak menonjol dengan rating 5 dan yang paling menonjol dengan rating 1
- Skor bobot diperoleh dengan mengalikan bobot dengan rating
 - untuk faktor kekuatan yang paling menonjol dengan rating 5 dan yang paling tidak menonjol dengan rating 1
- Penilaian analisis dan penentuan hasil analisis adalah dari jumlah skor bobot dengan kriteria :
 - sangat menonjol jumlah skor bobotnya 5

- diatas rata-rat jumlah skor bobotnya 4
- rata-rata jumlah skor bobotnya 3
- dibawah rata-rata jumlah skor bobotnya 2
- paling tidak diperhatikan jumlah skor bobotnya 1

Tabel 4 Kesimpulan Analisis Faktor Internal (AFI)

No	Faktor-Faktor	Bobot	Rating	Skor Bobot	Kesimpulan
1	2	3	4	5	6
Kekuatan (S)					
1.	Motivasi guru dan siswa	0.20	4	0.80	Motivasinya tinggi dengan mampu mengembangkan metode pembelajaran dan siswanya antusias dalam pembelajaran dan ekstrakurikuler.
2.	Fasilitas ruang perpustakaan	0.20	3	0.60	Selain kondusif, kelengkapan buku yang dimanfaatkan siswa tersedia dengan cukup baik.
3.	Hubungan yang baik antara guru dengan guru ataupun guru dengan siswa	0.15	3	0.45	Sangat kondusif baik dalam kegiatan ekstrakurikuler ataupun pembelajaran, terutama dukungan positif siswa
4.	Memiliki orientasi internasional	0.10	2	0.20	SMP Negeri Inderalaya telah menjadi SSN, dengan tujuan selanjutnya menjadi SBI
Kelemahan (W)					
1.	Fasilitas pengembangan diri	0.05	2	0.10	Kemampuan untuk menguasai IPTEK dan IMTAQ sebagai modal pengembangan diri dalam mewujudkan pengembangan sekolah masih dinilai kurang
2.	Infra struktur sekolah	0.10	2	0.20	Syarat SSN adalah infra struktur sekolah harus mengikuti standar nasional, jika orientasi SBI maka standar yang diikuti internasional yang lebih dikenal dengan penilaian ISO, sedangkan SMPN 1 Inderalaya belum mengikuti seleksi ISO.
3.	Kualifikasi guru	0.10	2	0.20	Kualifikasi guru untuk menunjang SBI haruslah dengan syarat S2, tapi ternyata baru mencapai 50% S1.
4.	Posisi keuangan	0.10	3	0.30	Keuangan sekolah haruslah memiliki pendanaan mandiri dengan dukungan semua pihak, baik sekolah, pemerintah dan orang tua, sedangkan keuangan sekolah masih bergantung BOS
Jumlah		1.00		2.85	

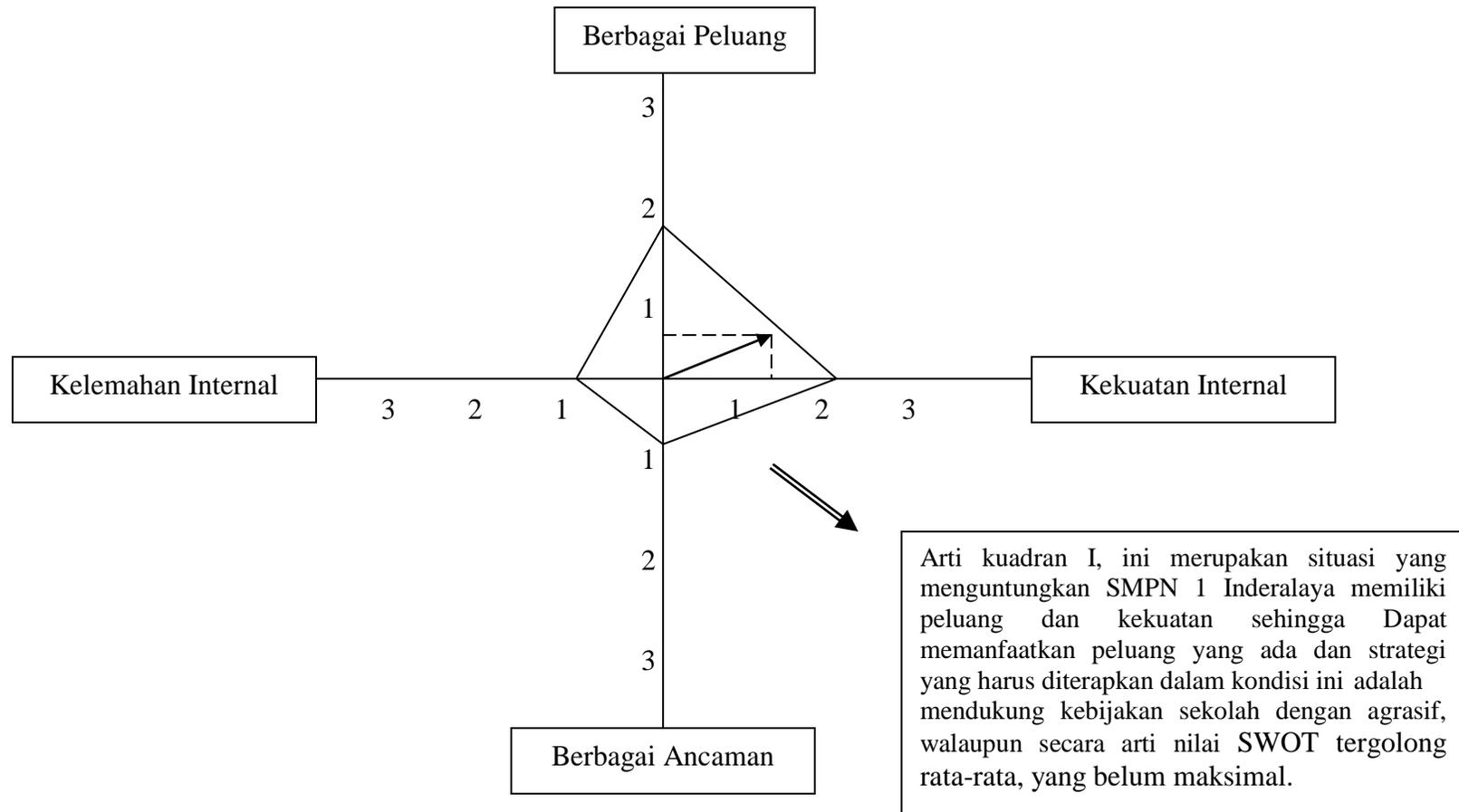
Tabel 5 Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (AFE)

No	Faktor-Faktor	Bobot	Rating	Skor Bobot	Kesimpulan
1	2	3	4	5	6
Peluang (O)					
1.	Kebijakan pemerintah	0.10	3	0.30	Pemerintah melalui UU mengizinkan setiap sekolah untuk meningkatkan kedudukan dengan mengikuti prasyarat yang telah ditentukan dan uji kelayakan
2.	Buku penunjang dan buku referensi	0.20	4	0.80	Karena perputakaan merupakan kekuatan artinya kerjasama pengadaan buku-buku terkait dengan standar SBI (baik buku pelajaran ataupun pengembangan diri)
3.	Pengembangan kurikulum SBI	0.15	3	0.45	Dengan kemerdekaan setiap sekolah menentukan kebijakan sekolahnya untuk itu semua <i>stakeholders</i> dapat mengakomodasi kebijakan pengembangan kurikulum di SMP Negeri 1 Inderalaya
4.	Pembangunan ekonomi di Inderalaya	0.10	2	0.20	Ogan Ilir menjadi salah satu kabupaten dengan master plan KTM (Kota Terpadu Mandiri) dapat membantu perkembangan kemandirian pendidikan disekitarnya
Tantangan (T)					
1.	Meningkatnya persaingan	0.10	2	0.20	Perkembangan kemajuan dan kebijakan pemerintah membuat sekolah berlomba memperbaiki sistemnya, untuk itu seleksi setiap sekolah akan semakin ketat
2.	Dukungan orang tua	0.15	2	0.30	Karena penggalangan partisipasi masyarakat melalui komite sekolah ternyata orang tua hanya 50% yang bersedia, pola pikir yang menilai SMP itu gratis.
3.	Jaringan ke SMP SBI ataupun SMA SBI	0.10	2	0.20	Harus memiliki jaringan baik lokal, regional, nasional, bahkan internasional sekolah yang bertaraf internasional
4.	Sponsor/perusahaan	0.10	2	0.20	Mencari bantuan sponsor guna pengembangan sekolah
Jumlah		1.00		2.65	

Diagram Analisis SWOT
Kesimpulan Analisis Faktor Internal (AFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal(AFE)

AFI = 2.85 dengan (S = 2.05) dan (W = 0.80) jadi (S – W = 2.05 – 0.80 = 1.25)

AFE = 2.65 dengan (O = 1.75) dan (T = 0.90) jadi (O – P = 1.75 – 0.90 = 0.85)



Perumusan Visi/Misi

Secara teori diketahui setelah melakukan analisis SWOT (dengan meninjau faktor internal dan faktor eksternal), maka dapat dirumuskan visi/misi sekolah yang menjadi dasar menentukan tujuan, strategi, kebijakan, program, pendanaan, dan prosedur, serta kinetja, kemudian melakukan evaluasi dan kontrol.

Dari uraian kesimpulan analisis SWOT terhadap SMP Negeri 9 Palembang, maka dapat dirumuskan visi/misi, yang sesuai dengan karakteristik sekolah. Inilah tawaran visi/misi berdasarkan kesimpulan analisis SWOT SMP Negeri 9 Palembang di kotamadya Palembang. .

Visi SMP Negeri 9 Palembang adalah setelah analisis SWOT kesimpulan dari analisis faktor internal dan eksternal “Menjadikan SMP Negeri 9 Palembang RSBI yang Prestasi Siswanya Berlandaskan IPTEK dan IMTAQ tahun 2015”. Dengan indikator sebagai berikut:

1. Unggul dalam prestasi akademik dan non kademik,
2. Unggul dalam proses pembelajaran yang variatif dan inovatif,
3. Unggul dalam keagamaan atau akhlah mulia
4. Unggul dalam perolehan UN dan US (*output*)
5. Unggul dalam memenangkan persaingan SMA Unggulan (*out come*)
6. Unggul dalam lomba olimpiade sains
7. Unggul dalam kreativitas siswa
8. Unggul dalam penguasaan bahasa Inggris
9. Unggul dalam penguasaan IT
10. Unggul dalam administrasi kurikulum yang lengkap, berstandar nasional dan internasional,
11. Unggul dalam komitmen dan kompetensi tenaga penddikan dan kependidikan yang profesional,
12. Unggul dalam pengelolaan pendidikan partisipatif, transparan, dan akuntabel,
13. Unggul dalam sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan relevan dalam mendukung proses belajar mengajar,
14. Unggul dalam sumber dana yang memadai, memenuhi kegiatan sekolah yang berstandar nasional dan internasional,

15. Unggul dalam sistem penilaian beragam (multiaspek) untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas,
16. Unggul dalam lingkungan sekolah yang kondusif, tertib, bersih, indah, ramah.

Misi Sekolah

1. Mewujudkan lulusan yang unggul dalam prestasi akademik dan non akademik,
2. Menerapkan profesionalitas guru dan tata usaha,
3. Mewujudkan peningkatan kompetensi guru dan tata usaha,
4. Mewujudkan proses pembelajaran yang variatif dan inovatif,
5. Mewujudkan Dokumen-1 KTSP,
6. Mewujudkan silabus semua mata pelajaran dan untuk semua jenjang atau kelas,
7. Mewujudkan RPP semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan,
8. Menerapkan komitmen dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional,
9. Menerapkan pengelolaan pendidikan partisipatif, transparan, dan akuntabel,
10. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan relevan dalam mendukung proses belajar mengajar,
11. Mewujudkan sumber dana yang memadai, memenuhi kegiatan sekolah yang berstandar nasional dan internasional,
12. Mewujudkan sistem penilaian beragam (multiaspek) untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas,
13. Mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif, tertib, bersih, indah, ramah,
14. Menerapkan Akhlak yang terpuji,
15. Mengembangkan cinta terhadap seni budaya,
16. Menerapkan kemampuan olahraga yang tangguh dan kompetitif,
17. Mewujudkan wiyata mandala yang menikmati belajar siswanya,
18. Mewujudkan kepramukaan yang menjadi suri teladan.

Tujuan Sekolah

Pada tahun pelajaran 2008/2009 sampai dengan tahun pelajaran 2011/2012 diharapkan :

1. Sekolah mampu memiliki lulusan yang unggul dalam prestasi akademik dan non akademik,
2. Sekolah mewujudkan profesionalitas guru dan tata usaha,
3. Sekolah mewujudkan peningkatan kompetensi guru dan tata usaha,
4. Sekolah mampu melaksanakan proses pembelajaran yang variatif dan inovatif,
5. Sekolah mewujudkan komitmen dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Dokumen -1 KTSP,
6. Sekolah mewujudkan silabus semua mata pelajaran dan untuk semua jenjang/tingkatan,
7. Sekolah mewujudkan RPP semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan,
8. Sekolah mewujudkan pengelolaan pendidikan partisipatif, transparan, dan akuntabel,
9. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan relevan dalam mendukung proses belajar mengajar,
10. Sekolah memiliki sumber dana yang memadai, memenuhi kegiatan sekolah yang berstandar nasional dan internasional,
11. Sekolah memiliki sistem penilaian beragam (multiaspek) untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas,
12. Sekolah memiliki lingkungan sekolah yang kondusif, tertib, bersih, indah, ramah,
13. Sekolah mewujudkan akhlak yang terpuji,
14. Sekolah mengembangkan cinta terhadap seni budaya,

15. Sekolah mewujudkan kemampuan olahraga yang tangguh dan kompetitif,
16. Sekolah mewujudkan wiyata mandala yang menikmati belajar siswa,
17. Sekolah mewujudkan kepramukaan yang menjadi suri teladan.
18. Sekolah menerapkan prinsip-prinsip RSBI.

Berikutnya adalah hasil penelitian berupa rencana strategis untuk SMP Muhammadiyah 1 Palembang yang dibuat.

***RENCANA STRATEGIS SMP MUHAMMADIYAH 1 PALEMBANG
TAHUN PELAJARAN 2009/2010***



**JALAN KH. AHMAD DAHLAN NO.23 B
TELP.(0711)-354139 FAX-(0711)-354139
BUKIT KECIL PALEMBANG**

**DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KOTA PALEMBANG
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

b. Rencana Strategis SMP Muhammadiyah 1 Palembang

RENCANA STRATEGIS SMP MUHAMMADIYAH 1 PALEMBANG

Oleh : Dr. Aisyah, AR. M.Pd. dkk

Pendahuluan

Dalam manajemen strategik pada dunia bisnis dimanfaatkan untuk memprediksi kecenderungan pasar dan peluang-peluang memperoleh keunggulan bersaing. Sementara itu, dalam dunia pendidikan menggunakan konsep strategic untuk lebih mengefektifkan pengalokasian sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuan pendidikan. Menentukan tujuan-tujuan strategik adalah memformulasikan hasil-hasil yang diharapkan dicapai secara menyeluruh selama satu periode. Para pimpinan sekolah dan guru menerjemahkan ke dalam istilah yang spesifik hasil-hasil penyelenggaraan program sekolah serta mencapai tujuan memenuhi misinya. Proses yang berperan penting menentukan tujuan-tujuan strategik dikembangkan oleh berbagai macam konfigurasi kekuatan dari dalam dan luar organisasi, seperti Kepala Sekolah, guru, asosiasi guru, *stakeholders*, peserta didik dan orang tua siswa, suplier kebutuhan sekolah, pemerintah pusat dan provinsi dan sebagainya yang menaruh perhatian terhadap program sekolah.

Pada saat menentukan strategi, baik untuk organisasi yang memiliki arah dan sasaran yang tertulis maupun tidak perlu memperhatikan berbagai hal, termasuk kemampuan SDM dan anggaran. Langkah-langkah formulasi strategik dalam manajemen sekolah tentu dimulai dari penetapan visi dan misi sekolah yang utuh dengan melibatkan masyarakat sekolah dan *stakeholder* sekolah, melakukan *assessment*. Lalu sekolah merespon perubahan dan menetapkan arah maupun sasaran sekolah agar tercapai tujuan dan target yang ditentukan sebelumnya. Menetapkan arah maupun sasaran kelihatannya sesuatu yang sederhana, tetapi jika dirumuskan dalam bentuk program kerja semester, tahunan, dan enam tahunan untuk SD dan tiga tahun untuk SMP dan SMA. Dimana dimulai semenjak anak belajar di sekolah sampai selesai harus ada konsistensi dan penyesuaian.

Sejak tahun beroperasi SMP Muhammadiyah 1 Palembang selalu berusaha menjadi sekolah yang berhasil dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Banyak hal yang telah dilakukan untuk mencapai hal tersebut, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Salah satunya dapat dilihat dari pencapaian nilai rata-rata

Ujian Nasional selama tiga tahun berturut-turut yang selalu meningkat serta prestasi yang diraih, baik dibidang akademik maupun non akademik.

SMP Muhammadiyah 1 Palembang memiliki sistem yang baik, solid, terpadu, dan manajemen sekolah yang baik. Secara letak SMP Muhammadiyah 1 Palembang sangat strategis yang terletak dipusat ibukota kabupaten dan berdiri tepat di depan jalan raya. Sekolah juga menerapkan disiplin yang tinggi terhadap guru dan siswa yang menciptakan keharmonisan antara warga sekolah sehingga memiliki rasa tanggung jawab dan kekeluargaan erat. Selain itu, sekolah juga didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan penerapan *Information Communication Technology* dalam manajemen sekolah.

Berpijak dari kondisi yang ada kiranya perlu pengembangan aspek-aspek pendidikan yang berkesinambungan dan peningkatan bagi sekolah mengingat SMP Muhammadiyah 1 Palembang merupakan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Kemudian diharapkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka makalah ini akan membahas tentang analisis SWOT di SMP Muhammadiyah 1 Palembang Kotamadya Palembang.

Manajemen Strategik

Manajemen strategik menurut Blocher dan Lin dalam Sagala (2007:128) adalah *the development of a sustainable competitive position in wichh the firm's competitive provides continued success*. Lain halnya menurut Yuwono dan Ikhsan dalam Sagala (2007:128) biasanya dihubungkan dengan pendekatan manajemen yang integratif yang mengedepankan secara bersama-sama seluruh elemen, seperti *planning, implementing, dan controlling* dari strategi bisnis. Dengan kata lain, manajemen strategic meliputi formulasi strategik dan implementasi strategik. Kemeudian Ansof dalam Sagala (2007:129) yang dimaksud manajemen strategic ialah suatu pendekatan yang sistematis bagi suatu tanggung jawab manajemen, mengkondisikan organisasi ke posisi yang dipastikan mencapai tujuan dengan cara yang akan meyakinkan keberhasilan yang berkelanjutan dan membuat sekolah menjamin atau mengamankan format yang mengejutkan. Lebih lanjut

dikatakan pendekatan manajemen strategik ini yaitu menganalisis bagian-bagian yang dinamai dengan “formulasi strategi”. Proses formulasi dengan merumuskan strategi bersama-sama yang diberi nama perencanaan strategik.

Hakikat Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Sekolah sebagai suatu institusi atau lembaga pendidikan merupakan sarana melaksanakan pelayanan belajar dan proses pendidikan. Sekolah bukan hanya dijadikan sebagai tempat berkumpul antara guru dan peserta didik, melainkan suatu sistem yang sangat kompleks dan dinamis. Secara lebih mendalam perlu dipahami apa itu sekolah. Menurut Postman dan Weingartner dalam Sagala (2007:70) mengemukakan bahwa sekolah adalah institusi yang spesifik dari seperangkat fungsi-fungsi yang mendasar dalam melayani masyarakat atau *school as institution is the specific set of essential function is serves in our society*. Lalu, Reimer dalam Sagala (2007:70) sekolah adalah lembaga yang menghendaki kehadiran penuh kelompok-kelompok umur tertentu dalam ruang-ruang kelas yang dipimpin guru untuk mempelajari kurikulum yang bertingkat.

Sebagai organisasi, sekolah merupakan suatu sistem terbuka, tidak mengisolasi diri dari lingkungannya, mempunyai hubungan-hubungan dengan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal sekolah dan bekerjasama. Tugas utama sekolah adalah menjalankan proses belajar peserta didik dan meluluskan peserta didik yang berkualitas memenuhi standar yang dipersyaratkan. Sekolah harus dapat dikelola dan diberdayakan yaitu dengan memberikan layanan belajar yang pada akhirnya mengeluarkan mutu lulusan sekolah yang kompetitif.

Manajemen Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Setiap Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerapkan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Dalam sistem ini Kepala Sekolah bersama dewan guru dan warga sekolah sekolah lainnya secara mandiri, transparan dan bertanggung jawab melaksanakan program sekolah untuk mencapai visi, misi, dan target mutu yang diharapkan oleh semua pihak yang berkepentingan.

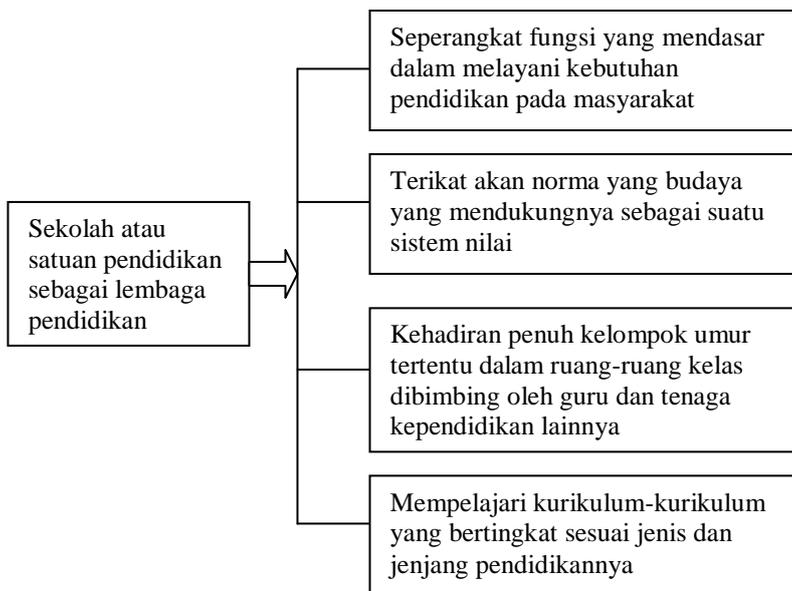
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut setiap sekolah harus :

- (1) merumuskan visi dan misi yang jelas serta terarah sesuai dengan visi dan misi standar mutu pendidikan nasional;

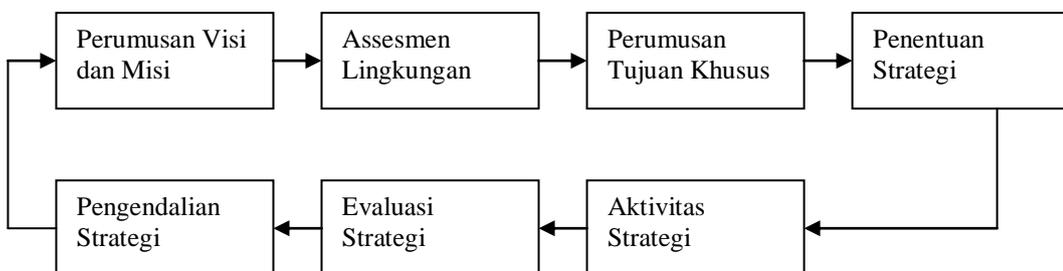
- (2) merencanakan dan melaksanakan program SMP yang telah ditetapkan;
- (3) melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- (4) menyusun laporan dan mengevaluasi keberhasilan program;
- (5) merumuskan program baru sebagai kelanjutan program yang telah dilaksanakan sebelumnya;

Kemudian penilaian sekolah dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, pelaksanaan kurikulum, dan penilaian kinerja sekolah sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Penilaian sekolah dapat bersifat nasional, lokal, dan sekolah itu sendiri sesuai dengan tujuan dan lingkupnya menurut manajemen berbasis sekolah.

Gambar 1
Sekolah Sebagai Institusi Mencapai Tujuan Instruksional



Gambar 2
Formulasi Strategi



Manajemen Strategi Sekolah, antara lain :

1. Formulasi visi dan misi sekolah
2. Tujuan dan target sekolah
3. Penentuan strategi organisasi sekolah
4. Implementasi strategi organisasi sekolah
5. Analisis SWOT secara cermat dan akurat

Menurut Boseman dkk dalam Sagala (2007:140) ada tujuh tahap proses manajemen strategik, antara lain :

- a. melakukan analisis SWOT secara cermat dan akurat
- b. melakukan formulasi tentang misi organisasi sekolah
- c. melakukan formulasi tentang filosofi dan kebijakan organisasi
- d. menetapkan sasaran strategi organisasi
- e. menetapkan strategi organisasi
- f. melaksanakan strategi organisasi
- g. melakukan kontrol strategi organisasi

Analisis SWOT

SWOT adalah singkatan dari *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Tantangan). Analisis SWOT sudah menjadi alat yang umum digunakan dalam perencanaan strategis pendidikan, namun ia tetap merupakan alat yang efektif dalam menempatkan potensi intitusi. SWOT dapat dibagi ke dalam dua elemen, analisis internal yang berkonsentrasi pada prestasi institusi itu sendiri, dan analisis lingkungan.

Analisis SWOT adalah satu pekerjaan yang cukup berat karena hanya dengan alternatif-alternatif strategik dapat disusun. Kegagalan menganalisisnya berarti gagal dalam mencari relasi dan titik temu antara faktor-faktor strategik dalam lingkungan internal yang terdapat dalam lingkungan eksternal, sambil mencari hubungannya dengan misi, tujuan, dan sasaran organisasi, juga merupakan kegagalan dalam mempersiapkan suatu keputusan strategik yang baik. Hanya dengan analisis SWOT, keputusan-keputusan strategik yang baik dapat dihasilkan.

Menurut Sharplin dalam Sagala (2007:140) memasukkan analisis SWOT untuk melihat kekuatan melihat kekuatan dan kelemahan di dalam sekolah sekaligus memantau peluang dan tantangan yang dihadapi sekolah. Analisis SWOT adalah salah satu tahap dalam manajemen strategik yang merupakan pendekatan analisis lingkungan. Proses penilaian kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan secara umum menunjuk pada dunia bisnis sebagai analisis SWOT. Analisis SWOT menyediakan para pengambil keputusan organisasi akan informasi yang dapat menyiapkan dasar dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan tindakan. Jika keputusan itu diterapkan secara efektif akan memungkinkan sekolah mencapai tujuannya.

Analisis lingkungan adalah studi tentang “kekuatan” dan “kelemahan” sebagai elemen internal, “peluang” dan “tantangan” sebagai elemen eksternal suatu organisasi, masa kini, dan berpotensi diperkirakan akan muncul di masa depan, sebagai data/bahan untuk menetapkan dan menyusun perencanaan strategis organisasi masa depan (Theresia, 2003:118).

Analisis lingkungan terdiri dari dua unsur yaitu analisis lingkungan eksternal dan analisis lingkungan internal (analisis organisasi) berupa potensi internal sekolah. Analisis lingkungan eksternal meliputi identifikasi dan evaluasi aspek-aspek sosial, budaya, politis, ekonomis, dan teknologi serta kecenderungan yang mungkin berpengaruh pada organisasi. Kecenderungan ini biasanya merupakan sejumlah faktor yang sukar diramalkan atau memiliki derajat ketidakpastian tinggi. Hasil dari analisis lingkungan ekksternal adalah sejumlah peluang atau *opportunities* yang harus dimanfaatkan oleh organisasi dan ancaman atau *threats* yang harus dicegah atau dihindari. Analisis lingkungan internal terdiri dari penentu persepsi yang realistis atas segala kekuatan atau *strengths* dan kelemahan atau *weaknesses* yang dimiliki organisasi. Suatu organisasi harus mengambil manfaat dari kekuatannya secara optimal dan berusaha untuk mengatasi kelemahannya agar terhindar dari kerugian baik waktu maupun anggaran.

Analisis SWOT dalam penyelenggaraan sekolah dapat membantu pengalokasian sumber daya seperti anggaran, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, fasilitas sekolah, potensi lingkungan, dan sebagainya yang lebih efektif.

Analisis SWOT dalam program sekolah dapat dilakukan dengan membuat matrik SWOT. Matrik ini terdiri dari sel-sel daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penyelenggaraan program sekolah. Untuk memperoleh mutu sekolah dapat dilakukan strategi SO (menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang). Strategi WO (memperbaiki kelemahan dan mengambil manfaat dari peluang). Strategi ST (menggunakan kekuatan dan menghindari ancaman). Strategi WT (mengatasi kelemahan dan menghindari ancaman).

Selanjutnya, Boesman dkk dalam Sagala (2007:140) menyebutkan bahwa :

- 1) *Strengths are internal competencies possessed by the organization in comparison with its competitors.*
- 2) *Weaknesses are attributes of the organization which tend to decrease its competence in comparison with its competitors.*
- 3) *An opportunity, on the other hand, is a combination of circumstances, time, and place which, if accompanied by a certain course of action on the part of the organization, is likely to produce significant benefits.*
- 4) *A threat is a reasonably probable event which, if it were to occur, would produce significant damage to the organization.*

Penjelasan :

- 1) Kekuatan adalah kemampuan internal sebuah organisasi yang memajukan tujuan organisasi dalam sebuah industri yang bersaing;
- 2) Kelemahan adalah kebalikannya, yaitu mereka membatasi penyelesaian tujuan-tujuan organisasi;
- 3) Peluang adalah keadaan, kejadian atau situasi eksternal yang menawarkan perubahan organisasi untuk mencapai atau melampaui tujuannya; dan
- 4) Tantangan atau hambatan adalah lawan dari peluang. Hambatan adalah kekuatan, faktor-faktor atau situasi eksternal yang mungkin secara potensial menciptakan masalah, kerusakan organisasi, atau membahayakan kemampuan untuk mencapai tujuannya.

Dalam memperhatikan lingkungan eksternal sekolah ini diperlukan langkah atau upaya mengumpulkan informasi yang relevan dengan cara-cara yang sistematis dan melakukan evaluasi dan analisis dan analisis hasil evaluasi. Sehingga dapat digunakan untuk pertimbangan menentukan kebijakan

selanjutnya. Analisis SWOT memungkinkan sekolah mengeksplorasi peluang-peluang masa depan ketika melawan tantangan dan persoalan-persoalan, dan melakukan penemuan strategis pada kompetensi dan kekuatan khusus. Keseluruhan proses manajemen strategik secara konseptual menjadi analisis SWOT. Alasannya sebuah SWOT mungkin memberi kesan sebuah perubahan lainnya di dalam mision, tujuan, kebijakan dan strategi sekolah.

Titik Singgung Unsur/Faktor Analisis SWOT

Dengan memanfaatkan perencanaan strategik yang efektif, dapat membantu mencari titik kecocokan antara ketiga elemen penting tersebut. Sehubungan dengan itu pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab ialah “apakah visi/misi organisasi telah jelas?”. “Apakah visi/misi itu cocok dengan apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama konsumen yang dilayani”. Lalu, “apakah organisasi telah memiliki sumber daya dan kemampuan yang cukup dan memadai untuk melakukan apa yang dibutuhkan tersebut?. Andaikata tidak, bagaimana menyelesaikannya.

Peluang yang tersedia tidak selamanya dapat mendukung visi/misi yang ada. Apabila terdapat titik singgung, sesungguhnya organisasi sudah dapat menciptakan suatu strategi yang sangat menguntungkan dan memuaskan.

Miles dan Snow dalam Theresia (2003:113) mengartikan titik singgung sebagai suatu proses, dan suatu pernyataan yaitu suatu penyelidikan dinamis yang mencoba menyatukan atau memadukan organisasi dengan lingkungannya, dan mengatur sumber daya internal untuk mendukung perpaduan itu. Dalam istilah praktisnya, mekanisme perpaduan yang menjadi basisnya ialah strategi, sedangkan pengaturan internal adalah struktur organisasi dan proses manajemen”. Konsep ini masih bersifat makro karena masih perlu dianalisis lebih jauh, pada titik mana faktor-faktor yang saling menguntungkan dan meringankan itu bertemu satu dengan lain. Titik singgung di sini hendaknya tidak dipahami dalam artian yang sempit, tetapi dalam pengertian kesesuaian dan kecocokan antara faktor-faktor strategik, yaitu antara faktor eksternal, internal, dan visi/misi organisasi. Konsep titik singgung ini tidak akan pernah sempurna karena terjadinya perubahan-perubahan yang berfluktuasi dalam lingkungan.

Sekolah Menengah Pertama Muhammadiyah 1 Palembang

a. Latar Belakang

Sejak tahun beroperasi SMP Muhammadiyah 1 Palembang selalu berusaha menjadi sekolah yang berhasil dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Banyak hal yang telah dilakukan untuk mencapai hal tersebut, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Salah satunya dapat dilihat dari pencapaian nilai rata-rata Ujian Nasional selama tiga tahun berturut-turut yang selalu meningkat serta prestasi yang diraih, baik dibidang akademik maupun non akademik.

SMP Muhammadiyah 1 Palembang memiliki sistem yang baik, solid, terpadu, dan manajemen sekolah yang baik. Secara letak SMP Muhammadiyah 1 Palembang sangat strategis yang terletak dipusat ibukota kabupaten dan berdiri tepat di depan jalan raya. Sekolah juga menerapkan disiplin yang tinggi terhadap guru dan siswa yang menciptakan keharmonisan antara warga sekolah sehingga memiliki rasa tanggung jawab dan kekeluargaan erat. Selain itu, sekolah juga didukung oleh kepemimpinan yang kuat dan penerapan *Information Communication Technology* dalam manajemen sekolah.

Berpijak dari kondisi yang ada kiranya perlu pengembangan aspek-aspek pendidikan yang berkesinambungan dan peningkatan bagi sekolah mengingat SMP Muhammadiyah 1 Palembang merupakan sekolah swasta ideal yang akan menjadi sekolah standar nasional (SSN).

b. Visi, Misi, Tujuan Sekolah

Visi Sekolah

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Beriman dan Bertaqwa pada Allah SWT, Menguasai Iptek serta Berakhlaq Mulia.

Dengan indikator sebagai berikut:

1. Unggul dalam prestasi akademik dan non akademik;
2. Terwujudnya proses pembelajaran yang variatif dan inovatif;
3. Terwujudnya administrasi kurikulum yang lengkap, berstandar nasional dan internasional;
4. Terwujudnya komitmen dan kompetensi tenaga penddikan dan kependidikan yang profesional;
5. Terwujudnya pengelolaan pendidikan partisipatif, transparan, dan akuntabel;

6. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan relevan dalam mendukung proses belajar mengajar; dan
7. Terwujudnya sumber dana yang memadai, memenuhi kegiatan sekolah yang berstandar nasional dan internasional.

Misi Sekolah

1. Meningkatkan kemampuan siswa dalam baca tulis Al-qur'an;
2. Menggiatkan pengajian agama Islam, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam sesuai dengan Al-qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW;
3. Meningkatkan disiplin dan kreativitas guru dan siswa dalam proses pembelajaran;
4. Membekali siswa dengan kemampuan dan keterampilan menguasai iptek;
5. Meningkatkan mutu lulusan yang siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tujuan Sekolah

Pada tahun pelajaran 2008/2009 sampai dengan tahun pelajaran 2011/2012 diharapkan :

1. Terciptanya pendidikan yang agamis dan berkualitas;
2. Meningkatnya siswa yang diterima di SMA/SMK Negeri;
3. Sekolah mewujudkan profesionalitas guru dan tata usaha,
4. Sekolah mewujudkan peningkatan kompetensi guru dan tata usaha,
5. Sekolah mampu melaksanakan proses pembelajaran yang variatif dan inovatif;
6. Sekolah mewujudkan komitmen dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Dokumen -1 KTSP;
7. Sekolah mewujudkan silabus semua mata pelajaran dan untuk semua jenjang/tingkatan;
8. Sekolah mewujudkan RPP semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan; serta
9. Sekolah mewujudkan pengelolaan pendidikan partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Analisis SWOT SMP Muhammadiyah 1 Palembang

1. Analisis Lingkungan Strategis Sekolah

Analisis adalah penelusuran kesempatan atau tantangan atas sumber, analisis juga melibatkan pemecahan suatu keseluruhan ke dalam bagian-bagian untuk mengetahui sifat, fungsi, dan saling hubungan antar bagian tersebut.

Analisis lingkungan adalah proses dengan mana penyusunan strategi memonitor lingkungannya. Faktor-faktor lingkungan yang dimonitor meliputi, lingkungan ekonomi, politik dan pemerintahan, pasar dan persaingan, pemasok dan teknologi, sosial dan geografi.

Penyusunan strategi menganalisis lingkungan sekolah melalui dua kegiatan sebagai berikut:

- a. mengidentifikasi strategi yang digunakan sekolah saat sekarang dalam hubungannya dengan lingkungan sekolah dengan cara mempertanyakan tentang dasar anggapan dan prediksi lingkungan yang menjadi dasar strategi saat sekarang.
- b. memprediksi lingkungan masa depan dengan cara mempertanyakan tentang dasar anggapan dan prediksi lingkungan yang akan menjadi dasar strategi masa depan.

Penjelasan mengenai kondisi objektif sekolah di bawah terdapat dalam lampiran. Adapun kondisi objektif SMP Muhammadiyah 1 Palembang, sebagai berikut:

- 1) Proses Belajar Mengajar
- 2) Manajemen
- 3) Kurikulum
- 4) Siswa
- 5) Fungsi Ketenagaan
- 6) Sarana Perpustakaan
- 7) Sarana Kantor
- 8) Sarana Laboratorium
- 9) Sarana Ekstrakurikuler
- 10) Pembiayaan
- 11) Lingkungan Sekolah

- 12) Hubungan Kerjasama
- 13) Budaya Sekolah
- 14) Ketenagaan
- 15) Keuangan
- 16) Lingkungan
- 17) Identifikasi fungsi-fungsi sasaran
- 18) Tabulasi program-program strategis dan keberhasilan

- Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi masa kini dan semakin kondusifnya kondisi ekonomi dan keamanan perlu di sikapi bersama warga sekolah terutama SMP Muhammadiyah 1 Palembang. Hal ini tentu saja mengacu pada upaya membekali pengetahuan, keterampilan, keimanan dan ketakwaan, nilai-nilai sosial dan moral, berbudaya dan berkepribadian Indonesia untuk memperkokoh rasa kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- SMP Muhammadiyah 1 Palembang merupakan sekolah yang terletak di jalan lintas Sumatera antara Palembang-Ogan Ilir serta sebagai pintu gerbang utama untuk memasuki Kabupaten Ogan Ilir. Jarak tempuh dari ibukota provinsi Sumatera Selatan hanya 1 jam perjalanan darat dan jarak ke Bandara Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hanya 1,5 jam. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat dan perkembangan sekolah ke depan.
- Selanjutnya, kondisi masyarakat Indralaya merupakan masyarakat majemuk ditinjau dari segi ekonomi maupun asal usul daerahnya. Ditinjau dari kelas ekonomi 40% kelas menengah ke atas, 30% kelas menengah, dan 30% kelas menengah ke bawah. Sementara ditinjau dari asal usul daerahnya, siswa-siswi SMP Muhammadiyah 1 Palembang 60% penduduk setempat dan 40% merupakan pendatang yang berasal dari Palembang, kabupaten-kabupaten sekitarnya dan daerah lainnya. Lalu, asal usul guru yang mengajar di SMP Muhammadiyah 1 Palembang dan pegawai 70% adalah setempat, 30% berasal dari luar daerah.

- Lokasi SMP Muhammadiyah 1 Palembang yang berdampingan dengan kantor Polsek Indralaya dan kantor Koramil. Sehingga dari segi keamanan sekolah cukup kondusif. Kemudian, sekolah ini sangat rentan terhadap berbagai macam-macam perubahan, baik budaya, iptek maupun perubahan yang berasal dari kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Untuk itu sekolah harus mampu bertindak sebagai filter yang mampu menjaring. Kemudian menyampaikan apa yang patut dicontoh dan apa yang tidak boleh dicontoh. Demikian juga dalam mengikuti perkembangan iptek yang begitu cepat, maka seluruh pengelola sekolah harus secara aktif membina dan membimbing siswanya. Selain itu, masyarakat diharapkan mau berpartisipasi aktif untuk membimbing dan membina siswa-siswi agar berpacu mengikuti perkembangan iptek dan globalisasi begitu cepat.
- Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, cerdas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, perlu persiapan dan penataan yang strategis melalui pendidikan. Berkaitan dengan hal ini pemerintah telah melakukan upaya melalui ditetapkannya UUSPN No 20 Tahun 2003 yang di dalamnya termuat adanya dukungan anggaran sebesar 20% dari APBN untuk pendidikan.
- SMP Muhammadiyah 1 Palembang berupaya melaksanakan kebijakan pendidikan berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Hal itu dimasukkan untuk meningkatkan mutu serta relevansi dan efisiensi pengelolaan pendidikan dalam rangka menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan peningkatan dan strategi yang terencana, terarah dan berkesinambungan.

2. Analisis Kondisi Pendidikan Sekolah Saat Ini

- SMP Muhammadiyah 1 Palembang berdiri tahun 1977 dan beroperasi mulai tahun 1979. Dengan usia yang cukup dewasa ini, maka SMP Muhammadiyah 1 Palembang terus berkembang, seiring dengan meningkatnya animo masyarakat sekitar untuk menyekolahkan anaknya di sekolah ini.
- SMP Muhammadiyah 1 Palembang dengan langkah perlahan terus membenahi diri untuk maju, agar dapat sejajar dengan sekolah-sekolah yang berada di kota besar. Maka untuk mewujudkan hal tersebut, SMP Muhammadiyah 1 Palembang terus berbenah diri untuk meningkatkan kualitas proses pembelajarannya. Kegiatan KBM ditingkatkan, dengan mengadakan pelajaran tambahan dan remedial, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler.
- Hasil dari perbaikan proses pembelajaran tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan Ujian Nasional Tahun 2007/2008, SMP Muhammadiyah 1 Palembang mampu meluluskan siswanya 100%. Bahkan pada pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2007 / 2008 ini, SMP Muhammadiyah 1 Palembang mampu meluluskan siswanya 100% dan meraih Predikat Terbaik I tingkat Kabupaten Ogan Ilir dan juga masuk 10 Besar SMP se-Provinsi Sumatera Selatan, dengan Rata-Rata Ujian Nasional = 7,0 dan pada Akreditasi tahun 2006 memperoleh nilai 84,75.
- Kemudian pada tahun ajaran 2007 / 2008 ini, SMP Negeri 9 Palembang terpilih sebagai Peringkat Pertama Sekolah Sehat Kabupaten Ogan Ilir. Pada tahun ajaran ini juga SMP Muhammadiyah 1 Palembang sebagai salah satu rintisan Sekolah Standar Nasional tahun 2008 dari Provinsi Sumatera Selatan.
- Tentu prestasi tersebut, tidak lepas dari peran serta semua unsur; orang tua murid, Komite Sekolah, Guru, Pimpinan Sekolah dan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir terus membina sekolah ini.
- Kemudian untuk mempertahankan Prestasi yang telah dicapai tersebut dan juga untuk meningkatkannya, tentu banyak sekali hal-hal yang harus terus dikembangkan, misalnya peningkatan kegiatan KBM dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Melihat kondisi fisik sebagian ruang belajar, yang berdiri sejak tahun 1979 dan belum pernah dilakukan rehabilitasi, maka sudah

sewajarnya pada ruang kelas tersebut dilakukan rehabilitasi/perbaikan. Selain itu juga untuk menambah kenyamanan pada proses KBM, sudah sewajarnya, jika ruang belajar di SMP Muhammadiyah 1 Palembang, ditambah sebanyak 3 RKB.

- Untuk memenuhi kekurangan tersebut, pihak sekolah telah berupaya untuk memenuhi sarana dan prasarana tersebut, dengan menggunakan swadaya masyarakat sekolah, dan pada tahun pelajaran 2007 / 2008 ini, direncanakan pihak Komite Sekolah kembali akan memberikan bantuan rutin setiap bulan melalui Dana Komite Setiap Siswa dan juga bantuan awal tahun bagi siswa kelas VII, yang kesemuanya itu akan digunakan untuk Peningkatan Mutu Pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Palembang, sesuai dengan Visi Sekolah.

3. Analisis Kondisi Pendidikan Sekolah Masa Datang

- Berpijak pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang dijadikan landasan pengembangan satuan pendidikan. Untuk itu, pendidikan masa yang akan datang harus berupaya mengacu pada SNP. Begitupun bagi Sekolah Standar Nasional perlu mengembangkan pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, pendidikan masa yang akan datang diantaranya mengarah pada pengembangan, berikut:
 - 9) Pengembangan Standar Isi Pendidikan
 - 10) Pengembangan Standar Proses Pendidikan
 - 11) Pengembangan Standar Kompetensi Lulusan
 - 12) Pengembangan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - 13) Pengembangan Sarana dan Prasarana yang Berstandar
 - 14) Pengembangan Standar Pengelolaan Pendidikan
 - 15) Pengembangan Standar Pembiayaan Pendidikan
 - 16) Pengembangan Standar Penilaian Pendidikan

- Adapun analisis kegiatan pendidikan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Palembang untuk satu tahun mendatang antara lain sebagai berikut.
 - 1) Peningkatan GSA sebesar 0,25 untuk nilai rata-rata empat pelajaran yang diujinasikan (bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Matematika, IPA) dari nilai rata-rata saat ini sebesar 7,00 dalam rangka pengembangan standar kelulusan,
 - 2) Pengembangan kejuaraan lomba-lomba bidang non akademis melalui bimbingan cakap berbahasa Inggris,
 - 3) Pengembangan Kurikulum satuan pendidikan sesuai dengan SNP,
 - 4) Pengembangan dan Penyusunan sumber belajar dan bahan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran kontekstual,
 - 5) Pengembangan dan inovasi bahan pembelajaran,
 - 6) Peningkatan atau pengembangan sarana pendidikan di sekolah,
 - 7) Peningkatan atau pengembangan kompetensi pendidik dari aspek profesionalitas,
 - 8) Peningkatan atau pengembangan kompetensi pendidik dari aspek kepribadian,
 - 9) Pengembangan dan pembuatan rencana pengembangan sekolah (RPS) tiap tahun,
 - 10) Pemberdayaan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan komite sekolah,
 - 11) Implementasi model penilaian/evaluasi pembelajaran, serta
 - 12) Penciptaan usaha-usaha di sekolah sebagai *income generating activities*.

- c. Identifikasi Tantangan Nyata (Kesenjangan Kondisi) Antara Kondisi Pendidikan Saat Ini Terhadap Kondisi Pendidikan Masa Datang
 1. Identifikasi Kesenjangan Kondisi (dengan Analisis SWOT Tingkat Kesiapan Fungsi), dalam hal kajian ini mengulas faktor internal dan eksternal secara menyeluruh dari semua aspek yang menjadi indikatornya. Faktor-faktor tersebut dapat dilihat secara lengkap pada matrik analisis tingkat fungsi berikut ini:

**Matrik Analisis SWOT SMP Muhammadiyah 1 Palembang
(Analisis Tingkat Kesiapan Fungsi)**

Fungsi dan Faktor	Kriteria Kesiapan	Kondisi Nyata	Tingkat Kesiapan Fungsi	
			SIAP	TIDAK
A. Fungsi proses belajar mengajar 2. Faktor Internal ✓ Penggunaan metode mengajar ✓ Motivasi guru ✓ Motivasi siswa ✓ Hub guru dengan siswa ✓ Penggunaan waktu belajar ✓ Perilaku siswa 3. Faktor Eksternal ✓ Kesiapan siswa menerima pelajaran ✓ Dukungan orang tua dalam meningkatkan motivasi belajar ✓ Lingkungan sosial sekolah ✓ Lingkungan fisik sekolah	✓ Bervariasi ✓ Tinggi ✓ Tinggi ✓ Akrab ✓ Efektif ✓ Disiplin dan tertib ✓ Siswa siap menerima pelajaran dengan efektif ✓ Tinggi ✓ Kondusif ✓ Nyaman.tenang	✓ Kurang bervariasi ✓ Tinggi ✓ Sedang ✓ Akrab ✓ Efektif ✓ Disiplin dan tertib ✓ Sebagian siswa kurang siap ✓ Sedang ✓ Kondusif ✓ Nyaman/tenang	V V V V	V V V V V
B. Fungsi pendukung PBM ketenagaan 1. Faktor Internal ✓ Jumlah guru ✓ Kualifikasi guru ✓ Kesesuaian mata pelajaran yang diberikan dengan jurusan ✓ Jumlah beban mengajar 2. Faktor Eksternal ✓ Pengalaman mengajar guru ✓ Kesiapan mengajar ✓ Fasilitas pengembangan diri	✓ Cukup ✓ Sarjana S.1 ✓ 50% sesuai ✓ Rata-rata 18 jam ✓ Rata-rata 15 tahun keatas ✓ 100% siap ✓ Tersedia dan lengkap	✓ Cukup ✓ 50% S.1 ✓ 95% sesuai ✓ Rata-rata 12 jam ✓ 65% 15 tahun keatas ✓ 95% siap ✓ Kurang lengkap	V V V V V	V V V
C. Sarana perpustakaan 1. Faktor Internal ✓ Buku setiap mata pelajaran ✓ Buku penunjang ✓ Jumlah lemari dan rak buku ✓ Ruang perpustakaan	✓ Cukup dan lengkap ✓ Cukup dan lengkap ✓ Cukup ✓ Luas dan bersih	✓ Kurang lengkap ✓ Kurang lengkap ✓ Kurang ✓ Sedang dan bersih	V V	V V V

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengelola perpustakaan ✓ Dana pengembangan 2. Faktor Eksternal ✓ Dukungan orang tua dalam melengkapi buku ✓ Kerjasama dengan perpustakaan lain yang lengkap ✓ Kesesuaian buku penunjang dengan potensi daerah dan pengembangan IPTEK dan IMTAQ 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada dan mampu ✓ Tersendiri dan cukup ✓ Sangat mendukung ✓ Ada kerjasama ✓ Tingkat kesesuaian tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada dan mampu ✓ Tidak ada ✓ Kurang mendukung ✓ Belum ✓ Tingkat kesesuaiannya tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> V V 	<ul style="list-style-type: none"> V V V
<p>D. Sarana laboratorium</p> <p>1. Faktor Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Alat-alat praktik ✓ Bahan-bahan praktik ✓ Fasilitas ruang ✓ Pembina laboratorium <p>2. Faktor Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Lingkungan laboratorium ✓ Dukungan orang tua dalam pengembangan labor dan biaya praktik ✓ Kesiapan siswa dalam praktik di laboratorium 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada dan lengkap ✓ Tersedia ✓ Lengkap dan bersih ✓ Ada dan mampu ✓ Nyaman dan tenang ✓ Tinggi ✓ Siswa siap menerima pembelajaran dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada, kurang lengkap ✓ Sangat kurang ✓ Kurang dan bersih ✓ Ada dan mampu ✓ Nyaman dan tenang ✓ Rendah ✓ Siswa siap menerima pembelajaran dengan baik 	<ul style="list-style-type: none"> V V V V V V 	<ul style="list-style-type: none"> V V
<p>E. Sarana Ekstrakurikuler</p> <p>1. Faktor Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Alat-alat olahraga ✓ Alat-alat kesenian ✓ Fasilitas lapangan ✓ Fasilitas ruang 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada dan lengkap ✓ Ada dan lengkap ✓ Ada dan lengkap ✓ Lengkap dan bersih 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada, kurang lengkap ✓ Ada, ranga lengkap ✓ Ada, kurang lengkap ✓ Kurang lengkap, 	<ul style="list-style-type: none"> V V V 	<ul style="list-style-type: none"> V

<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pelatih ekstrakurikuler 2. Faktor Eksternal ✓ Lingkungan kegiatan ekstra ✓ Dukungan orang tua dalam pengadaan lapangan olahraga ✓ Kesiapan siswa dalam latihan ekstra 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ada dan mampu ✓ Nyaman dan tenang ✓ Tinggi ✓ Siswa siap latihan dan berprestasi 	<ul style="list-style-type: none"> kotor ✓ Ada dan mampu ✓ Nyaman dan tenang ✓ Rendah ✓ Rusak, ringan dan kurang 	<ul style="list-style-type: none"> V V V 	<ul style="list-style-type: none"> V
<ul style="list-style-type: none"> F. Sarana mobiler kantor ✓ Meja dan kursi guru ✓ Meja dan kursi TU ✓ Komputer kantor ✓ ATK kantor 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Baik dan cukup ✓ Baik dan cukup ✓ Baik dan cukup ✓ Lengkap 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rusak, ringan dan kurang ✓ Sedang dan sangat kurang ✓ kurang ✓ kurang 	<ul style="list-style-type: none"> V V 	<ul style="list-style-type: none"> V V
<ul style="list-style-type: none"> G. Sarana mobiler siswa ✓ Meja dan kursi ✓ Papan tulis 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Baik dan cukup ✓ Baik 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sedang dan kurang ✓ sedang 	<ul style="list-style-type: none"> V 	<ul style="list-style-type: none"> V

4. Identifikasi Tantangan Nyata (Kesenjangan Kondisi)

- 4) Untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam pendidikan, diupayakan pengelolaan sekolah yang strategis dan sistematis, baik dalam perencanaan, proses/pelaksanaan, pembiayaan, maupun hasil. Untuk itu diperlukan pengelolaan sekolah yang mengarah pada pencapaian standar nasional pendidikan.
- 5) Untuk mewujudkan mutu yang tinggi dan relevansi pendidikan, sekolah perlu penataan dan pengelolaan sumber daya yang ada melalui peningkatan standar isi/kurikulum, standar tenaga pendidik dan kependidikan, peningkatan standar proses, standar sarana-prasarana pendidikan, peningkatan standar kelulusan, peningkatan standar mutu kelembagaan dan manajemen, standar pembiayaan dan standar penilaian dengan inovasi dalam pengembangannya.
- 6) Dalam upaya mewujudkan sekolah yang berkualitas tinggi, selain perlu dukungan internal sekolah sebagaimana tersebut pada poin di atas, juga keterlibatan orang tua, komite sekolah, masyarakat dan pemerintah sebagai dukungan eksternal, secara bersama-sama, bahu membahu, mendorong dan mendukung, serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan sekolah yang kondusif, yaitu terjalinnya hubungan dan komunikasi yang harmonis serta dinamis dalam mensukseskan program sekolah, agar tercapai sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan oleh sekolah.

Tabel Identifikasi Tantangan Nyata (Kesenjangan Kondisi)

No	Kondisi Pendidikan Saat Ini	Kondisi Pendidikan Masa Datang	Besar Tantangan Nyata
1	Standar Kompetensi Lulusan	Standar Kompetensi Lulusan	
a.	Bidang Akademik:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rata-rata pencapaian KKM semua mapel 7,0 ▪ Rata-rata pencapaian NUN 8,29 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rata-rata pencapaian KKM semua mapel 7,50 ▪ Rata-rata pencapaian NUN 8,50 	<p>0,25</p> <p>0,50</p>
b	Bidang nonakademik:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juara ke-1 vocal group tk kabupaten ▪ Menjadi juara 1 tingkat kabupaten tim bulu tangkis dalam kegiatan Porseni ▪ Juara I tingkat kabupaten tim bola voli dalam kegiatan Porseni ▪ Juara 2 PBB tingkat kabupaten ▪ Juara I Karate tingkat Kabupaten. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Juara ke-4 Vocal Group Tk. Propinsi ▪ Juara ke-4 tk tingkat propinsi bidang bulu tangkis ▪ Juara ke-4 tingkat propinsi bidang bola voli ▪ Juara 1 Gerak Jalan tingkat kabupaten ▪ Juara 4 Karate tingkat Propinsi 	<p>4 tingkat</p> <p>4 tingkat</p> <p>4 tingkat</p> <p>1 tingkat</p> <p>4 tingkat</p>
c	Kelulusan:		
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase kelulusan UN tahun 2008 100% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Persentase kelulusan UN tahun berikutnya 100% 	0%
d	Melanjutkan studi:		
	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lulusan yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi 100% 	0%
2	Standar Isi	Standar Isi	
f.	<p>Pengembangan kurikulum SMP 1 Indralaya</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ KTSP Standar Nasional belum sempurna dan belum memiliki kurikulum Persiapan SSN ▪ Penerapan KTSP baru memenuhi 40% dari semua mata pelajaran dari kelas VII – kelas IX ▪ Perangkat pembelajaran KTSP baru 40% tersusun secara sistimatis dan terdokumentasikan dari kelas VII – kelas IX 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyempurnaan KTSP dan memiliki Kurikulum SSN ▪ Penerapan KTSP 60 % dilaksanakan di kelas VII - kelas IX pada semua mata pelajaran. ▪ Perangkat pembelajaran tersusun sistematis dan terdokumentasikan 60% dari semua mata pelajaran dari kelas VII – kelas IX. 	<p>Penyempurnaan kurikulum KTSP dan pengadaan kurikulum SSN</p> <p>20 %</p> <p>20%</p>
g.	<p>Pengembangan pemetaan materi KTSP</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program pengelompokan materi pelajaran yang serumpun sesuai KTSP dilaksanakan berkesinambungan untuk semua mata pelajaran. ▪ Penguasaan guru tentang KTSP dan Kurikulum SSN belum menyeluruh (40%) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terwujudnya Pemetaan pengelompokan materi pelajaran serumpun sesuai KTSP untuk kelompok mata pelajaran kelas VII – kelas IX ▪ 60% guru menguasai dan melaksanakan KTSP 	<p>Penyempurnaan pemetaan</p> <p>20%</p>
h.	<p>Pengembangan Silabus</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Guru mata pelajaran 40% telah membuat silabus sesuai KTSP/KBK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 60 % membuat silabus yang memenuhi standar KTSP/KBK nasional 	20%
i.	<p>Pengembangan RPP</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40% guru telah membuat RPP yang 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guru membuat RPP dan 	20%

No	Kondisi Pendidikan Saat Ini	Kondisi Pendidikan Masa Datang	Besarnya Tantangan Nyata
	berstandar CTL/PAKEM j. Pengembangan sistem penilaian <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguasaan guru tentang sistem penilaian belum menyeluruh 	memenuhi standar nasional 60% <ul style="list-style-type: none"> ▪ 60% guru memahami dan melaksanakan penilaian sesuai dengan standar kurikulum. 	Peningkatan penguasaan guru ttg penilaian
3	Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 % guru berijazah S-2 ▪ 80 % guru berijazah S-1 ▪ 80 % guru mengajar sesuai dengan kualifikasi bidang studinya ▪ Guru dan TU yang dapat mengoperasikan komputer, baru 30% ▪ 30% guru menggunakan media pembelajaran dalam PBM. ▪ Penguasaan bahasa inggris guru masih rendah (10 %) ▪ Masih rendah guru melakukan penelitian tindakan kelas dalam mengatasi hambatan PBM (10 %) ▪ Kemampuan guru dalam melaksanakan PBM yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan masih perlu ditingkatkan. (40 %) ▪ Wawasan guru tentang pendidikan baik yang berstandar nasional belum merata. ▪ Penguasaan guru tentang penilaian masih belum merata (40 %) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 % guru berijazah S-2 ▪ 90 % guru berijazah S-1 ▪ 90 % guru mengajar sesuai dengan kualifikasi bidang studinya ▪ 50% guru dan TU dapat mengoperasikan komputer ▪ 50 % guru menggunakan media pembelajaran ▪ 30% Guru dan TU dapat berkomunikasi dalam bahasa Inggris ▪ 30% guru melakukan tindakan kelas dalam mengatasi hambatan PBM ▪ Guru melaksanakan PBM secara kreatif (60 %) ▪ Wawasan guru tentang pendidikan baik standar nasional internasional bertambah terus ▪ Penguasaan dan pelaksanaan penilaian terlaksananya (60 %) 	10 % 10 % 10 % 20% 20% 20% 20 % 20 % Peningkatan wawasan guru Peningkatan penguasaan guru ttg penilaian
4	Standar Proses	Standar Proses	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guru yang menyusun prota, promes, dan promig, 70% ▪ Guru yang mengembangkan inovasi pembelajaran masih rendah (40 %) ▪ Pelaksanaan remedial belum terlaksana secara optimal (40 %) ▪ Guru yang melaksanakan program pengayaan baru belum menyeluruh pada semua tingkatan kelas (40 %) ▪ Pembinaan minat dan bakat siswa masih terbatas dan ada beberapa yang belum optima (40 %)l ▪ Pendalaman materi unas siswa kelas IX masih terlaksana secara konvensional ▪ Sikap mental siswa dalam menghadapi berbagai situasi masih belum merata. ▪ Pengembangan PBM melalui tutor sebaya belum optimal. ▪ Budaya membaca siswa masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Guru yang menyusun prota, promes, dan promig 80 % ▪ Guru yang mengembangkan inovasi pembelajaran 60% ▪ Pelaksanaan remedial mencapai 60 % ▪ Guru yang melaksanakan program pengayaan 60 % ▪ Pembinaan minat dan bakat siswa terlaksana (60 %) ▪ Pendalaman materi terlaksana secara optimal dan inovatif ▪ Sikap mental siswa lebih baik dalam menghadapi berbagai situasi ▪ Pelaksanaan tutor sebaya dalam kelompok belajar terlaksana optimal ▪ Budaya membaca siswa terlaksana secara optimal 	10% 20 % 20 % 20 % Peningkatan minat baca Penambahan modelpendalaman materi Pembinaan sikap mental yang reguler Optimalisasi tutor sebaya Pengembangan budaya membaca

No	Kondisi Pendidikan Saat Ini	Kondisi Pendidikan Masa Datang	Besarnya Tantangan Nyata
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembinaan disiplin siswa dan budaya bersih masih belum optimal (40 %) ▪ Pembinaan wali kelas belum merata secara optimal. ▪ Pembinaan BK masih belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 60 % siswa memiliki disiplin yang baik dan budaya bersih ▪ Pembinaan wali kelas terlaksana secara optimal ▪ Pembinaan Bimbingan Karier dan Konseling terlaksana secara optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengendalian disiplin dan kebersihan secara kontinyu (20 %) ▪ Optimalisasi peran wali kelas ▪ Optimalisasi peran guru BP/BK
5	Standar Sarana Prasarana	Standar Sarana Prasarana	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang kepala sekolah: 10 m2 ▪ Ruang wakil KS dan PKS 10 m2 ▪ Ruang kelas : 18 ruang, rombel 18 ▪ Ruang perpustakaan: 14 x 9 m ▪ Ruang Lab. IPA Fisika: 15 x 12 m ▪ Ruang Lab IPA Biologi : 15 x 12 m ▪ Ruang guru: 10 x 12 m ▪ Gudang: 4 x 8 m ▪ Ruang UKS : 4 x 6 m ▪ Ruang Tata Usaha : 4 x 8 m ▪ Ruang Praktik Komputer : 12 x 15 m ▪ Ruang Komite : 2 x 3 m ▪ Ruang ekskul : 6 buah a 2 x 3 m. ▪ Mesjid Sekolah : 12 x 8 m (2 lantai) ▪ WC Siswa : 27 buah a. 2 x 1,5 m ▪ Aula : 8 x 24 m ▪ Lapangan olah raga bola basket perlu diperbaiki ▪ Lapangan Upacara 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kebutuhan minimal ruangan telah dimiliki namun pemanfaatan dan pemeliharaan yang perlu terus dilaksanakan secara konsisten. ▪ Ruang kelasnya 27, 27 rombel ▪ Tersediannya perpustakaan yang memenuhi SSN, begitupun ruang LAB.IPA ▪ Ruang guru 20 x 12 ▪ Gudang 2 buah ukuran 6 x 8 ▪ Ruang UKS 8 x 9 yang lengkap dengan sarana dan prasana ▪ Ruang tata usaha 9 x 8 meter yang nyaman dan memehuni standar SSN ▪ Ada ruang komite yang memehuni standar ▪ Ada ruang ekskul yang memenuhi standar ▪ WC siswa terdiri dari 15 buah ukuran 2 x 1,5 m ▪ Lapangan olahraga dan upacara yang permanen dan sesuai SSN 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terlaksananya pengadaan, pemanfaatan, dan perawatan sarana/prasarana secara terus menerus
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang Lab. Bahasa: tidak ada ▪ Ruang multi media: tidak ada ▪ Ruang akademik dan pengembangan SIM: tidak ada ▪ Ruang kantin: 2,5 x 18 m ▪ Koperasi sekolah : 4 x 3 m 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ruang Lab. Bahasa: ada dan standar ▪ Ruang multi media: ada dan standar ▪ Ruang akademik dan pengembangan SIM: ada dan standar ▪ Ruang kantin: standar (>10m2) ▪ Koperasi sekolah 4 x 8m 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki R Lab Bahasa (100 %) ▪ Terbangun R multi media (100%) ▪ Terbangun R akademik dan SIM(100 %) ▪ Pemeliharaan kantin standar ▪ Perluasan/ pembangunan koperasi sekolah (100 %)

No	Kondisi Pendidikan Saat Ini	Kondisi Pendidikan Masa Datang	Besarnya Tantangan Nyata
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Daya listrik (10000 W) ▪ Komputer Guru: 2 unit ▪ Komputer TU: 4 unit ▪ Komputer perpustakaan: 1 unit ▪ Komputer Lab IPA: blm ada ▪ Jaringan internet: speedy ▪ LAN Komputer ▪ Buku-buku perpustakaan masih terbatas. ▪ Buku paket masih terbatas. ▪ Buku-buku referensi guru masih kurang ▪ Alat-alat olah raga masih perlu ditambah. ▪ Alat peraga tiap mapel masih terbatas ▪ Alat-alat kesenian masih terbatas ▪ Bahan praktik untuk mapel Agama, IPA, Mulok, TIK masih terbatas 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pemeliharaan instalasi yang reguler ▪ Komputer Guru: 5 unit dan 5 buah laptop ▪ Komputer TU: 6 unit ▪ Komputer : 5 unit dgn jaringan internet untuk “Learning Centre” ▪ Komputer Lab IPA: 1 unit dan 1 laptop ▪ Jaringan internet dan LAN dengan pemeliharaan/ maintenance yang reguler ▪ Penambahan buku-buku yang terus menerus ▪ Penambahan buku paket tiap mapel ▪ Penambahan buku referensi guru yang terus menerus ▪ Penambahan alat olah raga yang terus menerus ▪ Penambahan alat peraga untuk tiap mapel ▪ Penambahan alat kesenian, pemeliharaan, dan pemanfaatan yang optimal ▪ Penambahan barang habis pakai bahan praktik yang terus menerus 	<p>Perawatan instalasi listrik yang kontinyu</p> <p>Penambahan laptop 2 unit komputer 4 unit</p> <p>1 komputer, 1 laptop</p> <p>Konsistensi pemeliharaan dan pemanfaatan</p> <p>Konsistensi penambahan buku</p> <p>Rasio Buku paket dan siswa 3 : 1</p> <p>Konsistensi penambahan buku</p> <p>Konsistensi penambahan sarana</p> <p>Penambahan alat</p> <p>Konsistensi penambahan, perawatan, dan pemanfaatan sarana</p>
6	Standar Pembiayaan	Standar Pembiayaan	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standar pembiayaan rata-rata masih rendah (dibawah Rp. 50.000/bulan / anak) ▪ Penggalangan dana dari berbagai sumber masih belum optimal ▪ Peningkatan pengembangan kewirausahaan belum optimal ▪ Kerjasama dengan alumni masih terbatas ▪ Sumber dana 5 jenis: BOS, Rutin, Komite Sekolah, APBD, Grant ▪ Pengelolaan keuangan yang belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pembiayaan memenuhi Standar Nasional (diatas Rp. 150.000/ bulan /anak), rata-rata ▪ Terwujudnya penggalangan dana dari berbagai sumber. ▪ Terwujudnya kewirausahaan sekolah sebagai income generating activities ▪ Terwujudnya kerjasama dengan alumni dalam pengembangan sekolah ▪ Memiliki berbagai sumber dana ▪ Pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akurat 	<p>70 %</p> <p>Peningkatan penggalangan</p> <p>Mewujudkan kewirausahaan</p> <p>Menjalin kerja sama dengan alumni</p> <p>Penambahan sumber dana</p> <p>Optimalisasi pengelolaan keuangan</p>
7	Standar Pengelolaan	Standar Pengelolaan	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan Rencana sekolah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang melalui penyusunan RPS masih belum komprehensif 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki rencana pengembangan sekolah yang komprehensif 	<p>50%</p>

No	Kondisi Pendidikan Saat Ini	Kondisi Pendidikan Masa Datang	Besarnya Tantangan Nyata
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RAPBS belum optimal dengan berbasis kegiatan. ▪ Administrasi sekolah masih ada beberapa kekurangan ▪ Implementasi SIM berbasis IT masih banyak gangguan ▪ Monitoring dan evaluasi masih belum kontinyu ▪ Pelaksanaan rapat-rapat dinas terlaksana sesuai agenda ▪ Kerjasama dengan komite sekolah berjalan baik ▪ Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak masih belum optimal. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyusunan RAPBS ▪ Memiliki administrasi sekolah yang lengkap 	40%
8	Pengembangan Standar Penilaian	Pengembangan Standar Penilaian	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan perangkat model penilaian pembelajaran belum efektif baru dilaksanakan 30% ▪ Implementasi model evaluasi pembelajaran: Ulangan harian, tengah semester, akhir semester, kenaikan kelas, 60% ▪ Pengembangan instrumen atau perangkat penilaian untuk berbagai model soal, 25% ▪ Pengembangan pedoman penilaian hasil belajar pada kelompok bidang studi, baru 25%. ▪ Pengembangan penilaian dalam lomba-lomba non akademis dan uji coba dalam mata pelajaran unas untuk peningkatan standar nilai baru 30% terlaksana. ▪ Pengembangan penilaian dengan pihak-pihak yang lain baru 20% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan perangkat model-model penilaian pembelajaran dilaksanakan 50% ▪ Pengembangan penilaian, guru dan sekolah 70 % melaksanakan sistem penilaian sesuai kurikulum atau standar penilaian nasional ▪ Pengembangan instrumen atau perangkat penilaian untuk berbagai model soal, 50 % ▪ Pengembangan pedoman penilaian hasil belajar pada kelompok bidang studi dilaksanakan 50%. ▪ Pengembangan penilaian dalam lomba-lomba non akademis dan uji coba dalam mata pelajaran unas untuk peningkatan standar nilai terlaksana secara optimal 50% ▪ Pengembangan penilaian dengan pihak-pihak yang lain baru 40% 	20 % 10 % 25% 25% 20% 20 %

5. Identifikasi Peluang

Peluang dalam uraian draf analisis SWOT SMP Muhammadiyah 1 Palembang tidak dituliskan secara spesifik. Hanya dapat dirangkum melalui penjelasan analisis tingkat kesiapan fungsi ditinjau dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk itu dalam penjelasan selanjutnya akan dicoba untuk merumuskan peluang sebagai bagian analisis SMP Muhammadiyah 1 Palembang. Salah satu adalah kebijakan pemerintah, yang mendukung setiap sekolah yang ingin meningkatkan kualitas proses pembelajaran kearah yang lebih positif. Sebagai contoh SMP Muhammadiyah 1 Palembang ingin mengembangkan metode

pembelajaran dengan menguasai pengembangan dokumen KTSP yang oleh pemerintah telah ditetapkan namun oleh setiap guru apat dijabarkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan karakteristik lingkungan belajar.

Penulisan Analisis SWOT

Penulisan dilakukan dengan mengelompokkan terlebih dahulu mana kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, kemudian meletakkan dalam tabel penguraian, selanjutnya menghitung bobot, rating dan skor bobot, dan kemudian menginterpretasikan hasil tersebut dapatkan digunakan?, sesuai dataukah tidak. Lalu merumuskan visi/misi, namun bila visi/misi telah selesai dirumuskan maka ketika dari hasil analisis visi/misi yang terejawantah dalam tujuan tersebut, boleh dirubah, dengan tidak menngganggu proses analisis SWOT disekolah.

Berikut ini tabel analisis SWOT SMP Muhammadiyah 1 Palembang dari uraiannya yang telah ada di SMP Muhammadiyah 1 Palembang, sebagai berikut, dalam lampiran berikut dengan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Pemberian Bobot, Rating, dan Skor Bobot

- Kolom 3, bobot diberikan pada masing-masing faktor dengan kriteria
 - teramat penting dengan bobot 1.00, amat tidak penting dengan bobot 0.00
 - dengan syarat jumlah kekuatan dengan kelemahan harus maksimal 1.00 (ini menunjukkan tidak mungkin satu faktor akan bernilai teramat penting/maksimal)
- Pada kolom 4, tentukan rating bagi setiap faktor dengan kriteria
 - untuk faktor kekuatan yang paling menonjol dengan rating 5 dan yang paling tidak menonjol dengan rating 1
 - untuk faktor kelemahan yang paling tidak menonjol dengan rating 5 dan yang paling menonjol dengan rating 1
- Skor bobot diperoleh dengan mengalikan bobot dengan rating
 - untuk faktor kekuatan yang paling menonjol dengan rating 5 dan yang paling tidak menonjol dengan rating 1
- Penilaian analisis dan penentuan hasil analisis adalah dari jumlah skor bobot dengan kriteria :
 - sangat menonjol jumlah skor bobotnya 5

- diatas rata-rat jumlah skor bobotnya 4
- rata-rata jumlah skor bobotnya 3
- dibawah rata-rata jumlah skor bobotnya 2
- paling tidak diperhatikan jumlah skor bobotnya 1

Tabel Kesimpulan Analisis Faktor Internal (AFI)

No	Faktor-Faktor	Bobot	Rating	Skor Bobot	Kesimpulan
1	2	3	4	5	6
Kekuatan (S)					
1.	Motivasi guru dan siswa	0.20	4	0.80	Motivasinya tinggi dengan mampu mengembangkan metode pembelajaran dan siswanya antusias dalam pembelajaran dan ekstrakurikuler.
2.	Fasilitas ruang perpustakaan	0.20	3	0.60	Selain kondusif, kelengkapan buku yang dimanfaatkan siswa tersedia dengan cukup baik.
3.	Hubungan yang baik antara guru dengan guru ataupun guru dengan siswa	0.15	3	0.45	Sangat kondusif baik dalam kegiatan ekstrakurikuler ataupun pembelajaran, terutama dukungan positif siswa
4.	Memiliki orientasi internasional	0.10	2	0.20	SMP Negeri Inderalaya telah menjadi SSN, dengan tujuan selanjutnya menjadi SBI
Kelemahan (W)					
1.	Fasilitas pengembangan diri	0.05	2	0.10	Kemampuan untuk menguasai IPTEK dan IMTAQ sebagai modal pengembangan diri dalam mewujudkan pengembangan sekolah masih dinilai kurang
2.	Infra struktur sekolah	0.10	2	0.20	Syarat SSN adalah infra struktur sekolah harus mengikuti standar nasional, jika orientasi SBI maka standar yang diikuti internasional yang lebih dikenal dengan penilaian ISO, sedangkan SMPN 1 Inderalaya belum mengikuti seleksi ISO.
3.	Kualifikasi guru	0.10	2	0.20	Kualifikasi guru untuk menunjang SBI haruslah dengan syarat S2, tapi ternyata baru mencapai 50% S1.
4.	Posisi keuangan	0.10	3	0.30	Keuangan sekolah haruslah memiliki pendanaan mandiri dengan dukungan semua pihak, baik sekolah, pemerintah dan orang tua, sedangkan keuangan sekolah masih bergantung BOS
Jumlah		1.00		2.85	

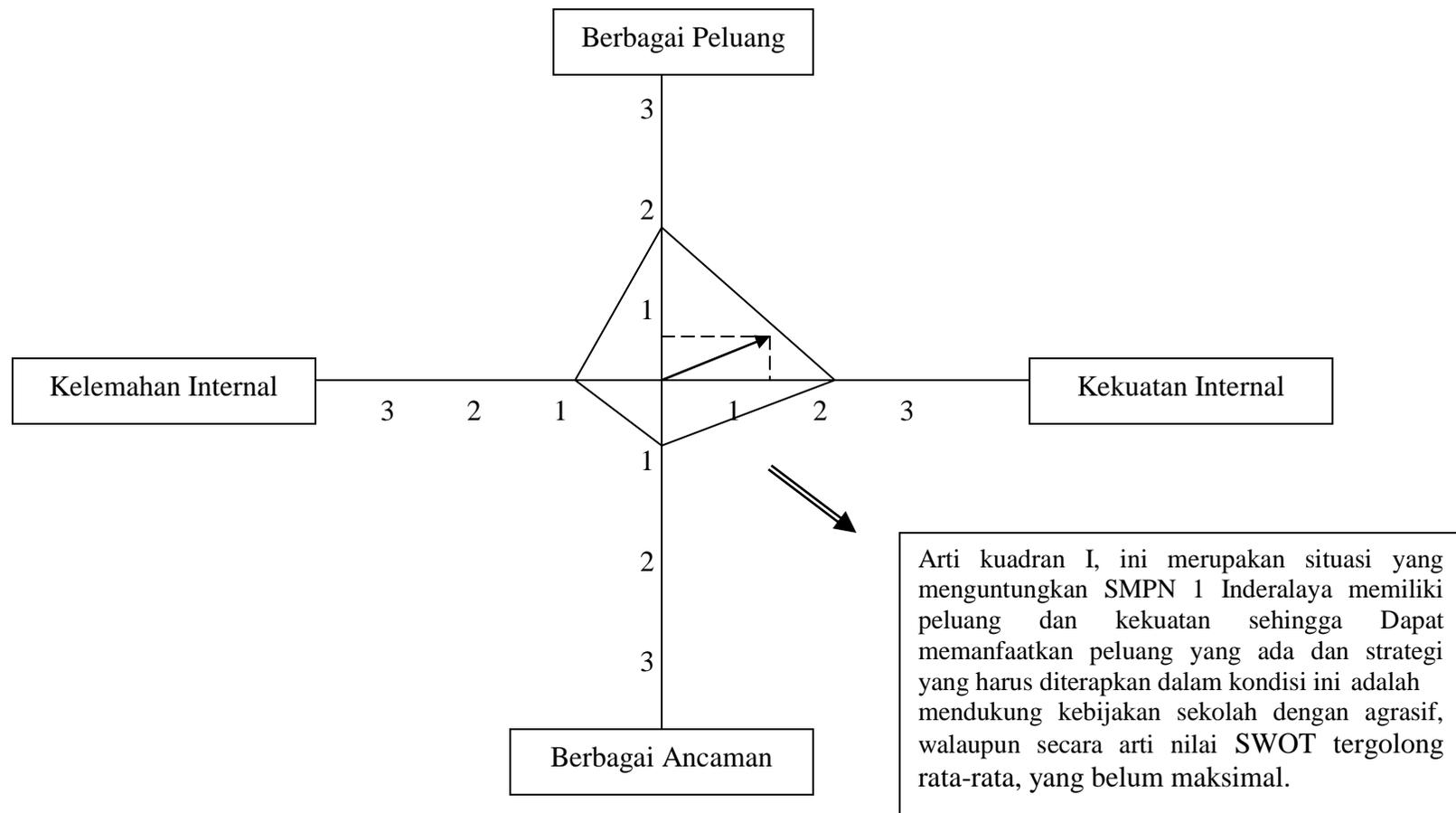
Tabel Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (AFE)

No	Faktor-Faktor	Bobot	Rating	Skor Bobot	Kesimpulan
1	2	3	4	5	6
Peluang (O)					
1.	Kebijakan pemerintah	0.10	3	0.30	Pemerintah melalui UU mengizinkan setiap sekolah untuk meningkatkan kedudukan dengan mengikuti prasyarat yang telah ditentukan dan uji kelayakan
2.	Buku penunjang dan buku referensi	0.20	4	0.80	Karena perputakaan merupakan kekuatan artinya kerjasama pengadaan buku-buku terkait dengan standar SBI (baik buku pelajaran ataupun pengembangan diri)
3.	Pengembangan kurikulum SBI	0.15	3	0.45	Dengan kemerdekaan setiap sekolah menentukan kebijakan sekolahnya untuk itu semua <i>stakeholders</i> dapat mengakomodasi kebijakan pengembangan kurikulum di SMP Negeri 1 Inderalaya
4.	Pembangunan ekonomi di Inderalaya	0.10	2	0.20	Ogan Ilir menjadi salah satu kabupaten dengan master plan KTM (Kota Terpadu Mandiri) dapat membantu perkembangan kemandirian pendidikan disekitarnya
Tantangan (T)					
1.	Meningkatnya persaingan	0.10	2	0.20	Perkembangan kemajuan dan kebijakan pemerintah membuat sekolah berlomba memperbaiki sistemnya, untuk itu seleksi setiap sekolah akan semakin ketat
2.	Dukungan orang tua	0.15	2	0.30	Karena penggalangan partisipasi masyarakat melalui komite sekolah ternyata orang tua hanya 50% yang bersedia, pola pikir yang menilai SMP itu gratis.
3.	Jaringan ke SMP SBI ataupun SMA SBI	0.10	2	0.20	Harus memiliki jaringan baik lokal, regional, nasional, bahkan internasional sekolah yang bertaraf internasional
4.	Sponsor/perusahaan	0.10	2	0.20	Mencari bantuan sponsor guna pengembangan sekolah
Jumlah		1.00		2.65	

Diagram Analisis SWOT
Kesimpulan Analisis Faktor Internal (AFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal(AFE)

AFI = 2.85 dengan (S = 2.05) dan (W = 0.80) jadi (S – W = 2.05 – 0.80 = 1.25)

AFE = 2.65 dengan (O = 1.75) dan (T = 0.90) jadi (O – P = 1.75 – 0.90 = 0.85)



Perumusan Visi/Misi

Secara teori diketahui setelah melakukan analisis SWOT (dengan meninjau faktor internal dan faktor eksternal), maka dapat dirumuskan visi/misi sekolah yang menjadi dasar menentukan tujuan, strategi, kebijakan, program, pendanaan, dan prosedur, serta kinetja, kemudian melakukan evaluasi dan kontrol.

Dari uraian kesimpulan analisis SWOT terhadap SMP Muhammadiyah 1 Palembang, maka dapat dirumuskan visi/misi, yang sesuai dengan karakteristik sekolah. Inilah tawaran visi/misi berdasarkan kesimpulan analisis SWOT SMP Muhammadiyah 1 Palembang di kotamadya Palembang. .

Visi SMP Muhammadiyah 1 Palembang adalah setelah analisis SWOT kesimpulan dari analisis faktor internal dan eksternal “Menjadikan SMP Muhammadiyah 1 Palembang RSBI yang Prestasi Siswanya Berlandaskan IPTEK dan IMTAQ tahun 2015”. Dengan indikator sebagai berikut:

1. Unggul dalam prestasi,
2. Unggul dalam proses pembelajaran yang variatif dan inovatif,
3. Unggul dalam keagamaan atau akhlah mulia
4. Unggul dalam perolehan UN dan US (*output*)
5. Unggul dalam memenangkan persaingan SMA Unggulan (*out come*)
6. Unggul dalam lomba olimpiade sains
7. Unggul dalam kreativitas siswa
8. Unggul dalam penguasaan bahasa Inggris
9. Unggul dalam penguasaan IT
10. Unggul dalam administrasi kurikulum yang lengkap, berstandar nasional dan internasional,
11. Unggul dalam komitmen dan kompetensi tenaga penddikan dan kependidikan yang profesional,
12. Unggul dalam pengelolaan pendidikan partisipatif, transparan, dan akuntabel,
13. Unggul dalam lingkungan sekolah yang kondusif, tertib, bersih, indah, ramah.

Misi Sekolah

1. Mewujudkan proses pembelajaran yang variatif dan inovatif,
2. Mewujudkan silabus semua mata pelajaran dan untuk semua jenjang atau kelas,
3. Mewujudkan RPP semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan,
4. Menerapkan komitmen dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional,
5. Menerapkan pengelolaan pendidikan partisipatif, transparan, dan akuntabel,
6. Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan relevan dalam mendukung proses belajar mengajar,
7. Mewujudkan sumber dana yang memadai, memenuhi kegiatan sekolah yang berstandar nasional dan internasional,
8. Mewujudkan sistem penilaian beragam (multiaspek) untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas,
9. Mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif, tertib, bersih, indah, ramah,
10. Menerapkan Akhlak yang terpuji,
11. Mengembangkan cinta terhadap seni budaya,
12. Menerapkan kemampuan olahraga yang tangguh dan kompetitif,
13. Mewujudkan wiyata mandala yang menikmati belajar siswanya,
14. Mewujudkan kepramukaan yang menjadi suri teladan.

Tujuan Sekolah

Pada tahun pelajaran 2008/2009 sampai dengan tahun pelajaran 2011/2012 diharapkan :

1. Sekolah mampu memiliki lulusan yang unggul dalam prestasi akademik dan non akademik,
2. Sekolah mewujudkan profesionalitas guru dan tata usaha,
3. Sekolah mewujudkan peningkatan kompetensi guru dan tata usaha,

4. Sekolah mampu melaksanakan proses pembelajaran yang variatif dan inovatif,
5. Sekolah mewujudkan komitmen dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang profesional. Dokumen -1 KTSP,
6. Sekolah mewujudkan silabus semua mata pelajaran dan untuk semua jenjang/tingkatan,
7. Sekolah mewujudkan RPP semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan,
8. Sekolah mewujudkan pengelolaan pendidikan partisipatif, transparan, dan akuntabel,
9. Sekolah memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan relevan dalam mendukung proses belajar mengajar,
10. Sekolah memiliki sistem penilaian beragam (multiaspek) untuk semua mata pelajaran dan semua jenjang kelas.

2) Tersedianya buku pedoman MBS model *CQI* dengan *PDSA*.

Buku pedoman MBS model *CQI* dengan *PDSA* yang dapat diterapkan di SMP, khususnya SMP di kota Palembang berikut ini.

KONSEP BUKU PEDOMAN
PENERAPAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA PALEMBANG

Oleh : Dr. Aisyah, AR., M.Pd. dkk

A. Pendahuluan

Sejak beberapa waktu terakhir, kita dikenalkan dengan pendekatan "baru" dalam manajemen sekolah yang diacu sebagai manajemen berbasis sekolah (school based management) atau disingkat MBS. Di mancanegara, seperti Amerika Serikat, pendekatan ini sebenarnya telah berkembang cukup lama. Pada 1988 *American Association of School Administrators, National Association of Elementary School Principals, and National Association of Secondary School Principals*, menerbitkan dokumen berjudul *school based management, a strategy for better learning*. Munculnya gagasan ini dipicu oleh ketidakpuasan atau kegerahan para pengelola pendidikan pada level operasional atas keterbatasan kewenangan yang mereka miliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri. Umumnya dipandang bahwa para kepala sekolah merasa nirdaya karena terperangkap dalam ketergantungan berlebihan terhadap konteks pendidikan. Akibatnya, peran utama mereka sebagai pemimpin pendidikan semakin dikerdilkan dengan rutinitas urusan birokrasi yang menumpulkan kreativitas berinovasi.

Di Indonesia, gagasan penerapan pendekatan ini muncul belakangan sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai paradigma baru dalam pengoperasian sekolah. Selama ini, sekolah hanyalah kepanjangan tangan birokrasi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan politik pendidikan. Para pengelola sekolah sama sekali tidak memiliki banyak kelonggaran untuk mengoperasikan sekolahnya secara mandiri. Semua kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan di sekolah umumnya diadakan di tingkat pemerintah pusat atau sebagian di instansi vertikal dan sekolah hanya menerima apa adanya. Apa saja muatan kurikulum pendidikan di sekolah adalah urusan pusat, kepala sekolah dan guru harus melaksanakannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknisnya. Anggaran pendidikan mengalir dari pusat ke daerah menelusuri saluran birokrasi dengan begitu banyak simpul yang masing-masing menginginkan bagian. Tidak heran jika nilai akhir yang diterima di tingkat paling operasional telah menyusut lebih dari separuhnya. Kita khawatir, jangan-jangan selama ini lebih dari separuh dana pendidikan sebenarnya dipakai untuk hal-hal yang sama sekali tidak atau kurang berurusan dengan proses pembelajaran di level yang paling operasional, sekolah.

MBS adalah upaya serius yang rumit, yang memunculkan berbagai isu kebijakan dan melibatkan banyak lini kewenangan dalam pengambilan keputusan serta tanggung jawab dan akuntabilitas atas konsekuensi keputusan yang diambil. Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat perlu memahami benar pengertian MBS, manfaat, masalah-masalah dalam penerapannya, dan yang terpenting adalah pengaruhnya terhadap prestasi belajar murid.

Mengingat mutu pendidikan di Indonesia selama ini kurang memuaskan banyak pihak, maka perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan dengan melakukan reformasi pendidikan. Model reformasi yang ditawarkan akhir-akhir ini adalah model Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). MBS adalah salah satu bentuk restrukturisasi sekolah dengan merubah sistem sekolah dalam melakukan kegiatannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi akademik sekolah dengan merubah desain struktur organisasinya (Susan Albers Mohrman, Priscilla Wohlstetter and Associates, *School-Based Management: Organizing for High Performance*, San Francisco: Jossey Bass, 1994:53).

Sejak tahun 1999 konsep MBS telah diujicobakan di sekolah-sekolah di Indonesia. Saat ini telah banyak sekolah yang tidak sekedar melakukan uji coba melainkan melangkah pada tahapan pelaksanaan. Tentu saja banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan konsep baru ini yang perlu mendapatkan masukan dari berbagai ahli manajemen pendidikan. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan MBS di sekolah-sekolah di Indonesia, kami mencoba melakukan kunjungan ke SMP Negeri 9 Palembang dan SMP Muhammadiyah 1 Palembang. Maksud dari kunjungan ini adalah untuk membandingkan antara berbagai teori tentang MBS

baik yang dikembangkan di negara lain maupun menurut konsep Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah (MPMBS) yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Dalam kunjungan ini kami memberikan angket yang selanjutnya diisi oleh oleh Kepala Sekolah, guru, karyawan, komite sekolah, dan siswa di SMP Negeri 9 Palembang dan SMP Muhammadiyah 1 Palembang yang memiliki kepedulian besar terhadap penerapan MBS dan peningkatan mutu sekolah. Hasil dari kunjungan lapangan ini kami bandingkan dengan teori yang ada yang hasilnya diklasifikasikan menjadi lima kategori yaitu: tidak sesuai, kurang sesuai, cukup, sesuai, sangat sesuai. Klasifikasi tersebut didasarkan pada hasil kuantifikasi dari indikator-indikator yang kami kembangkan mulai dari yang terendah ke yang paling tinggi yaitu 1-20, 21-40, 41-60, 61-80 dan 81-100. Total nilai yang diperoleh dibagi dengan jumlah instrumen sehingga menghasilkan rata-rata nilai akhir. Hasil survei ini kami maksudkan sebagai bahan masukan kepada sekolah yang bersangkutan dan sebagai kajian teoretik tentang penerapan MBS di Indonesia.

B. Konsep Dasar dan Prinsip MBS

Berdasarkan MBS maka tugas-tugas manajemen sekolah ditetapkan menurut karakteristik-karakteristik dan kebutuhan-kebutuhan sekolah itu sendiri. Oleh karena itu warga sekolah memiliki otonomi dan tanggungjawab yang lebih besar atas penggunaan sumber daya sekolah guna memecahkan masalah sekolah dan menyelenggarakan aktivitas pendidikan yang efektif demi perkembangan jangka panjang sekolah (Yin Cheong Cheng, *School Effectiveness & School-Based Management: A Mechanism for Development*, Washington D.C: The Falmer Press, 1996, h. 44) Model MBS yang diterapkan di Indonesia adalah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).

Konsep dasar MPMBS adalah adanya otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif. Artinya MPMBS memberikan otonomi yang lebih luas kepada masing-masing sekolah secara individual dalam menjalankan program sekolahnya dan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Selain itu

dalam menyelesaikan masalah dan dalam pengambilan keputusan harus melibatkan partisipasi setiap konstituen sekolah seperti siswa, guru, tenaga administrasi, orang tua, masyarakat lingkungan dan para tokoh masyarakat (Anonim, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, Direktorat SLTP Depdiknas, 2001, hh. 9-10).

Terdapat empat prinsip MBS yaitu prinsip equifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip pengelolaan mandiri dan prinsip inisiatif manusia yang secara jelas diuraikan sebagai berikut (Cheng, op.cit, hh, 48-58).

1. Prinsip Equifinalitas (*Equifinality*)

Didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat perbedaan cara untuk mencapai tujuan. Manajemen sekolah menekankan fleksibilitas dan sekolah harus dikelola oleh sekolah itu sendiri berdasarkan kondisinya masing-masing. Prinsip equifinalitas ini mendorong terjadinya desentralisasi kekuasaan dan mempersilahkan sekolah memiliki mobilitas yang cukup, berkembang dan bekerja menurut strategi uniknya masing-masing untuk mengelola sekolahnya secara efektif.

2. Prinsip Desentralisasi (*Decentralization*)

Konsisten dengan prinsip equifinalitas maka desentralisasi merupakan gejala penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Dasar teori dari prinsip desentralisasi ini adalah manajemen sekolah dalam aktivitas pengajaran menghadapi berbagai kesulitan dan permasalahan. Oleh karena itu sekolah harus diberi kekuasaan dan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan secara efektif sesegera mungkin ketika permasalahan muncul. Tujuan dari prinsip desentralisasi adalah memecahkan masalah secara efisien dan bukan menghindari masalah. Maka MBS harus mampu menemukan permasalahan, memecahkannya tepat waktu dan memberi kontribusi terhadap efektivitas aktivitas belajar mengajar.

3. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (*Self-Managing System*)

MBS tidak menyangkal perlunya mencapai tujuan berdasarkan kebijakan dari atas, tetapi menurut MBS terdapat berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu amat penting dengan mempersilahkan sekolah untuk

memiliki sistem pengelolaan mandiri (*self-managing system*) di bawah kendali kebijakan dan struktur utama, memiliki otonomi untuk mengembangkan tujuan pengajaran dan strategi manajemen, mendistribusikan sumber daya manusia dan sumber daya lain, memecahkan masalah dan meraih tujuan menurut kondisi mereka masing-masing. Karena sekolah menerapkan sistem pengelolaan mandiri maka sekolah dipersilahkan untuk mengambil inisiatif atas tanggung jawab mereka sendiri.

4. Prinsip Inisiatif Manusia (*Human Initiative*)

Sesuai dengan perkembangan hubungan kemanusiaan dan perubahan ilmu tingkah laku pada manajemen modern, maka orang-orang mulai memberikan perhatian serius pada pengaruh penting faktor manusia dalam efektivitas organisasi. Perspektif sumber daya manusia menekankan pentingnya sumber daya manusia sehingga poin utama manajemen adalah untuk mengembangkan sumber daya manusia di sekolah untuk lebih berperan dan berinisiatif. Maka MBS bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai dengan para konstituen sekolah untuk berpartisipasi secara luas dan mengembangkan potensi mereka. Peningkatan kualitas pendidikan terutama berasal dari kemajuan proses internal, khususnya dari aspek manusia.

C. Manfaat MBS

MBS dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian sekolah yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. MBS adalah strategi untuk meningkatkan pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting dari pusat dan daerah ke tingkat sekolah. Dengan demikian, MBS pada dasarnya merupakan sistem manajemen di mana sekolah merupakan unit pengambilan keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBS memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di sekolah.

Dalam pendekatan ini, tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu mengenai anggaran, kepegawaian, dan kurikulum ditempatkan di tingkat sekolah

dan bukan di tingkat daerah, apalagi pusat. Melalui keterlibatan guru, orang tua, dan anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting itu, MBS dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para murid. Dengan demikian, pada dasarnya MBS adalah upaya memandirikan sekolah dengan memberdayakannya.

Para pendukung MBS berpendapat bahwa prestasi belajar murid lebih mungkin meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan di sekolah ketimbang pada tingkat daerah. Para kepala sekolah cenderung lebih peka dan sangat mengetahui kebutuhan murid dan sekolahnya ketimbang para birokrat di tingkat pusat atau daerah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa reformasi pendidikan yang bagus sekalipun tidak akan berhasil jika para guru yang harus menerapkannya tidak berperanserta merencanakannya.

Para pendukung MBS menyatakan bahwa pendekatan ini memiliki lebih banyak maslahatnya ketimbang pengambilan keputusan yang terpusat. Maslahat itu antara lain menciptakan sumber kepemimpinan baru, lebih demokratis dan terbuka, serta menciptakan keseimbangan yang pas antara anggaran yang tersedia dan prioritas program pembelajaran. Pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan meningkatkan motivasi dan komunikasi (dua variabel penting bagi kinerja guru) dan pada gilirannya meningkatkan prestasi belajar murid. MBS bahkan dipandang sebagai salah satu cara untuk menarik dan mempertahankan guru dan staf yang berkualitas tinggi.

Penerapan MBS yang efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa manfaat spesifik dari penerapan MBS sebagai berikut (Kathleen, ERIC_Digests, downloaded April 2002).

- a. Memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran.
- b. Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting.
- c. Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran.

- d. Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah.
- e. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistis ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program sekolah.
- f. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level.

D. Karakteristik MBS

MBS memiliki delapan karakteristik yang bertolakbelakang dengan karakteristik Manajemen Kontrol Eeksternal (MKE) yaitu dalam hal misi sekolah, strategi-strategi manajemen, hakikat aktivitas-aktivitas, penggunaan sumber-sumber daya, peran warga sekolah, hubungan interperonal, kualitas pada administrator dan indikator-indikator efektivitas (Ibid, hh. 48-58).

1. Misi sekolah

Sekolah dengan MBS memiliki cita-cita menjalankan sekolah untuk mewakili sekelompok harapan bersama, keyakinan dan nilai-nilai sekolah, membimbing warga sekolah di dalam aktivitas pendidikan dan arahan kerja. Ini adalah budaya organisasi yang besar pengaruhnya terhadap fungsi dan efektivitas sekolah. Budaya organisasi sekolah yang kuat harus dikembangkan diantara warga sekolah sehingga mereka bersedia berbagi tanggung jawab, bekerja keras dan terlibat secara penuh dalam pekerjaan sekolah untuk mencapai cita-cita bersama. Budaya sekolah yang kuat juga mensosialisasikan warga baru untuk memiliki komitmen terhadap misi sekolah dan dalam waktu yang sama memaksa warga lama bekerjasama secara terus menerus untuk menjalankan misi. Bila kita ingin sekolah kita mengambil inisiatif untuk memberikan kualitas pelayanan yang baik untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang bermacam-macam dan kompleks maka budaya organisasi yang kuat harus dikembangkan oleh warga sekolah untuk sekolahnya sendiri.

2. Hakikat aktivitas-aktivitas sekolah

Hakikat aktivitas sekolah berarti sekolah menjalankan aktivitas-aktivitas pendidikannya berdasarkan karakteristik, kebutuhan dan situasi sekolah. Hakikat aktivitas berbasis sekolah adalah amat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini secara tak langsung mempromosikan perubahan manajemen sekolah dari model manajemen kontrol eksternal menjadi model berbasis sekolah. Ketika sebuah sekolah dikontrol secara eksternal, hanya mengimplementasikan tugas-tugas berdasarkan kebijakan dari otoritas pusat. Isi, metode dan evaluasi pengajaran cenderung mengikuti standar yang sama. Selain itu fasilitas, personel, organisasi, pengajaran dan pengelolaan sekolah semuanya dikontrol secara hati-hati oleh otoritas pusat eksternal dan oleh karena itu aktivitas-aktivitas sekolah tidak berbasis sekolah.

3. Strategi-strategi manajemen.

Perubahan arah dari MKE ke MBS dapat direfleksikan dalam aspek-aspek strategi manajemen berikut ini.

a. Konsep atau asumsi tentang hakikat manusia.

Berlandaskan pada teori McGregor (1960) MBS menggunakan teori manajemen Y yang berasumsi bahwa manusia tidak memiliki sifat bawaan yang tidak menyukai pekerjaan. Di bawah kondisi tertentu manusia bersedia mencapai tujuan tanpa harus dipaksa dan ia mampu disertai tanggung jawab. Teori Y menyarankan bahwa partisipasi demokratik, perkembangan profesional dan kemajuan kehidupan kerja adalah penting untuk memotivasi guru-guru dan para siswa.

Selain itu berlandaskan teori Maslow (1943) dan Alderfer (1972) bahwa guru dan siswa kemungkinan memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, diluar keuntungan ekonomi. Mereka mengejar interaksi, afiliasi sosial, aktualisasi diri dan kesempatan berkembang. Dalam rangka memuaskan tingkat kebutuhan yang lebih tinggi mereka bersedia menerima tantangan dan bekerja lebih keras. MBS dapat menyediakan fleksibilitas lebih dan kesempatan untuk memuaskan

kebutuhan-kebutuhan guru dan siswa dan memberi peran terhadap talenta-talenta mereka.

b. Konsep organisasi sekolah

Dalam organisasi modern, konsep organisasi telah berubah. Kini orang percaya bahwa sebuah organisasi adalah tempat untuk hidup dan berkembang. Organisasi bukan hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang statis, misalnya produk yang berkualitas. Sekolah sebagai organisasi tidak sekedar tempat persiapan anak-anak dimasa mendatang, tetapi juga tempat untuk siswa-siswa atau guru dan administrator untuk hidup, tumbuh dan menjalani perkembangan. Tanpa perkembangan profesional dan keterlibatan yang antusias dari guru-guru dan administrator maka sekolah tak dapat dikembangkan dan ditingkatkan secara terus menerus, dan siswa-siswa tidak memiliki pembelajaran hidup yang kaya. Oleh karena itu dalam sebuah manajemen berbasis sekolah, sekolah tidak hanya tempat membantu perkembangan siswa tetapi juga tempat perkembangan guru dan administrator.

c. Gaya pengambilan keputusan

Dalam MBS maka gaya pengambilan keputusan pada tingkat sekolah adalah pembagian kekuasaan (power sharing) atau partisipasi (participation) dengan alasan sebagai berikut: (1). Tujuan sekolah sering tidak jelas dan berubah-ubah. Partisipasi guru, orang tua, siswa dan alumni dapat membantu untuk mengembangkan tujuan yang dapat lebih merefleksikan situasi saat ini dan kebutuhan masa depan. (2). Tujuan sekolah itu beragam dan misi sekolah itu kompleks. Diperlukan intelegensi, imajinasi dan usaha dari banyak orang untuk mencapainya. Partisipasi atau keterlibatan guru, orang tua dan siswa dalam pengambilan keputusan adalah sebuah sumbangan yang penting bagi siswa. (3). Partisipasi dalam pengambilan keputusan memberikan kesempatan kepada warga dan bahkan administrator untuk belajar dan berkembang dan juga mengerti dalam mengelola sekolah. (4). Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah proses untuk mendorong guru-guru, orang tua dan siswa untuk terlibat di sekolah.

d. Gaya kepemimpinan.

Menurut Sergiovanni (1984) terdapat lima tingkat kepemimpinan Kepala Sekolah dari rendah ke tinggi yaitu kepemimpinan teknis, manusia, pendidikan, simbolik dan budaya. Dalam merespon perubahan ke MBS maka gaya kepemimpinan kepala sekolah berubah dari tingkat rendah ke pememimpinan multi tingkat, berarti tidak hanya kepemimpinan teknis dan manusia melainkan juga kepemimpinan kependidikan, simbolik dan budaya.

Bila kita yakin bahwa pekerjaan sekolah menjadi kian tak menentu, kompleks dan sulit, dan latar belakang pemikiran dan talenta warga sekolah lebih bermacam-macam dari sebelumnya maka aspek simbolik dan budaya kepemimpinan kepala sekolah harus ditetapkankan. Kepala sekolah harus mmberi contoh yang baik untuk membantu warga sekolah memahami dan menghargai makna yang melandasi aktivitas-aktivitas sekolah, menyatukan berbagai perbedaan diantara berbagai warga, mengklarifikasi ketidakpastian dan ambiguitas, mengembangkan keunikan budaya dan misi sekolah, dan memotivasi setiap orang untuk bekerja demi masa depan lebih baik.

e. Penggunaan kekuasaan

French dan Reven (1968) mengklasifikasikan kekuasaan menjadi lima kategori yaitu penghargaan, paksaan, legitimasi, referensi dan keahlian. MBS simaksudkan untuk mengembangkan SDM dan mendorong komitten dan inisiatif warga sekolah, maka gaya tradisional dalam penggunaan kekuasaan harus dirubah. Maka administrator disarankan menggunakan kekuasaan terutama keahlian dan referensi, memberi perhatian terhadap pertumbuhan profesional guru, menjadi pemimpin yang profesional terhadap guru-guru dan memberi inspirasi pada guru-guru dan siswa untuk bekerja secara antusias dengan kepribadian mulia mereka.

f. Keterampilan-keterampilan manajemen

Ketika mengadopsi MBS maka pekerjaan manajemen internal menjadi lebih kompleks dan berat oleh karena itu diperlukan konsep-konsep baru dalam keterampilan manajemen baru. Misalnya metode-metode ilmiah untuk analisis

keputusan, keterampilan mengelola konflik, strategi efektif untuk perubahan dan perkembangan organisasi.

4. Penggunaan sumber-sumber daya

MBS dalam model school-based budgeting program memberikan keleluasaan kepada sekolah untuk memiliki otonomi yang lebih besar dalam mengadakan dan menggunakan sumber daya. Dengan demikian, self-budgeting menyediakan suatu kondisi yang penting pada sekolah untuk menggunakan sumberdaya-sumberdaya secara efektif berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka guna memecahkan masalah yang timbul saat itu dan mengejar tujuan mereka sendiri seperti yang berlaku di Inggris, Kanada, Australia, Amerika Serikat dan Hongkong. Namun pada MKE sebagian besar sumber daya dan pengeluaran sekolah-sekolah negeri datang langsung dari pemerintah.

Pemerintah perlu mengawasi secara dekat bagaimana sekolah menggunakan sumber dayanya. Sehingga pemerintah memerlukan SDM yang banyak dan sumber daya yang besar untuk mengawasi penggunaan sumber daya di sekolah. Setiap aspek pembiayaan sekolah harus berkonsultasi dan minta persetujuan dari pusat. Sekolah tidak mudah untuk mengadakan sumber daya di bawah pertentangan-pertentangan dengan otoritas pusat. Oleh karena itu sekolah tidak dapat menggunakan sumber daya secara efektif dalam rangka memenuhi kebutuhan manajemen dan aktivitas pengajaran.

5. Perbedaan-perbedaan peran

Peran warga sekolah secara langsung atau tidak langsung ditentukan oleh kebijakan manajemen pemerintah, misi sekolah, hakikat aktivitas sekolah, strategi-strategi pengelolaan internal sekolah, dan gaya penggunaan sumber daya. Perubahan ke model MBS menuntut peran aktif sekolah, administrator, guru, orang tua dari yang semula pasif.

a. Peran Sekolah

MBS bertujuan untuk mengembangkan siswa, guru dan sekolah menurut karakteristik sekolah itu sendiri. Oleh karena itu peran sekolah adalah gaya pengembangan, inisiatif, memecahkan masalah, dan mengeksplorasi semua

kemungkinan untuk memfasilitasi efektivitas pengajaran guru dan efektivitas pembelajaran siswa.

b. Peran Departemen Pendidikan

Dalam MBS aktor kunci adalah sekolah dan peran otoritas pusat (Departemen Pendidikan) hanya sebagai supporter/pendukung atau advisor/penasehat yang membantu sekolah untuk mengembangkan sumber dayanya dan secara khusus untuk menjalankan aktivitas pengajaran efektif.

c. Peran Para Administrator

Peran administrator dalam MBS adalah pengembang dan pemimpin sebuah tujuan. Mereka mengembangkan tujuan-tujuan baru untuk sekolah menurut situasi dan kebutuhannya. Selain itu juga memimpin warga sekolah untuk mencapai tujuan dan berkolaborasi dan terlibat penuh dalam fungsi sekolah. Mereka juga memperlebar sumber-sumber daya untuk mempromosikan perkembangan sekolah.

d. Peran Para Guru

Dalam MBS, cita-cita sekolah dan strategi-strategi pengelolaan mendorong partisipasi dan perkembangan dan peran guru adalah sebagai rekan kerja, pengambil keputusan dan pengimplementasi. Mereka bekerja bersama-sama dengan komitmen bersama dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk mempromosikan pengajaran efektif dan mengembangkan sekolah mereka dengan antusiasme.

e. Peran Para Orang Tua

Dalam MBS, para orang tua menerima pelayanan yang berkualitas melalui siswa-siswa yang menerima pendidikan yang mereka butuhkan. Peran orang tua adalah sebagai partner dan supporter. Mereka dapat berpartisipasi dalam proses sekolah, mendidik siswa secara kooperatif, berusaha membantu perkembangan yang sehat kepada sekolah dengan memberi sumbangan sumber daya dan informasi, mendukung dan melindungi sekolah saat mengalami kesulitan/krisis.

6. Hubungan antar manusia

Dalam terminologi MBS menekankan hubungan antar manusia yang cenderung terbuka, bekerjasama, semangat tim dan komitmen yang saling menguntungkan. Maka iklim organisasi cenderung mengarah ke tipe komitmen. Iklim organisasi seperti gaya tanpa pimpinan (headless style), gaya tanpa sepemahaman (disengagement style) dan gaya kontrol (control style) dapat merusak pengajaran dan manajemen sekolah serta mempengaruhi efektivitas sekolah.

7. Kualitas para administrator

Dalam model MBS sekolah memiliki otonomi tertentu. Partisipasi dan perkembangan dipandang sebagai suatu yang penting dalam menghadapi tugas pendidikan yang kompleks dan dalam mengejar efektivitas pendidikan. Dalam kasus ini persyaratan administrator yang berkualitas adalah sangat tinggi/penting. Mereka tidak hanya harus dilengkapi dengan pengetahuan dan teknik manajemen modern untuk mengembangkan sumber daya dan manusia, tetapi juga perlu untuk belajar dan tumbuh secara terus menerus untuk menemukan dan memecahkan masalah demi kemajuan sekolah. Singkatnya, untuk menjadi akrab dengan persyaratan sekolah semacam ini mereka perlu memperluas wawasan dan pemikirannya untuk belajar sehingga mereka dapat mempromosikan demi perkembangan jangka panjang sekolahnya.

8. Indikator-indikator efektivitas

Pada sekolah-sekolah yang dikontrol dari luar, maka perkembangan misi dan tujuan sekolah tidaklah penting. Indikator utama efektivitas sekolah adalah prestasi akademik pada akhir suatu tingkat sekolah, dan mengabaikan proses pendidikan dan pencapaian penting lainnya. Dalam MBS, efektivitas sekolah dinilai menurut indikator multi-tingkat dan multi-segi. Penilaian tentang efektivitas sekolah harus mencakup proses pembelajaran dan metode untuk membantu kemajuan sekolah. Oleh karena itu penilaian efektivitas sekolah harus memperhatikan multi-tingkat yaitu pada tingkat sekolah, kelompok, individual

dan indikator multi-segi yaitu mencakup input, proses dan output sekolah disamping perkembangan akademik siswa.

Sementara itu berdasarkan konsep MPMBS karakteristiknya terdiri dari: output yang diharapkan, proses dan input (Depdiknas, op. cit, hh. 11-20).

1. Output yang diharapkan

Sekolah harus memiliki output yang diharapkan yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Output bisa berupa prestasi akademik seperti NEM, lomba karya ilmiah remaja, loma Bahasa Inggris, Matematika, Fisika, cara berfikir kritis, kreatif, nalar, rasional, induktif, deduktif dan ilmiah. Juga prestasi non akademik misalnya keingintahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, kerjasama yang baik, rasa kasih sayang yang tinggi terhadap sesama, solidaritas yang tinggi, toleransi, kedisiplinan, kerajinan, prestasi olah raga, kesenian dan kepramukaan.

2. Proses

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki karakteristik proses berikut.

- a. Proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi;
- b. Kepemimpinan sekolah yang kuat;
- c. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib;
- d. Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif;
- e. Sekolah memiliki budaya mutu;
- f. Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis;
- g. Sekolah memiliki kewenangan/kemandirian;
- h. Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat;
- i. Sekolah memiliki keterbukaan manajemen;
- j. Sekolah memiliki kemauan untuk berubah;
- k. Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan;
- l. Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan;
- m. Komunikasi yang baik; dan
- n. Sekolah memiliki akuntabilitas.

3. Input pendidikan

Adapun input dari pendidikan, meliputi:

- a. Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas;
- b. Sumberdaya tersedia dan siap;
- c. Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi;
- d. Memiliki harapan prestasi yang tinggi;
- e. Fokus pada pelanggan; dan
- f. Input manajemen.

E. Syarat Penerapan MBS

Sejak awal, pemerintah (pusat dan daerah) haruslah suportif atas gagasan MBS. Mereka harus mempercayai kepala sekolah dan dewan sekolah untuk menentukan cara mencapai sasaran pendidikan di masing-masing sekolah. Penting artinya memiliki kesepakatan tertulis yang memuat secara rinci peran dan tanggung jawab dewan pendidikan daerah, dinas pendidikan daerah, kepala sekolah, dan dewan sekolah. Kesepakatan itu harus dengan jelas menyatakan standar yang akan dipakai sebagai dasar penilaian akuntabilitas sekolah. Setiap sekolah perlu menyusun laporan kinerja tahunan yang mencakup "seberapa baik kinerja sekolah dalam upayanya mencapai tujuan dan sasaran, bagaimana sekolah menggunakan sumber dayanya, dan apa rencana selanjutnya."

Perlu diadakan pelatihan dalam bidang-bidang seperti dinamika kelompok, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, penanganan konflik, teknik presentasi, manajemen stress, serta komunikasi antarpribadi dalam kelompok. Pelatihan ini ditujukan bagi semua pihak yang terlibat di sekolah dan anggota masyarakat, khususnya pada tahap awal penerapan MBS. Untuk memenuhi tantangan pekerjaan, kepala sekolah kemungkinan besar memerlukan tambahan pelatihan kepemimpinan.

Dengan kata lain, penerapan MBS mensyaratkan yang berikut.

- ✓ MBS harus mendapat dukungan staf sekolah.

- ✓ MBS lebih mungkin berhasil jika diterapkan secara bertahap. Kemungkinan diperlukan lima tahun atau lebih untuk menerapkan MBS secara berhasil.
- ✓ Staf sekolah dan kantor dinas harus memperoleh pelatihan penerapannya, pada saat yang sama juga harus belajar menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi yang baru.
- ✓ Harus disediakan dukungan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu bagi staf untuk bertemu secara teratur.

Pemerintah pusat dan daerah harus mendelegasikan wewenang kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah selanjutnya berbagi kewenangan ini dengan para guru dan orang tua murid.

F. Komponen yang didesentralisasikan

Menurut Wohlstetter dan Mohrman terdapat empat sumber daya yang harus didesentralisasikan yang pada hakikatnya merupakan inti dan isi dari MBS yaitu *power/authority*, *knowledge*, *information* dan *reward*. Keempatnya merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dan menuntut kehadirannya (Mohrman at. al, op.ct, 37-47).

- 1) Kekuasaan/kewenangan (*power/authority*) harus didesentralisasikan ke sekolah-sekolah secara langsung yaitu melalui dewan sekolah. Sedikitnya terhadap tiga bidang penting yaitu budget, personnel dan curriculum. Termasuk dalam kewenangan ini adalah menyangkut pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah, guru dan staff sekolah.
- 2) Pengetahuan (*knowledge*) juga harus didesentralisasikan sehingga sumberdaya manusia di sekolah mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kinerja sekolah. Pengetahuan yang perlu didesentralisasikan meliputi: keterampilan yang terkait dengan pekerjaan secara langsung (*job skills*), keterampilan kelompok (*teamwork skills*) dan pengetahuan keorganisasian (*organizational knowledge*). Keterampilan kelompok diantaranya adalah pemecahan masalah, pengambilan keputusan dan keterampilan berkomunikasi. Termasuk dalam

pengetahuan keorganisasian adalah pemahaman lingkungan dan strategi merespon perubahan.

- 3) Hakikat lain yang harus didesentralisasikan adalah informasi (*information*). Pada model sentralistik informasi hanya dimiliki para pimpinan puncak, maka pada model MBS harus didistribusikan ke seluruh constituent sekolah bahkan ke seluruh stakeholder. Apa yang perlu disebarluaskan? Antara lain berupa visi, misi, strategi, sasaran dan tujuan sekolah, keuangan dan struktur biaya, isu-isu sekitar sekolah, kinerja sekolah dan para pelanggannya. Penyebaran informasi bisa secara vertikal dan horizontal baik dengan cara tatap muka maupun tulisan.
- 4) Penghargaan (*reward*) adalah hal penting lainnya yang harus didesentralisasikan. Penghargaan bisa berupa fisik maupun non-fisik yang semuanya didasarkan atas prestasi kerja. Penghargaan fisik bisa berupa pemberian hadiah seperti uang. Penghargaan non-fisik berupa kenaikan pangkat, melanjutkan pendidikan, mengikuti seminar atau konferensi dan penataran.

Sementara itu menurut Depdiknas fungsi-fungsi yang dapat didesentralisasikan ke sekolah adalah (Depdiknas, op. cit, hh. 21-24):

- a. Perencanaan dan evaluasi program sekolah

Sekolah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya kebutuhan untuk meningkatkan mutu sekolah. Sekolah juga diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, khususnya evaluasi internal atau evaluasi diri.

- b. Pengelolaan kurikulum

Sekolah dapat mengembangkan, namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat. Sekolah juga diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.

- c. Pengelolaan proses belajar mengajar

Sekolah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode dan teknik pembelajaran dan pengajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik

mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristik guru dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah.

d. Pengelolaan ketenagaan

Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan perencanaan, rekrutmen, pengembangan, penghargaan dan sanksi, hubungan kerja hingga evaluasi kinerja tenaga kerja sekolah dapat dilakukan oleh sekolah kecuali guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani oleh birokrasi di atasnya.

e. Pengelolaan peralatan dan perlengkapan

Pengelolaan fasilitas seharusnya dilakukan oleh sekolah mulai dari pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan hingga pengembangannya. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas baik kecukupan, kesesuaian dan kemutakhirannya terutama fasilitas yang sangat erat kaitannya secara langsung dengan proses belajar mengajar.

f. Pengelolaan keuangan

Pengelolaan keuangan, terutama pengalokasian/penggunaan uang sudah sepatasnya dilakukan oleh sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan, sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah.

g. Pelayanan siswa

Pelayanan siswa mulai dari penerimaan siswa baru, pengembangan, pembinaan, pembimbingan, penempatan untuk melanjutkan sekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga pengurusan alumni dari dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

h. Hubungan sekolah dan masyarakat

Esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan dan dukungan dari masyarakat, terutama dukungan moral dan finansial yang dari dulu telah didesentralisasikan. Yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

i. Pengelolaan iklim sekolah

Iklim sekolah yang kondusif-akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses belajar mengajar yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, optimisme dan harapan yang tinggi dari warga sekolah, kesehatan sekolah dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa adalah contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangat belajar siswa. Iklim sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah dan yang diperlukan adalah peningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

E. Hasil penelitian di SMP Negeri 9 Palembang dan SMP Muhammadiyah 1 Palembang

Indikator nilai yang diperoleh dari penelitian di sekolah, antara lain :

1. *Prinsip-Prinsip MBS*

- a. Prinsip Ekuifinalitas 88
- b. Prinsip Desentralisasi 90
- c. Sistem Pengelolaan Mandiri 87
- d. Inisiatif Manusia 87

2. *Karakteristik MBS*

- a. Misi Sekolah 93
- b. Hakikat Aktivitas Sekolah 87
- c. Strategi Manajemen 88
- d. Penggunaan Sumber Daya 90
- e. Perbedaan Peran
 - a) Peran Sekolah 92
 - b) Peran Depdiknas 75
 - c) Peran Administrator 80
 - d) Peran Guru 86
 - e) Peran Orang Tua Siswa 74
- f. Hubungan Antar Manusia 89
- g. Kualitas Para Administrator 86

- h. Indikator-Indikator Efektivitas 86
 - i. Output yang diharapkan 84
 - j. Proses
 - a) Efektifitas Proses Belajar Mengajar 87
 - b) Kepemimpinan sekolah yang kuat 90
 - c) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib 89
 - d) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif 88
 - e) Sekolah memiliki budaya mutu 88
 - f) Sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis 91
 - g) Sekolah memiliki kewenangan/kemandirian 80
 - h) Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat 86
 - i) Sekolah memiliki keterbukaan manajemen 88
 - j) Sekolah memiliki kemauan untuk berubah 95
 - k) Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan 95
 - l) Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan 86
 - m) Komunikasi yang baik 92
 - n) Sekolah memiliki akuntabilitas 90
 - k. Input
 - a) Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas 95
 - b) Sumberdaya tersedia dan siap 87
 - c) Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi 89
 - d) Memiliki harapan prestasi yang tinggi 91
 - e) Fokus pada pelanggan 85
 - f) Input manajemen 87
3. *Komponen yang didesentralisasikan*
- a. Perencanaan dan evaluasi program sekolah 93
 - b. Pengelolaan Kurikulum 85
 - c. Pengelolaan Proses Belajar Mengajar 86
 - d. Pengelolaan Ketenagaan 90
 - e. Pengelolaan Peralatan dan Perlengkapan 87
 - f. Pengelolaan Keuangan 92

- g. Pelayanan Siswa 85
- h. Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 83
- i. Pengelolaan Iklim Sekolah 86
- j. Pengetahuan dan Keterampilan 90
- k. Informasi 88
- l. Penghargaan 93
- m. Kekuasaan 80

Nilai rata-rata akhir dari hasil kunjungan lapangan tersebut adalah $\frac{\sum N}{n} \Rightarrow \frac{4.379}{50} = 88$, dimana N adalah nilai, n adalah jumlah indikator.

G. Hambatan Penerapan MBS

Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi pihak-pihak berkepentingan dalam penerapan MBS adalah sebagai berikut.

1) Tidak Berminat Untuk Terlibat

Sebagian orang tidak menginginkan kerja tambahan selain pekerjaan yang sekarang mereka lakukan. Mereka tidak berminat untuk ikut serta dalam kegiatan yang menurut mereka hanya menambah beban. Anggota dewan sekolah harus lebih banyak menggunakan waktunya dalam hal-hal yang menyangkut perencanaan dan anggaran.

Akibatnya kepala sekolah dan guru tidak memiliki banyak waktu lagi yang tersisa untuk memikirkan aspek-aspek lain dari pekerjaan mereka. Tidak semua guru akan berminat dalam proses penyusunan anggaran atau tidak ingin menyediakan waktunya untuk urusan itu.

2) Tidak Efisien

Pengambilan keputusan yang dilakukan secara partisipatif adakalanya menimbulkan frustrasi dan seringkali lebih lamban dibandingkan dengan cara-cara yang otokratis. Para anggota dewan sekolah harus dapat bekerja sama dan memusatkan perhatian pada tugas, bukan pada hal-hal lain di luar itu.

3) Pikiran Kelompok

Setelah beberapa saat bersama, para anggota dewan sekolah kemungkinan besar akan semakin kohesif. Di satu sisi hal ini berdampak positif karena mereka akan saling mendukung satu sama lain. Di sisi lain, kohesivitas itu menyebabkan anggota terlalu kompromis hanya karena tidak merasa enak berlainan pendapat dengan anggota lainnya. Pada saat inilah dewan sekolah mulai terjangkit "pikiran kelompok." Ini berbahaya karena keputusan yang diambil kemungkinan besar tidak lagi realistis.

4) Memerlukan Pelatihan

Pihak-pihak yang berkepentingan kemungkinan besar sama sekali tidak atau belum berpengalaman menerapkan model yang rumit dan partisipatif ini. Mereka kemungkinan besar tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang hakikat MBS sebenarnya dan bagaimana cara kerjanya, pengambilan keputusan, serta komunikasi.

5) Kebingungan Atas Peran dan Tanggung Jawab Baru

Pihak-pihak yang terlibat kemungkinan besar telah sangat terkondisi dengan iklim kerja yang selama ini mereka geluti. Penerapan MBS mengubah peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkepentingan. Perubahan yang mendadak kemungkinan besar akan menimbulkan kejutan dan kebingungan sehingga mereka ragu untuk memikul tanggung jawab pengambilan keputusan.

6) Kesulitan Koordinasi

Setiap penerapan model yang rumit dan mencakup kegiatan yang beragam mengharuskan adanya koordinasi yang efektif dan efisien. Tanpa itu, kegiatan yang beragam akan berjalan sendiri ke tujuannya masing-masing yang kemungkinan besar sama sekali menjauh dari tujuan sekolah.

Apabila pihak-pihak yang berkepentingan telah dilibatkan sejak awal, mereka dapat memastikan bahwa setiap hambatan telah ditangani sebelum penerapan MBS. Dua unsur penting adalah pelatihan yang cukup tentang MBS dan klarifikasi peran dan tanggung jawab serta hasil yang diharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, semua yang terlibat harus

memahami apa saja tanggung jawab pengambilan keputusan yang dapat dibagi, oleh siapa, dan pada level mana dalam organisasi.

Anggota masyarakat sekolah harus menyadari bahwa adakalanya harapan yang dibebankan kepada sekolah terlalu tinggi. Pengalaman penerapannya di tempat lain menunjukkan bahwa daerah yang paling berhasil menerapkan MBS telah memfokuskan harapan mereka pada dua masalah: meningkatkan keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan menghasilkan keputusan lebih baik.

3) Terwujudnya sekolah yang berkualitas.

Salah satu hasil yang diharapkan tercapai dari penerapan MBS model *CQI* dengan *PDSA* ini adalah terwujudnya sekolah yang berkualitas. Untuk lebih jelasnya diuraikan berikut ini.

MEWUJUDKAN SEKOLAH BERKUALITAS DI KOTA PALEMBANG

Oleh : Dr. Aisyah, AR., M.Pd. dkk

Dari hasil penelitian pendahuluan yang telah dilaksanakan, peneliti membuat kesimpulan dan rekomendasi demi terciptanya sekolah yang berkualitas. Kesimpulan dan rekomendasi tersebut sebagai berikut.

Berdasarkan hasil akhir dari kunjungan lapangan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan MBS di SMP Negeri 9 Palembang dan SMP Muhammadiyah 1 Palembang adalah sesuai. Artinya penerapan MBS di SMP Negeri 9 Palembang dan SMP Muhammadiyah 1 Palembang telah sesuai dengan teori-teori yang beraku di banyak negara dan khususnya MPMBS yang sedang diterapkan di Indonesia. Memperhatikan hasil penerapan MBS yang demikian itu maka kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Peran Dinas Pendidikan masih terlihat kurang mendukung penerapan MBS. Seringkali petugas Dinas Pendidikan tidak sebagai pendukung dari belakang atas pelaksanaan MBS ini tetapi masih sering ingin tampil di depan. Peran yang demikian justru menghambat penerapan MBS dalam rangka terjadinya efektivitas sekolah dan peningkatan mutu pendidikan secara umum.
- 2) Peran orang tua siswa masih kurang, sehingga harus lebih didorong agar berperan aktif bukan hanya dalam pendanaan sekolah tetapi juga dalam proses pembelajaran. Artinya partisipasi orang tua harus diarahkan untuk memikirkan kemajuan sekolah secara umum dan terutama dalam peningkatan mutu sekolah. Orang tua harus lebih berperan aktif dalam mengembangkan program sekolah serta lebih aktif dalam membimbing belajar anaknya di rumah.

Kekuasaan dan kewenangan sekolah masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan. Hakikat MBS adalah dimilikinya kekuasaan, kewenangan dan otonomi di tingkat sekolah itu sendiri. Tanpa itu maka sekolah tidak akan dapat menjalankan program-programnya secara lancar dan bertanggung jawab. Secara umum dari rekomendasi di atas tampak sekali bahwa pada masa transisi ini peran birokrat pendidikan masih menonjol, sementara itu sekolah belum sepenuhnya diberdayakan. Kondisi inilah yang sedikit demi sedikit harus dikikis dan sekolah

diberikan kekuasaan, kewenangan, dan otonomi yang sebesar-besarnya sehingga bisa mengatur rumah tangganya sendiri dengan leluasa.

4) Terciptanya kepemimpinan dan guru profesional.

Terakhir, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menciptakan kepemimpinan kepala sekolah yang ideal dan guru yang profesional.

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH YANG IDEAL

Oleh : Dr. Aisyah, AR., M.Pd. dkk

Berkaitan dengan kepemimpinan ada beberapa pengertian tentang kepemimpinan oleh para ahli manajemen, antara lain :

1. Menurut Robbins (1991)

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi kelompok anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran.

2. Menurut Schriesheim (1992)

Kepemimpinan adalah proses pengaruh sosial dimana pemimpinnya mengupayakan partisipasi sukarela para bawahannya dalam usaha mencapai tujuan organisasi.

3. Menurut Goetsch (1994)

Kepemimpinan adalah Kemampuan untuk membangkitkan semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap usaha mencapai atau melampaui tujuan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi kegiatan kelompok menuju kearah penentuan dan tercapainya tujuan yang diharapkan.

Sementara karakteristik dari seorang pemimpin, dapat berupa :

- a) Tanggung jawab seimbang;
- b) Model peranan yang positif;
- c) Memiliki keterampilan komunikasi yang baik;
- d) Memiliki pengaruh yang positif; dan
- e) Mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain.

Beberapa karakteristik kepemimpinan di atas dapat juga dimiliki oleh seorang kepala sekolah yang ingin menjadi pemimpin yang ideal. Sedangkan, peranan kepemimpinan dalam melaksanakan tugasnya, yaitu :

- a) Mengatasi penolakan terhadap perubahan;
- b) Mengatasi kebutuhan kelompok di dalam dan di luar organisasi; serta
- c) Membentuk kerangka etis yg menjadi dasar kegiatan organisasi.

Pada sekolah yang akan menerapkan MBS, kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyetarakan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar mampu mengambil keputusan dan inisiatif atau prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah.

Kepala sekolah memiliki kemampuan memobilisasi sumber daya sekolah, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan sekolah. Salah satu tugas kepala sekolah dalam rangka penerapan MBS di sekolah adalah melakukan sosialisasi MBS dengan membaca dan membentuk budaya MBS di masing-masing sekolah.

Secara umum, garis-garis besar kegiatan sosialisasi atau pembudayaan MBS dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- b. Baca dan pahami sistem, budaya, dan sumber daya yang ada di sekolah secara cermat dan merefleksikan kecocokannya dengan sistem, budaya, dan sumber daya baru yang diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan MBS.
- c. Identifikasi sistem, budaya, dan sumber daya yang perlu diperkuat dan diubah, serta kenalkan sistem, budaya, dan sumber daya baru yang diperlukan untuk menyelenggarakan MBS.
- d. Buatlah komitmen secara rinci yang diketahui oleh semua unsur yang bertanggung jawab, jika terjadi perubahan sistem, budaya, dan sumber daya yang cukup mendasar.
- e. Bekerjalah dengan semua unsur sekolah untuk mengklarifikasikan visi, misi, tujuan, sasaran, rencana, dan program-program penyelenggaraan MBS.
- f. Hadapilah *status quo* terhadap perubahan, jangan menghindar dan menarik darinya serta jelaskan mengapa diperlukan perubahan dari manajemen berbasis pusat menjadi MBS.

- g. Garisbawahi prioritas sistem, budaya, dan sumber daya yang belum ada sekarang, akan tetapi sangat diperlukan untuk mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, rencana, dan program-program penyelenggaraan MBS.
- h. Doronglah sistem, budaya, dan sumber daya manusia yang mendukung penerapan MBS serta hargailah unsur-unsur yang telah memberi contoh dalam penerapan MBS.
- i. Pantaulah dan arahkan proses perubahan agar sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, rencana, dan program-program MBS.

Selanjutnya, tugas dan fungsi kepala sekolah adalah mengelola penyelenggaraan MBS di sekolah masing-masing. Mengingat sekolah merupakan unit utama dan terdepan dalam penyelenggaraan MB, maka sekolah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana dan program pelaksanaan MBS dengan melibatkan kelompok-kelompok kepentingan, antara lain wakil sekolah (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan tata usaha), wakil siswa (pengurus OSIS), wakil orang tua siswa, wakil organisasi profesi, wakil pemerintah, dan tokoh masyarakat.
- 2) Mengkoordinasikan dan menyeraskan segala sumber daya yang ada di sekolah dan di luar sekolah untuk mencapai sasaran MBS yang telah ditetapkan.
- 3) Melaksanakan MBS secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip *total quality management* dan berpikir sistem serta terpadu.
- 4) Melaksanakan pengawasan dan pembimbingan dalam pelaksanaan MBS sehingga kejituan implementasi dapat dijamin untuk mencapai sasaran MBS.
- 5) Pada setiap tahun ajaran melakukan evaluasi untuk menilai tingkat ketercapaian sasaran program MBS yang telah ditetapkan.
- 6) Menyusun laporan penyelenggaraan MBS beserta hasilnya secara lengkap untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
- 7) Mempertanggung jawabkan hasil penyelenggaraan MBS kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Komite Sekolah, dan Yayasan (bagi sekolah swasta).

MENJADI GURU PROFESIONAL

Oleh : Dr. Aisyah, AR., M.Pd. dkk

A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan salah satu pertimbangannya bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan berbangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlaq mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.“

Pembangunan dalam bidang pendidikan merupakan investasi jangka panjang suatu bangsa. Hal ini berarti bangsa yang menginvestasikan pembangunan pendidikan yang tinggi akan memperoleh hasil yang baik pula dalam jangka panjang. Alasannya, pendidikan merupakan pilar yang terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bangsa Indonesia sendiri termasuk bangsa yang kurang memperhatikan investasi pembangunan bidang pendidikan, sehingga kualitas sumber daya manusia Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga (Depdiknas, 2003:112).

Dari informasi data Internasional tentang mutu pendidikan, ternyata mutu pendidikan di Indonesia kurang menggemblakan. Berdasarkan hasil laporan *United Nation Development Programme*, tercatat bahwa Indek Pembangunan Manusia Indonesia menurut *Human Development Index* menduduki peringkat ke-102 negara yang disurvei dan satu peringkat dibawah Vietnam (Noer, 2005:3). Selain itu yang lebih mengecewakan lagi bahwa dari hasil Studi Repeat (*TIMSS-R 1999*) melaporkan bahwa siswa Sekolah Menengah Pertama di Indonesia menempati peringkat ke-32 untuk IPA dan peringkat ke-34 untuk Matematika dari 38 negara yang disurvei di Asia, Australia dan Afrika (Depdiknas dalam Noer, 2005:3).

Hasil survei dan penilaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan mutu pendidikan yang selama ini dilakukan belum memecahkan masalah mendasar pendidikan di Indonesia. Telah banyak berbagai macam kajian

baik melalui penelitian, seminar, workshop atau diskusi ilmiah oleh pejabat maupun pakar pendidikan yang menyatakan bahwa rendahnya mutu pendidikan di Indonesia disebabkan karena rendahnya mutu guru (Depdiknas, 2003:113).

Dilihat dari kualitas dan kuantitasnya sebagian besar guru di Indonesia tidak layak mengajar. Dibawah ini persentase kualitas guru di Indonesia yang tidak layak mengajar sebagai berikut, untuk tingkat SD sebanyak 605.217 (49,3 %), tingkat SMP sebanyak 167.643 (35,9 %), tingkat SMA sebanyak 75.684 (32,9 %) dan untuk tingkat SMK sebanyak 63.961 (43,3 %). Latar pendidikan guru SD yang sudah mencapai D2 sebanyak 20 %, guru SMP yang sudah mencapai D3 baru 20 %, guru SMA yang sudah S1 sebanyak 70 %. Padahal dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan guru SD minimal harus D4 dan SMP minimal lulusan S1. Untuk tingkat kesesuaian guru mengajar, terdapat 15 % guru mengajar tidak sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, sedangkan jumlah total guru Pegawai Negeri Sipil sekarang lebih kurang 2,7 juta orang (Fatah dalam <http://www.pikiran-rakyat.com>, 2006:1).

Selanjutnya, masih menurut Fatah dalam <http://www.pikiran-rakyat.com>. (2006:2) untuk persentase kuantitas guru di Indonesia yang dibutuhkan adalah pada tahun 2005 jumlah guru tersebut adalah 218.838 orang. Adapun rincian kebutuhan guru tersebut yakni, untuk guru TK dibutuhkan guru sebanyak 1.340, untuk SD sebanyak 107.461, untuk SMP sebanyak 68.514, untuk SMA sebanyak 29.303, dan untuk SMK butuh guru sebanyak 12.220 orang.

Secara jujur memang kita harus mengakui bahwa dalam hal ini guru tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Disatu sisi banyak tuntutan terhadap guru untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme agar mutu pendidikan meningkat. Namun, disisi lain kesejahteraan guru kurang diperhatikan. Sebenarnya mutu dan kesejahteraan guru merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu juga, kebijakan penerapan otonomi daerah sebenarnya turut menyumbang terhadap kemunduran mutu pendidikan Indonesia. Dalam hal ini karena hanya sebagian kecil pemerintah kabupaten/kota/provinsi yang mempunyai perhatian yang tinggi kepada pembangunan bidang pendidikan.

Pada hakekatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi sebagai pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan dan pengembangan potensi diri. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan di Indonesia.

Menurut pasal 31 ayat (4) UUD 1945 disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi dan misi yang ingin diwujudkan. Sejalan dengan visi dan misi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru, maka perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik.

Sertifikat Pendidik merupakan bukti formal yang diberikan kepada guru serta pengakuan atas kedudukan mereka sebagai tenaga profesional. Secara nasional ada sebanyak dua juta tujuh ratus ribu guru yang harus disertifikasi di Indonesia. Sementara untuk daerah Sumatera Selatan sendiri terdapat sebanyak enam puluh tujuh ribu guru yang harus disertifikasi (Suhery, 2007 dalam Seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 di Auditorium Unsri). Lebih lanjut kuota sertifikasi guru tahun 2006, khusus untuk guru SMP di daerah Sumatera Selatan sebanyak 98 orang (Depdiknas, 2006:6).

Dalam melaksanakan tugasnya guru semestinya memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalitasnya. Jika penghasilan guru telah mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari sesuai yang diharapkan, maka guru tidak akan lagi mencuri waktu untuk mencari pekerjaan sampingan. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

B. Guru

1. Pengertian Guru

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.“

Dalam pengertian yang sederhana guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Sedangkan dalam pengertian lain, guru merupakan semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara individual ataupun klasikal, baik di sekolah maupun diluar sekolah (Ametembun dalam Djamarah, 2000:32).

Berdasarkan pandangan masyarakat menurut Wahjosumidjo (1990:42) guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat-tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, surau/mushola, rumah dan sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:377) “guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.”

Selain itu juga guru diartikan sebagai orang-orang yang pekerjaannya mengajar, mendidik, dan membimbing untuk memberikan kemajuan dan perkembangan kepada peserta didik yang dilakukan baik di lembaga formal, informal maupun non formal.

Dari pendapat di atas dapatlah disimpulkan bahwa guru adalah semua orang yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengajar, membimbing dan membina anak didik, baik secara individual maupun klasikal di sekolah maupun diluar sekolah.

2. Kedudukan Guru

Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat, karena kewibawaanlah yang menyebabkan guru dihormati. Masyarakat yakin bahwa guru dapat mendidik siswa menjadi orang yang berkepribadian mulia.

Dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat inilah maka dipundak guru diberikan tugas dan tanggung jawab yang berat.

1) Persyaratan Menjadi Guru

Menurut Djamarah (2004:32-33) persyaratan menjadi guru antara lain, taqwa kepada Allah SWT, berilmu, sehat jasmani, dan berkelakuan baik. Syarat lain adalah memiliki kualifikasi pendidikan dan kompetensi sesuai yang disyaratkan serta memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan.”

2) Tanggung Jawab Guru

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Menurut Djamarah (2004:33) guru yang bertanggung jawab memiliki beberapa sifat antara lain, (1) menerima dan mematuhi norma, (2) nilai-nilai kemanusiaan, (3) memiliki tugas mendidik dengan bebas, berani, gembira, sadar akan nilai-nilai yang berkaitan dengan perbuatannya, (4) menghargai anak didik, (5) bijaksana dan hati-hati serta (6) takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, guru harus bertanggung jawab atas segala sikap, tingkah laku dan perbuatannya dalam kerangka membina jiwa dan watak anak didik.

3. Kepribadian Guru

Daradjat dalam Djamarah (2004:39-40) mengatakan bahwa kepribadian sesungguhnya adalah abstrak (ma'nawi), sukar dilihat atau diketahui secara nyata, yang dapat diketahui adalah penampilan atau bekasnya dalam segala segi dan aspek kehidupan. Misalnya dalam tindakan, ucapan, cara bergaul, cara berpakaian dan dalam menghadapi berbagai persoalan atau masalah, baik yang ringan maupun berat.

Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Seluruh sikap dan perbuatan seseorang merupakan suatu gambaran dari kepribadian orang tersebut dengan sadar. Kepribadian adalah unsur yang menentukan keakraban hubungan guru dengan anak didik. Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam membina dan membimbing anak didik.

Menurut Meikeljohn (1998:12) mengatakan bahwa tidak seorangpun yang dapat menjadi seorang guru yang sejati (*mulia*) kecuali bila dia menjadikan dirinya sebagai bagian dari anak didik yang berusaha untuk memahami semua anak didik dan kata-katanya. Guru yang bisa demikian maka ia akan disenangi anak didiknya.

4. Tugas Guru

Guru adalah figur seorang pemimpin dan sosok arsitektur yang dapat membentuk jiwa dan watak anak didik. Salah satu tugas guru adalah mempersiapkan manusia susila yang cakap yang dapat diharapkan membangun dirinya dan membangun bangsa dan negara.

Menurut Roestiyah dalam Djamarah (2004:38-39) menyebutkan bahwa tugas seorang guru sebagai pendidik di sekolah diantaranya sebagai berikut:

1. Guru menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan dan pengalaman-pengalaman
2. Guru membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai dengan cita-cita dan dasar negara Pancasila
3. Guru menyiapkan anak didik menjadi warga negara yang baik
4. Guru sebagai perantara dalam belajar
5. Guru sebagai pembimbing untuk membawa anak didik ke arah kedewasaan
6. Guru sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat
7. Guru sebagai penegak disiplin yakni guru menjadi contoh segala hal
8. Guru sebagai administrator dan manajer
9. Pekerjaan guru sebagai suatu profesi
10. Guru sebagai perencana kurikulum
11. Guru sebagai pemimpin dan sponsor dalam kegiatan anak-anak

5. Peranan Guru

Banyak peranan yang diperlukan dari guru sebagai pendidik, atau siapa saja yang telah menerjunkan diri menjadi guru. Menurut Djamarah (2004:43-48) peranan guru sebagai pendidik sebagai berikut:

a. Korektor

Sebagai korektor guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Koreksi yang harus dilakukan oleh guru terhadap sikap dan sifat anak didik tidak hanya di sekolah tetapi di luar sekolah pun harus dilakukan.

b. Inspirator

Sebagai inspirator guru harus dapat memberikan ilham yang baik bagi kemajuan belajar anak didik.

c. Informator

Sebagai informator guru harus dapat memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain dari sejumlah bahan pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam kurikulum.

d. Organisator

Sebagai organisator guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik dan sebagainya untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar.

e. Motivator

Sebagai motivator guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar.

f. Inisiator

Sebagai inisiator guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran.

g. Fasilitator

Sebagai fasilitator guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik.

h. Pembimbing

Sebagai pembimbing peran guru sangat penting sekali karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi dewasa susila yang cakap.

i. Demonstrator

Sebagai demonstrator guru berperan memberikn semangat belajar kepada anak didik, membantu dalam belajar dengan memperagakan apa yang diajarkan secara didaktis.

j. Pengelola Kelas

Sebagai pengelola kelas guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru.

k. Mediator

Sebagai mediator guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non material maupun material.

l. Supervisor

Sebagai supervisor guru hendaknya dapat membantu, memperbaiki, dan menilai secara kritis terhadap proses pengajaran.

m. Evaluator

Sebagai evaluator guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik dan instrinsik. Penilaian terhadap aspek instrinsik lebih menyentuh atau mengarah kepada aspek nilai atau *values*.

6. Profesionalisme Guru

Profesional adalah suatu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Tamyong dalam Usman (2002:15) menyebutkan bahwa guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal atau dengan kata lain orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya.”

Jadi, profesionalisme guru disini diartikan sebagai kecakapan guru dalam melaksanakan pekerjaan atau tugasnya sebagai pendidik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam bidang keguruan.

Menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip profesionalisme guru sebagai berikut:

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme
- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlaq mulia
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
- f. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja

7. Kode Etik Guru Indonesia

Menurut Soetjipto dan Raflis Kosasi (2004:34-35) berdasarkan hasil rumusan Kongres PGRI XVIII Kode Etik Guru Indonesia terdiri atas:

1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang berbudi pekerti luhur dan ber-Pancasila
2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing
3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik
4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua untuk kepentingan anak didik

5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat sekitar sekolah maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan
6. Guru sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya
7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru, baik berdasarkan lingkungan kerja maupun dalam hubungan keseluruhan
8. Guru secara hukum bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdianya
9. Guru melaksanakan segala kebutuhan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan

C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

1. Konsep Dasar Profesi Guru

Dalam hal ini konsep dasar guru adalah sebagai berikut, jabatan guru sebagai profesi, memiliki keahlian khusus yang harus dipersiapkan melalui pendidikan keahlian atau spesialisasi di bidang pendidikan dan pengajaran, memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan keterampilan dan keahlian khusus, dan penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian khusus yang dimiliki (Depdiknas, 2003:118).

Selain hal yang dimaksud di atas, menurut Depdiknas (2003:118-119) konsep dasar profesi guru antara lain:

1) Dasar Filosofis Profesi Guru

Guru memang menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Kewibawaan yang menyebabkan guru dihormati, sehingga masyarakat tidak meragukan figur guru. Budaya bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur sebagaimana tercermin dalam diri guru melalui keteladanan layak digugu dan ditiru.

2) Dasar Historis Profesi Guru

Pekerjaan guru merupakan profesi yang sangat tua usianya di dunia. Di Indonesia jauh sebelum kemerdekaan, selama awal kemerdekaan sampai

pada pertengahan abad XX telah meninggalkan tapak sejarah bahwa profesi guru merupakan pekerjaan pengabdian yang mulia dan terhormat. Kemudian setelah masa tersebut sejarah mencatat profesi guru semakin terabaikan oleh masyarakat dan pemerintah.

3) Dasar Sosiologis Profesi Guru

Profesi guru merupakan pekerjaan/jabatan pemersatu bangsa dan negara, melalui pemberian pemahaman dan penanaman nilai-nilai ketunggalikaan dalam kebhinekaan pada peserta didik dan anak bangsa yang dipersiapkan menjadi pemimpin masyarakat, bangsa dan negara pada semua bidang kehidupan.

4) Dasar Yuridis Profesi Guru

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak awal kemerdekaan hingga sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi guru. Baru setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen profesi guru mempunyai kekuatan yuridis.

2. Landasan Profesi Guru

Adapun landasan dari profesi guru yang dimaksud di atas adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan

(Osarizalsyam dalam <http://www.depdiknas.go.id>., 2006:1)

3. Konsep Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang status guru dan dosen di Indonesia sebagai suatu profesi. Selain itu juga mengatur tentang kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, hak

dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan, penghargaan, perlindungan, organisasi profesi dan kode etik serta profesionalitas guru dan dosen di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini merupakan payung hukum atau dasar hukum profesi guru dan dosen sebagai tenaga pendidik di Indonesia. Dimana dalam Undang-Undang ini tidak ada perlakuan yang membedakan antara guru negeri dan guru swasta maupun dosen negeri dan dosen swasta.

Istilah pendidikan profesi dan sertifikasi guru sering kita baca di surat kabar, didengar di radio dan sering diucapkan oleh pembuat kebijakan serta praktisi pendidikan dalam berbagai pertemuan. Hal tersebut dikarenakan semenjak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada tanggal 30 Desember 2005 yang kemudian dituangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. Dimana Undang-Undang tersebut menuntut penyesuaian pendidikan dan pembinaan guru sebagai profesi. Disatu pihak, pekerjaan sebagai guru memperoleh penghargaan yang lebih tinggi, tetapi dipihak lain pengakuan tersebut mengharuskan guru memenuhi sejumlah persyaratan agar mencapai standar minimal seorang profesional.

Pengakuan terhadap guru sebagai tenaga profesional baru akan dapat diberikan apabila guru telah memiliki kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat pendidik sesuai dengan yang disyaratkan dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kualifikasi Akademik itu sendiri harus diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasi guru akan diuraikan dibawah ini.

4. Garis Besar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

Adapun garis besar dari isi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini yang akan diteliti adalah:

1) Kualifikasi Akademik

a. Pengertian Kualifikasi Akademik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:603) disebutkan bahwa: kualifikasi adalah (1) pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian, (2)

keahlian yang dipergunakan untuk melakukan sesuatu (*menduduki jabatan dan sebagainya*). Sementara akademik diartikan sebagai hal yang berhubungan dengan akademis (*bersifat ilmiah, bersifat ilmu pengetahuan, bersifat teori tanpa praktis yang langsung*).

Adapun yang dimaksud dengan kualifikasi akademik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat (9) adalah “ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.”

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kualifikasi akademik adalah ijazah tingkatan pendidikan guru berdasarkan jenjang pendidikan yang telah mereka tempuh sesuai jenis, jenjang dan satuan pendidikan masing-masing ditempat bertugas.

b. Kondisi Profesi Guru Terkait dengan Kualifikasi Akademik

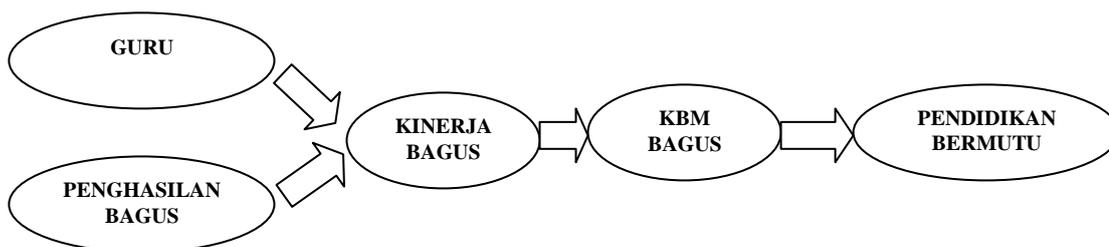
Dijadikannya guru sebagai suatu profesi adalah sebagai bagian dari peningkatan kualitas dan profesionalitas guru. Selain itu, kebijakan ini diharapkan bakal mengangkat harkat dan wibawa guru. Secara konkret, program yang akan dilaksanakan berbentuk sertifikasi guru. Mereka yang direkrut menjadi guru harus memenuhi proses sertifikasi hingga akhirnya layak untuk diberi sertifikat profesi.

Berpegang pada pandangan bahwa pendidikan itu sepanjang hayat, maka seharusnya pemerintah dapat mendorong dan membantu guru untuk terus meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Pada kenyataannya penghargaan terhadap guru sekarang ini belum sebanding dengan beberapa profesi lain yang lebih terpendang. Menurut Effendi dalam Suara Pendidikan (2007:10) alasan mengapa profesi guru hanya dipandang sebelah mata adalah:

1. Kebanyakan guru belum memenuhi persyaratan kualifikasi minimal untuk mengajar, baik dari segi ilmu maupun keterampilannya.
2. Penghasilan guru yang sangat kurang memadai apabila dibandingkan dengan penghasilan profesi lain membuat profesi keguruan tidak diminati.
3. Banyak guru tidak memiliki karakter yang baik sesuai dengan yang dituntut oleh masyarakat.

4. Guru kurang dihargai tinggi karena pekerjaan yang diembannya dianggap kurang membutuhkan keterampilan yang khusus dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk menjadi professional.

BAGAN 1
PENINGKATAN MUTU GURU SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN



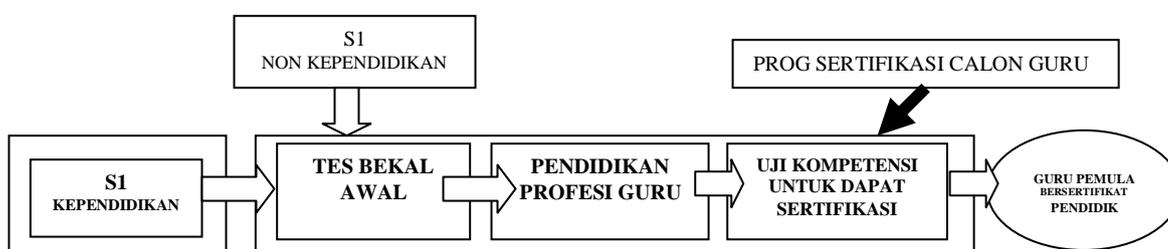
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen membutuhkan aturan-aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP) maupun Keputusan Presiden (Keppres). Sampai sekarang ini Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Guru dan Dosen belum ada sama sekali, baru sebatas Rancangan Peraturan Pemerintah. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen disebutkan bahwa studi lanjut atau pendidikan profesi guru dibiayai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dianggarkan melalui APBN/APBD, dengan teknis menunggu adanya Peraturan Pemerintah.

Fatah dalam <http://www.pikiran-rakyat.com>. (2006:2) menyebutkan bahwa dilihat dari latar belakang pendidikannya, guru SD yang sudah mencapai D-II baru 20 %. Padahal Undang-Undang Guru dan Dosen mensyaratkan bahwa guru SD harus lulusan D-IV, sedangkan untuk guru SMP yang sudah mencapai D-III baru 20 %. Sementara Undang-Undang Guru dan Dosen mensyaratkan harus lulusan S-1. Begitu juga guru SMA yang sudah S-1 baru mencapai 70 %.

Lebih lanjut dikatakan bahwa sesuai persyaratan APBN, untuk biaya pendidikan, biaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi tersebut harus ada sharing anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun kota/kabupaten. Besarnya sharing ditetapkan 20 % dari APBD, diluar gaji guru.

Menurut Djalal (2005:2) “bagi guru yang ingin memperoleh gelar kualifikasi akademik D-IV atau S-1 disarankan untuk masuk ke bidang studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang ditempuhnya.” Sementara, bagi guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik D-IV dan S-1 lebih dari lima tahun akan diberikan rekomendasi untuk mengikuti uji sertifikasi, sedangkan bagi guru yang masa kerjanya dibawah lima tahun harus melalui tes awal terlebih dahulu. Setelah itu melanjutkan pendidikan profesi, baru selanjutnya boleh mengikuti uji sertifikasi.

BAGAN 2
PENDIDIKAN PROFESI BAGI CALON GURU



Keterangan :

Perlu adanya mekanisme keluaran bagi lulusan S-1 kependidikan yang tidak ingin menjadi guru dan pintu masuk bagi lulusan S-1 non kependidikan yang ingin menjadi guru (Samani, dalam seminar Sertifikasi Guru tanggal 2 Juni 2007).

Lain halnya dengan calon guru yang belum menyelesaikan pendidikan D-IV atau S-1. Mereka harus menyelesaikan studinya terlebih dahulu barulah bisa ikut tes awal untuk mengikuti pendidikan profesi. Setelah mengikuti pendidikan profesi barulah mereka bisa ikut dalam uji sertifikasi. Jika lulus uji sertifikasi, maka akan memperoleh sertifikat pendidik. Dengan adanya sertifikat pendidik ini guru berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok.

c. Kurikulum dalam Penyetaraan Kualifikasi Akademik

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi

oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 29 disebutkan bahwa:

Ayat (1) Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki:

- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1)
- b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi, dan
- c. sertifikat profesi guru untuk PAUD

Ayat (2) Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1)
- b. latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi, dan
- c. sertifikat profesi guru untuk SD/MI.

Ayat (3) Pendidik pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1)
- b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan
- c. sertifikat profesi guru untuk SMP/MTs.

Ayat (4) Pendidik pada SMA/MA atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1)
- b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan
- c. sertifikat profesi guru untuk SMA/MA.

Ayat (5) Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1)
- b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan
- c. sertifikat profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB.

Ayat (6) Pendidik pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

- a. kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1)

- b. latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan
- c. sertifikat profesi guru untuk SMK/MAK.

Pendapat Sa'ud dalam Kompas (2007:1) mengatakan bahwa “program peningkatan kualifikasi guru supaya mendapat pendidikan S1, harus mempertimbangkan pengalaman kerja masing-masing guru selama ini.” Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan kualifikasi wajib mengobservasikan pengalaman itu dalam bentuk satuan kredit semester atau SKS.

Menurut Warsono (2006:5) kurikulum pendidikan profesi antara lain:

1. Struktur kurikulum pendidikan profesi bagi sarjana non-kependidikan adalah 36 SKS. Adapun komposisinya adalah 60 % (*Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial*), sedangkan 40 % (*Kompetensi Profesional*).
2. Struktur kurikulum pendidikan profesi bagi sarjana kependidikan adalah 36 SKS. Adapun komposisinya adalah 40 % (*Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian dan Kompetensi Sosial*), sedangkan 60 % (*Kompetensi Profesional*)

Masih menurut Warsono (2006:7) mata kuliah kependidikan yang akan diperoleh dalam pendidikan profesi berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Undang-Undang Guru dan Dosen, antara lain:

1. Landasan Pendidikan
2. Perkembangan Peserta Didik
3. Pengembangan Kurikulum
4. Belajar dan Pembelajaran
5. Teknologi Pembelajaran
6. Evaluasi dan Pengukuran Hasil Belajar
7. Bimbingan dan Konseling
8. PPL dan Penelitian Tindakan Kelas
9. Pengembangan Kepribadian Guru
10. Komunikasi Sosial
11. Penguasaan Bahan Ajar
12. Pendalaman Konsep dan Metode Keilmuan

c. Urgensi Kualifikasi Akademik

Dari data Depdiknas tahun 2001 dalam Suara Pendidikan (2007:2) menyebutkan bahwa lebih dari separuh guru yang ada di Indonesia belum memenuhi kualifikasi mengajar, baik dari segi ilmu ataupun keterampilan. Lebih lanjut disebutkan bahwa hampir separuh dari lebih kurang 2,6 juta guru di Indonesia tidak layak mengajar, karena kualifikasi dan kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar di sekolah. Disamping itu tercatat 15% guru mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya.”

Kualifikasi Akademik itu sendiri diatur dalam pasal 8, 9, dan 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Adapun hal-hal penting yang diatur dalam pasal-pasal tersebut adalah:

a. Pasal 8

Berbunyi “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

Maksudnya :

1. Kualifikasi akademik wajib dimiliki oleh semua guru,
2. Kualifikasi akademik yang ditempuh guru harus sesuai dengan jenis pendidikan formal ditempat bertugas,
3. Kualifikasi akademik yang ditempuh guru harus sesuai dengan jenjang pendidikan formal ditempat bertugas,
4. Kualifikasi akademik yang ditempuh guru harus sesuai dengan satuan pendidikan formal ditempat bertugas, dan
5. Kualifikasi akademik yang ditempuh guru harus sesuai dengan bidang studi yang diajarkan di kelas.

b. Pasal 9

Berbunyi “kualifikasi akademik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau diploma empat.”

Maksudnya :

1. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1 kependidikan) untuk guru SD, SMP dan SMA atau sederajat,
2. Bagi guru yang belum memiliki kualifikasi akademik diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1), maka wajib untuk menempuh kuliah kembali di Perguruan Tinggi (FKIP dan/atau LPTK) negeri maupun swasta,
3. Selain wajib memiliki kualifikasi akademik diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) guru juga wajib mengikuti pendidikan profesi untuk ikut dalam uji sertifikasi.

c. Pasal 13

Berbunyi :

Ayat (1) “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”

Ayat (2) “ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Maksudnya :

1. Untuk penyetaraan kualifikasi akademik atau menempuh kuliah kembali dan mengikuti pendidikan profesi biayanya wajib ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah,
2. Alokasi biaya untuk hal tersebut di atas akan disediakan dalam APBN/APBD,
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana untuk penyetaraan kualifikasi akademik guru diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2) Kompetensi

a. Pengertian Kompetensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:603) disebutkan bahwa yang dimaksud “kompetensi merupakan kewenangan (*kekuasaan*) untuk menentukan (*memutuskan sesuatu*).” Sementara itu, menurut Uzer (2000:4) “kompetensi

berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif.”

Lain halnya menurut pendapat Sudirman (2001:175) menyebutkan bahwa:

“kompetensi diartikan sebagai indikator kemampuan yang menunjukkan kepada perbuatan yang dapat diobservasikan dan sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek kognitif dan afektif dengan tahap-tahap pelaksanaannya.”

Finch dan Crunkilton dalam Mulyasa (2002:38) yang dimaksud dengan “kompetensi yaitu sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan.”

Selanjutnya, menurut Dikdasmen (2006:3) “kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar seorang guru yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.”

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 ayat (10) dijelaskan bahwa maksud dari “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.”

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi dalam penelitian ini mengacu pada kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar.

b. Kompetensi Guru Profesional

Kompetensi guru meliputi kemampuan melaksanakan pengajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran serta kemampuan mengevaluasi dan melaksanakan penilaian pengajaran.

Kompetensi Guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui Pendidikan Profesi. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Supriadi dalam Suparlan (2005:95) menyatakan bahwa guru profesional dituntut untuk memiliki lima kompetensi, sebagai berikut:

1. Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru ada kepada kepentingan siswa.
2. Guru menguasai secara mendalam bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya serta cara mengajarkannya pada siswa.
3. Guru bertanggungjawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, melalui cara pengamatan dalam perilaku siswa sampai hasil tes belajar.
4. Guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya, dan belajar dari pengalamannya.
5. Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar serta lingkungan profesinya seperti PGRI dan lain sebagainya.

Lebih lanjut dijelaskan dalam RPP Guru tahun 2006 mengenai isi dari komponen-komponen kompetensi tersebut, yang meliputi:

1. Kompetensi Pedagogik
Meliputi :
 - a. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan,
 - b. Pemahaman terhadap peserta didik,
 - c. Rancangan pembelajaran,
 - d. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis,
 - e. Pemanfaatan teknologi pembelajaran, dan
 - f. Evaluasi hasil belajar.
2. Kompetensi Kepribadian
Meliputi :
 - a. Kepribadian yang mantap,
 - b. Kepribadian yang stabil,
 - c. Kepribadian yang dewasa,
 - d. Kepribadian yang arif dan bijaksana,
 - e. Kepribadian yang berakhlaq mulia,
 - f. Kepribadian yang menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat,
 - g. Kepribadian secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri, dan
 - h. Kepribadian mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan
3. Kompetensi Sosial
Meliputi :
 - a. Berkomunikasi lisan, tulisan, suara atau isyarat,
 - b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional,

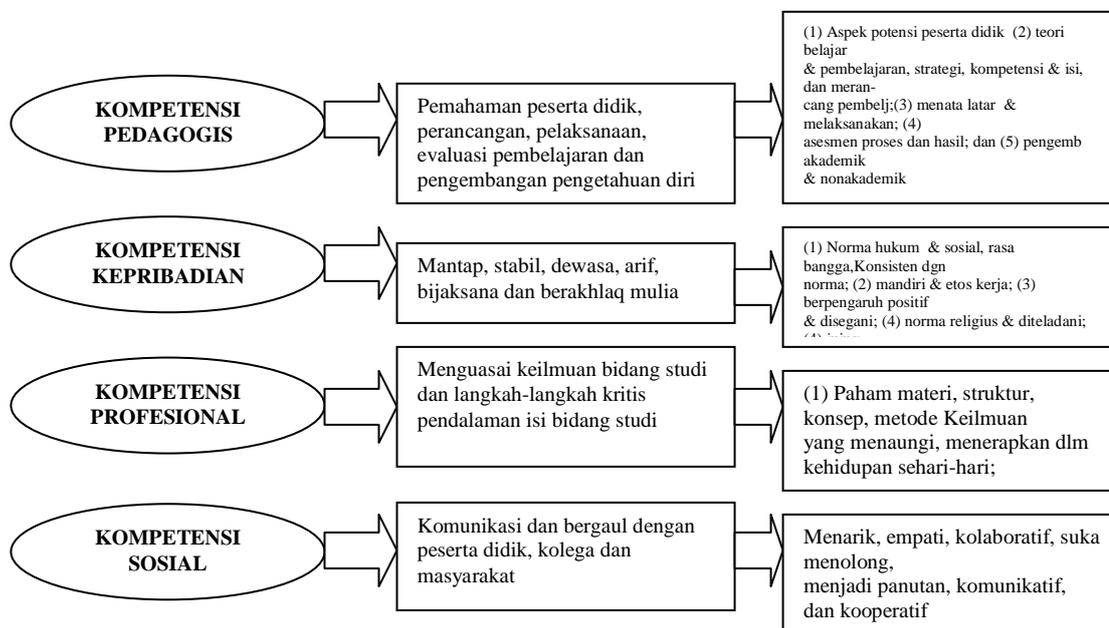
- c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan
 - d. Bergaul santun dengan masyarakat sekitar.
4. Kompetensi Profesional
Meliputi komponen penguasaan materi secara luas dan mendalam.

Selain itu, menurut Fauziah dalam (<http://www.duniaguru.com>., 2007:2) empat kompetensi yang akan diujikan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sebagai berikut:

1. Kompetensi Pedagogik
Kompetensi Pedagogik yaitu guru harus memiliki kemampuan berkenaan dengan pemahaman penguasaan kelas. Secara substansif kompetensi ini meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang mereka miliki.
2. Kompetensi Kepribadian
Kompetensi Kepribadian merupakan kemampuan guru dalam mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa sehingga dengan lulus ujian kompetensi ini, seorang guru menjadi teladan bagi siswa dan menjadikan siswa bersikap mulia.
3. Kompetensi Profesional
Kompetensi Profesional merupakan guru harus memiliki kemampuan berkenaan dengan penguasaan materi pembelajaran bidang studi yang dipegangnya.
4. Kompetensi Sosial
Berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dan bergaul baik dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali siswa serta masyarakat sekitar.

Sementara itu, Samani dalam seminar Sertifikasi Guru tanggal 2 Juni 2007 menggambarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Adapun untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan dibawah ini.

BAGAN 3
KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI GURU

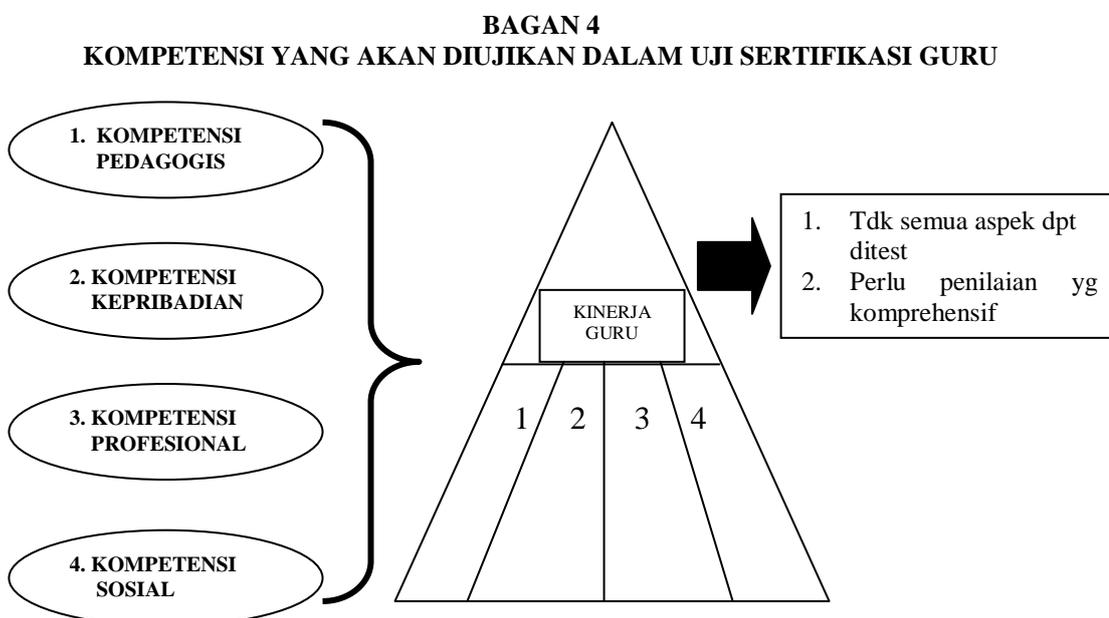


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 pasal 29 ayat (3) disebutkan bahwa “kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.” Kedua produk hukum tersebut mendapat respon dari masyarakat luas untuk secepat mungkin mewujudkan gagasan utamanya. Terutama dalam merinci kompetensi guru dan mengembangkan serta melaksanakan program serifikasi pendidik terutama guru. Semangat ini menghasilkan berbagai konsep dan upaya yang beragam yang terkadang melupakan keutuhan kompetensi guru, sehingga program sertifikasi seolah terpisah dari keseluruhan program pendidikan guru.

Disamping itu, tampak seakan program sertifikasi itu berlaku untuk mereka yang telah bertugas sebagai guru di lapangan. Sesungguhnya sebagian dari program sertifikasi telah terliput dalam program pendidikan guru yang berlaku sekarang ini. Selain itu, guru-guru yang telah bertugas di lapangan memiliki kompetensi yang bervariasi pula, sehingga untuk menampung mereka dalam program sertifikasi itu perlu dilakukan penelaahan mengenai kompetensi yang telah dimilikinya.

Pemikiran seperti di atas menuntut suatu kerangka yang sistematis dan komprehensif, terutama dalam merancang program sertifikasi yang harus mempertimbangkan bahwa program sertifikasi merupakan program terpadu dalam keseluruhan program pendidikan guru. Dengan demikian perlu diidentifikasi terlebih dahulu kompetensi guru secara utuh, termasuk kompetensi untuk memperoleh sertifikasi pendidik.

Terkait dengan sertifikat pendidik tersebut tadi, selanjutnya untuk dapat ikut dalam uji sertifikasi ada beberapa kompetensi yang akan diujikan seperti yang termuat dalam bagan 4 berikut ini.



Berikutnya akan disajikan tentang cara penilaian penguasaan kompetensi yang terdapat dalam tabel dibawah ini.



(Samani dalam seminar Sertifikasi Guru tanggal 2 Juni 2007)

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa empat kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai oleh guru antara lain:

1. Kompetensi Pedagogik

Merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, meliputi pemahaman peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2. Kompetensi Kepribadian

Merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan mempunyai akhlaq yang mulia.

3. Kompetensi Sosial

Merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sejawat pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

4. Kompetensi Profesional

Merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Penguasaan materi ajar, memahami kajian kritis untuk memperdalam penguasaan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait dan memahami penerapan konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Struktur Standarisasi Kompetensi Guru

Struktur Standarisasi Kompetensi Guru memiliki dua unsur penting yaitu unsur prasyarat atau potensi kepribadian dan unsur penguasaan perangkat kompetensi yang meliputi kompetensi keterampilan, proses dan penguasaan pengetahuan (*akademik*).

BAGAN 7
STRUKTUR STANDARISASI KOMPETENSI GURU



Yuliana (2006:14-15) unsur penguasaan perangkat kompetensi yang meliputi:

1. Potensi Kepribadian (*Prasyarat*)
Potensi ini merupakan prasyarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam melaksanakan profesinya. Potensi tersebut adalah potensi kepribadian interpersonal dan intrapersonal.
2. Kompetensi
Kompetensi merupakan seperangkat kemampuan yang harus dimiliki guru sekolah dengan kebutuhan pendidikan di sekolah (*kurikulum*) terutama masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi keterampilan proses dan penguasaan pengetahuan.
 - a. Kompetensi proses belajar mengajar.
Kompetensi proses belajar mengajar adalah penguasaan terhadap kemampuan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Kompetensi tersebut meliputi kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, kemampuan dalam menganalisis, kemampuan menyusun program perbaikan dan pengayaan serta menyusun program bimbingan konseling.
 - b. Kompetensi penguasaan pengetahuan.
Kompetensi penguasaan pengetahuan adalah penguasaan terhadap kemampuan kelulusan dan kedalaman pengetahuan. Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap wawasan pendidikan, pengembangan diri dan profesi serta pengembangan potensi peserta didik dan penguasaan akademik.

Masih menurut Yuliana (2006:16) unsur prasyarat dan unsur kompetensi guru tersebut secara terstruktur adalah sebagai berikut:

1. Kepribadian
 - Interpersonal
 - Intrapersonal
2. Keterampilan Proses
 - Perencanaan

- Pelaksanaan
 - Evaluasi
 - Analisis
 - Pembinaan dan Pengayaan
 - Bimbingan dan Konseling
3. Penguasaan Pengetahuan
- Pemahaman wawasan pendidikan
 - Pengembangan diri dan profesi
 - Pengembangan potensi peserta didik
 - Penguasaan akademik

d. Urgensi Kompetensi Guru

Kompetensi diatur dalam pasal 8 dan 10 UU No. 14 Tahun 2005. Adapun hal-hal penting yang diatur dalam pasal tersebut adalah:

a. Pasal 8

Berbunyi “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

Maksudnya :

1. Kompetensi wajib dimiliki oleh semua guru untuk meningkatkan profesionalisme guru itu sendiri,
2. Kompetensi yang dimaksud adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dikuasai guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

b. Pasal 10

Berbunyi:

- (1) Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Maksudnya :

1. Kompetensi Pedagogik meliputi pemahaman peserta didik, perancangan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran,
2. Kompetensi Kepribadian meliputi penguasaan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, wibawa dan bermoral,

3. Kompetensi Sosial meliputi kemampuan berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, kolega dan masyarakat sekitar,
4. Kompetensi Profesional meliputi kemampuan dalam penguasaan keilmuan bidang studi serta kajian materi pembelajaran secara luas dan mendalam,
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan yang ditempuh kembali oleh guru yang masa kerjanya dibawah lima tahun setelah tes awal dinyatakan lulus dan sebelum mengikuti uji sertifikasi,
6. Kompetensi guru diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

3) Sertifikasi

a. Pengertian Sertifikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:603) disebutkan bahwa “sertifikat merupakan (1) tanda atau surat keterangan (*pernyataan*) tertulis atau tercetak dari orang yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian, (2) penyertifikatan.”

Osarizalsyam dalam <http://www.depdiknas.go.id>. (2006:2) menyebutkan bahwa:

“Sertifikat diartikan sebagai sebuah dokumen pengakuan resmi yang diberikan kepada seseorang individu lulusan program pendidikan guru yang telah memenuhi kualifikasi dan memiliki kompetensi yang handal untuk melaksanakan tugas professional sebagai guru dan pendidik.”

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 1 pasal 1 ayat (11 dan 12) menyatakan bahwa:

“Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen, sedangkan sertifikat pendidik diartikan sebagai bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga professional.”

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sertifikasi diartikan sebagai proses pemberian sertifikat untuk guru. Sementara sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

b. Kondisi Profesi Guru Terkait dengan Sertifikasi Pendidik

Sertifikat pendidik merupakan fenomena baru dalam dunia pendidikan kita. Selama ini para guru tidak mengenal sertifikasi yang berkaitan dengan kewenangan mendidik bagi dirinya, dalam arti untuk mendidik siswa tidak diperlukan sertifikat. Keadaan ini sudah berubah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Sertifikat Pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikat Pendidik diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. Sertifikat Pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel. Sementara untuk ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik ini akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sertifikat guru dianugerahkan oleh lembaga guru (LPTK) dengan program studi pendidikan guru yang telah terakreditasi. Untuk dapat bekerja sebagai guru, lulusan program pendidikan guru yang telah memiliki sertifikat pendidik harus mendapat lisensi mengajar. Dalam hal ini lisensi mengajar yang dimaksud adalah suatu dokumen pengakuan resmi bagi guru untuk melaksanakan tugasnya. Lisensi diberikan oleh pejabat atau instansi yang berwenang mempekerjakan atau mengangkat guru dan yang dikuatkan oleh asosiasi guru yang mendapat pengakuan pemerintah dan masyarakat. Pada sistem pemerintahan Indonesia sekarang ini, lembaga pemberi lisensi itu adalah pemerintah daerah yakni Kepala Dinas Pendidikan daerah setempat.

Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi ini setara dengan satu kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Banyak hal yang dinilai dalam uji sertifikasi salah satu diantaranya penguasaan kompetensi berupa empat standar kompetensi guru yaitu kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial.

“Pada tahun 2006 sebanyak 250 ribu guru PNS mengikuti program sertifikasi, sedangkan jatah untuk guru swasta adalah 100 ribu orang” Prasetyo dalam (Suara Merdeka, 2007:1) tanggal 15 Maret 2007. Daftar guru yang akan mengikuti program sertifikasi, diusulkan dari sekolah kepada pemerintah daerah yang kemudian akan diseleksi hingga tingkat pusat. Seluruh biaya pendidikan sertifikasi guru dan peningkatan kualifikasi akademik ditanggung oleh pemerintah yang akan dianggarkan dalam APBN.

Mengenai Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Undang-Undang Guru sampai saat ini belum juga turun. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sulistyono dalam (Suara Merdeka, 2007:1) tanggal 8 Januari 2007 disebutkan bahwa “pada Juli 2006 lalu, pemerintah menjanjikan Peraturan Pemerintah akan terbit, tapi berubah Agustus, lalu Desember dan hingga sekarang tak juga terbit. Hasilnya uji sertifikasi menjadi tidak jelas.” Belum terbitnya Peraturan Pemerintah tentang guru ini akan berimbas pada program studi lanjut untuk guru agar berijazah minimal S-1 atau D-IV yang akan dibiayai oleh pemerintah juga tidak jelas. Pada akhirnya akan mengecewakan semua guru. Semestinya Peraturan Pemerintah tentang Undang-Undang guru ini sudah ada sekarang. Sebab hal tersebut memang sangat dibutuhkan untuk menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

c. Hubungan antara Sertifikasi Pendidik dengan Penghasilan Guru

Jika program sertifikasi profesi dapat secara langsung menjawab persoalan yang membuat citra guru merosot, guru niscaya akan menjadi sebuah profesi yang menarik dan dikejar orang. Namun, yang menjadi masalah tampaknya program tersebut tidak akan sanggup menjawab beberapa persoalan mendasar profesi keguruan. Salah satu masalahnya adalah bahwa sejak awal yang dipercaya sebagai perancang program ini adalah sejumlah universitas eks IKIP. Menjadi pertanyaan mengapa mereka yang tidak berhasil mengangkat martabat guru bahkan mengubah IKIP menjadi Universitas dijadikan penyusun program nasional yang sedemikian penting.

Dalam pasal 8 jelas tersurat dan tersirat bahwa setiap guru wajib memiliki sertifikat pendidik, disamping berbagai komponen lainnya. Itulah sebabnya masalah sertifikasi pendidik menjadi “*urgen*” saat ini. Sertifikasi pendidik merupakan fenomena baru yang konstruktif. Memang banyak diakui orang dengan dilakukannya sertifikasi pendidik akan terlihat jelas mana guru yang profesional dan mana yang tidak profesional. Hal ini dapat diasumsikan bahwa sertifikasi pendidik sejalan dengan profesionalismenya. Konstruksi sertifikasi pendidik semakin menonjol ketika pemerintah akan menaikkan gaji atau penghasilan bagi para guru yang telah memiliki sertifikat pendidik.

Bahasa sederhananya ialah kedepan guru kita diwajibkan mempunyai sertifikat pendidik melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan. Artinya dengan sertifikat pendidik ini seorang guru bisa diakui sebagai pendidik profesional dan di dalam kapasitasnya sebagai guru profesional, maka dirinya berhak mendapat tambahan penghasilan yang jumlahnya sangat menggiurkan untuk ukuran guru di Indonesia pada umumnya.

Bagi kebanyakan guru di Indonesia, tambahan penghasilan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan mengingat penghasilan guru di Indonesia pada umumnya relatif rendah/kecil. Rendahnya penghasilan guru di Indonesia semakin terasa apabila dibandingkan dengan negara yang kinerja pendidikannya relatif memadai, seperti Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura.

Dalam kaitannya dengan penghasilan guru seperti yang dijelaskan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.

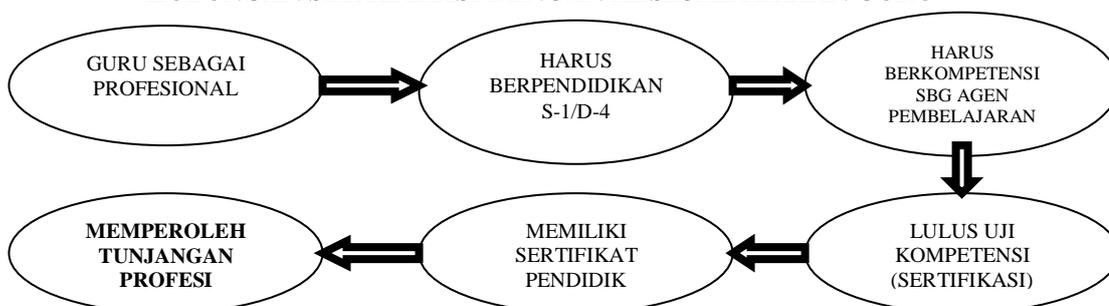
Lebih lanjutnya pada pasal 16 ayat (1) dijelaskan pemerintah akan memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan dan/atau satuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi yang diberikan kepada guru setara dengan satu kali gaji pokok. Selain tunjangan profesi guru juga akan memperoleh tunjangan fungsional. Kemudian tunjangan khusus yang besarnya satu kali gaji pokok. Guru juga akan mendapatkan maslahat tambahan lain sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Guru dan Dosen.

Konsep sertifikasi pada dasarnya memang konstruktif akan tetapi untuk merealisasikannya akan banyak sekali mengalami kendala di lapangan. Pemerintah akan menanggung sepenuhnya proses sertifikasi guru, baik itu ketika mereka melanjutkan pendidikan ke jenjang S-1 atau D-IV maupun untuk mengikuti uji sertifikasi. Sumber pendanaan itu akan ditanggung bersama oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang diambil dari alokasi dana APBN/APBD mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2015. Depdiknas menginginkan agar proses sertifikasi tidak hanya sebatas formalitas belaka, demikian juga harapan semua guru. Sehingga selain kalangan guru yang menerima dana tersebut, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Alasannya adalah selain berperan menyelenggarakan pendidikan bagi guru, LPTK juga akan memberikan sertifikasi baik itu pada guru, calon guru maupun lulusan S-1 non kependidikan.

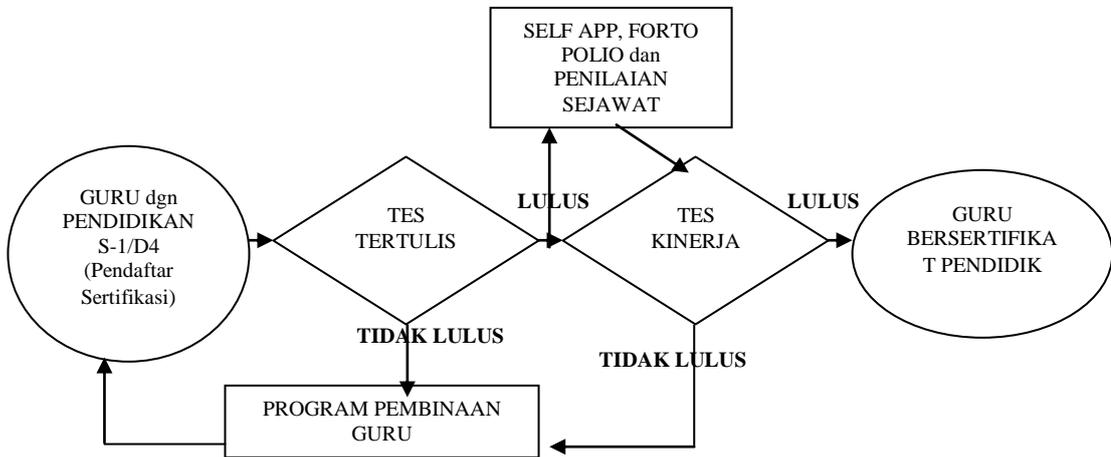
Jadi, hubungan antara sertifikasi pendidik dengan penghasilan guru sangat erat sekali. Sebab, apabila guru telah lulus uji sertifikasi dan mendapat sertifikat pendidik maka secara otomatis guru tersebut akan memperoleh tambahan penghasilan yang lumayan cukup untuk kehidupan sehari-hari.

BAGAN 8
HUBUNGAN SERTIFIKASI DENGAN KESEJAHTERAAN GURU



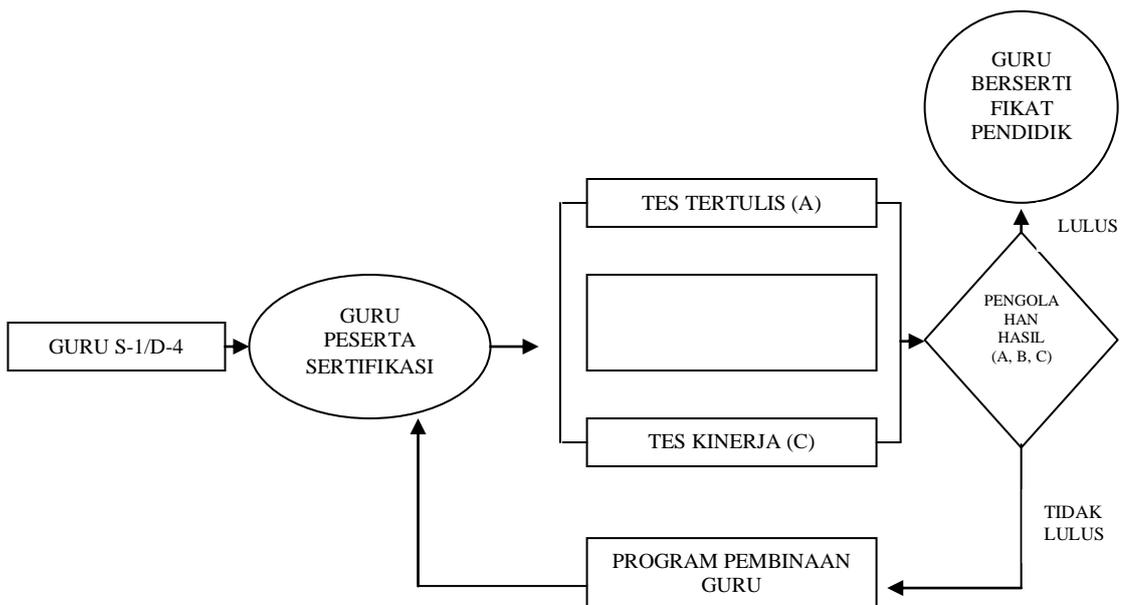
d. Sertifikasi Guru dalam Jabatan

BAGAN 9
ALUR SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
(Alternatif 1)

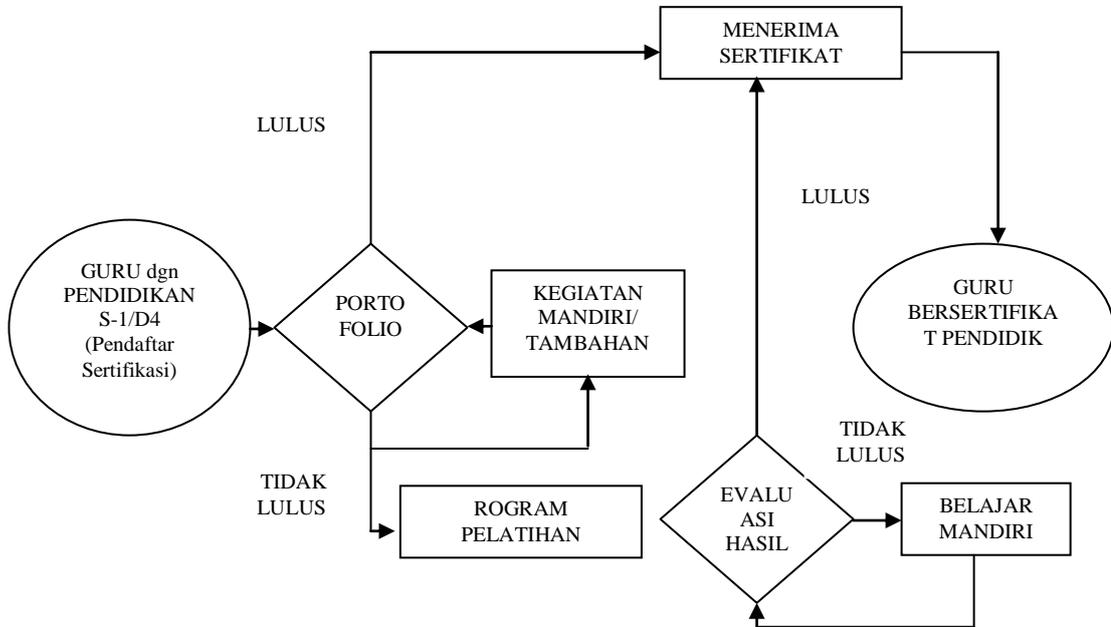


Selain alternatif pertama, ada juga alternatif kedua yang ditawarkan dan disiapkan untuk sertifikasi guru dalam jabatan. Adapun untuk lebih jelas dapat dilihat dalam bagan 7 berikut ini.

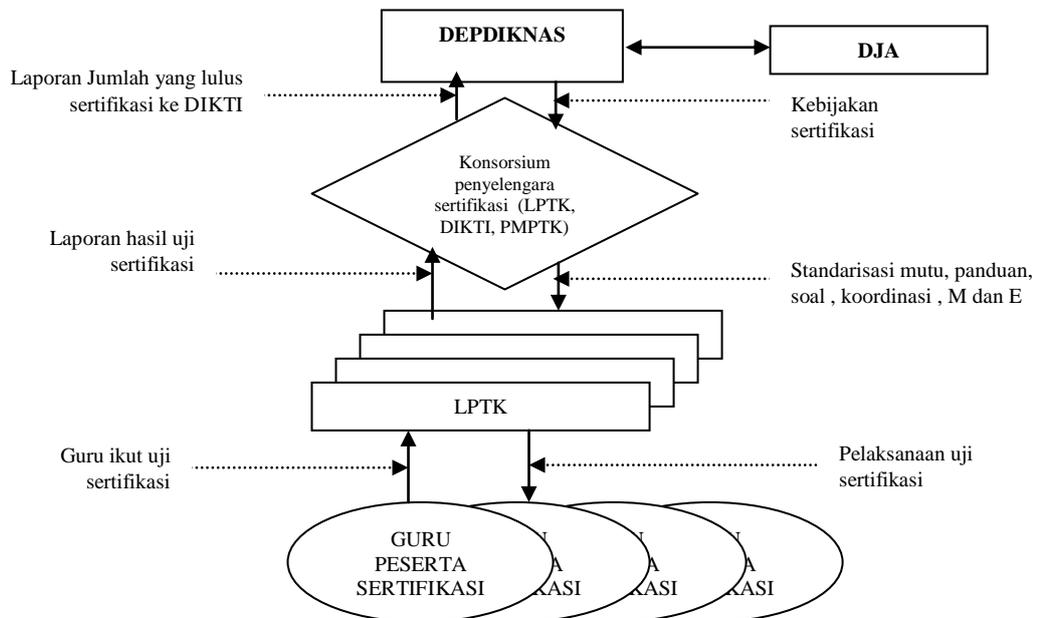
BAGAN 10
ALUR SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
(Alternatif 2)



BAGAN 11
ALUR SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
(Alternatif 3)



BAGAN 12
ALUR PELAKSANAAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN



e. Urgensi Sertifikasi Pendidik

Sertifikasi pendidik ini diatur dalam pasal 8, 11, 12 dan 13 UU No. 14 Tahun 2005. Adapun hal-hal penting yang diatur dalam pasal-pasal tersebut adalah:

a. Pasal 8

Berbunyi “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”

Maksudnya :

1. Sertifikat pendidik wajib dimiliki oleh semua guru untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional,
2. Sertifikasi pendidik ini diartikan sebagai pemberian sertifikat pendidik kepada guru,
3. Semua guru wajib mengikuti uji sertifikasi baik guru yang masa kerjanya sudah lama maupun yang baru.

b. Pasal 11

Berbunyi :

- (1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah.
- (3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Maksudnya :

1. Guru yang telah memenuhi semua persyaratan dan lulus dalam uji sertifikasi akan diberikan sertifikat pendidik,
2. Lembaga penyelenggara sertifikasi adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai LPTK baik negeri maupun swasta yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi pelaksana uji sertifikasi,

3. Dalam pelaksanaan uji sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel tanpa unsur KKN,
4. Untuk ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi ini akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - c. Pasal 12
Berbunyi “setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.”

Maksudnya :

1. Bagi setiap orang (*guru atau calon guru*) yang lulus dalam uji sertifikasi dan telah mendapat sertifikat pendidik akan diangkat menjadi guru sesuai dengan satuan pendidikannya,
2. Guru yang telah mendapat sertifikat pendidik harus mengajar sesuai dengan bidang studi yang ditekuninya,
3. Penempatan guru akan dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan pemerintah daerah.

d. Pasal 13

Berbunyi :

Ayat (1) “pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.”

Ayat (2) “ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Maksudnya :

1. Uji sertifikasi boleh diikuti oleh siapa saja yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
2. Untuk ikut dalam uji sertifikasi biayanya akan ditanggung oleh pemerintah dan pemerintah daerah,
3. Alokasi biaya untuk hal tersebut di atas akan disediakan dalam APBN/APBD, dan

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana untuk sertifikasi pendidik akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

5) Visi dan Misi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

a. Visi

Adapun Visi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 adalah:

- 1) Mewujudkan profesi guru sebagai sumber intelektual dan moral, mandiri, berwawasan kebangsaan dan bermartabat
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu

b. Misi

Misi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 antara lain:

- 1) Mengangkat martabat guru dan dosen
- 2) Meningkatkan hak dan kewajiban guru dan dosen
- 3) Meningkatkan kompetensi guru dan dosen
- 4) Memajukan profesi serta karier guru dan dosen
- 5) Meningkatkan mutu pembelajaran
- 6) Meningkatkan mutu pendidikan nasional
- 7) Mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antar daerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik dan kompetensi
- 8) Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antar daerah
- 9) Meningkatkan pelayanan pendidikan bermutu
- 10) Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas
- 11) Memberi peluang kepada guru untuk berkreasi dan berinovasi secara optimal sesuai dengan kemampuannya
- 12) Memberikan perlindungan hukum dan peningkatan kesejahteraan
- 13) Membangun integritas pribadi yang luhur dan beraqlak mulia serta memiliki komitmen yang tinggi pada profesinya
- 14) Mengembangkan nilai luhur persatuan dan kesatuan melalui peran serta guru sebagai perekat bangsa dalam rangka otonomi daerah.

Berdasarkan visi dan misi di atas diperlukan strategi-strategi khusus. Strategi khusus tersebut menurut Depdiknas dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (2006:41) meliputi:

1. Penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi.
2. Pemenuhan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang sesuai dengan prinsip profesionalitas.
3. Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi

yang dilakukan secara merata, objektif, dan transparan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan.

4. Penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen.
5. Peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas profesional.
6. Peningkatan peran organisasi profesi untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional.
7. Penguatan kesetaraan antara guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
8. Penguatan tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional, dan
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak.

DAFTAR PUSTAKA

- Cunningsworth, Alan. *Choosing Your Coursebook*. Oxford: Heinemann Publishers Ltd., 1995.
- Hadi, Sutarto. *Effective Teacher Professional Development for the Implementation of Realistic Mathematics Education in Indonesia*. Enschede: University of Twente, 2002.
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional; Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006.
- Nasution, *Manajemen Mutu Terpadu*, Jakarta: Chalia Indonesia, 2001.
- Nunan, David. *The Learner-Centred Curriculum: A Study in Second Language Teaching*. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
- Depdiknas. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)*, Jakarta: Depdiknas, 2001.
- Depdiknas. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Depdiknas, 2003.
- Depdiknas. *Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas, 2005.
- Roos E, Joel, *Total Quality Management*, London: Kogan Page, Ltd.
- Sallis Edward, *Total Quality Management in Education*, Blagdon The Staff College, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Usman, Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2002.